

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA PD)
TAHUN 2026**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja PD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2026.

Semarang, 12 Desember 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text "PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH" at the top and "DINAS PERHUBUNGAN" at the bottom, separated by two stars. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the stamp, the name and title of the official are printed.

Ir. Arief Djatmiko, MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660801 199603 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya pada aspek konektivitas, aksesibilitas, dan keselamatan transportasi. Dalam penyelenggaraannya, sektor transportasi provinsi Jawa Tengah masih dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain keterbatasan kapasitas prasarana, pemenuhan standar keselamatan yang belum optimal, serta kebutuhan integrasi layanan antarmoda yang semakin meningkat. Kondisi tersebut menuntut adanya perencanaan yang komprehensif, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, perlu disusun rencana kerja untuk memastikan konsistensi perencanaan, penganggaran, dan implementasi program.

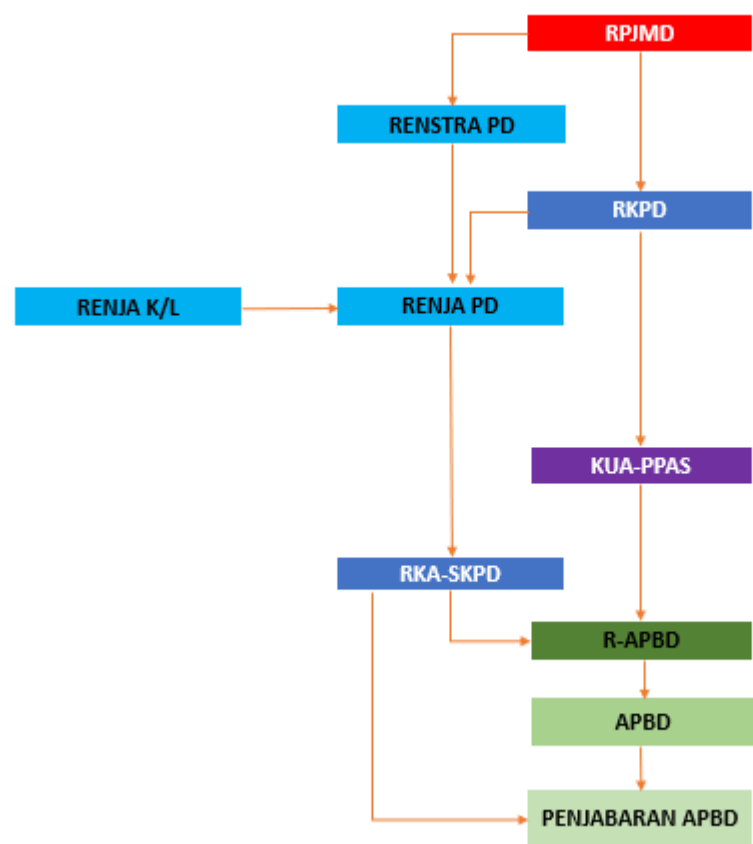
Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja PD sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 272-273), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 (Pasal 11) tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan pada Peraturan Daerah no 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029, Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah 2026, Renja Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Tahun 2026, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Setelah tahap perencanaan selesai dilanjutkan pada tahap penganggaran :

1. Kepala Daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD;
2. Kepala Daerah Bersama DPRD menyepakati Kebijakan Umum APBD (KUA) selanjutnya Pemerintah Daerah dan DPRD membahas Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disampaikan Kepala Daerah;
3. Kepala Daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD;

4. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan nota kesepakatan serta Renja PD terkait dengan target kinerja dan pagu indikatif;
5. Setelah RKA-SKPD dibuat, selanjutnya menyusun rencana Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, rencana peraturan tersebut akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri;
6. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD oleh Kepala Daerah.



Gambar I.1. Keterkaitan Renja Dengan Dokumen Perencanaan

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun .2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No.6757);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7095);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6040);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5916);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5207);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5236);
 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
 24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
 25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
 26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
 27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
 28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6335);
 31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 32. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 33. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
 34. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
 35. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 36. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
 37. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 279). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 38. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 39. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

40. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
41. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3);
42. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 124);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 25);
45. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 135);
46. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 2 ; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 145);
47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 165);
48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 167);
49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 171);
50. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 172);
51. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);

52. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 908);
53. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1391);
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 913);
55. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 424);
56. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 813);
57. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1674);
58. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
59. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1087);
60. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019/ Nomor 1447);

61. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 647);
62. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 648);
63. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2013 tentang Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 80);
64. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 22);
65. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 54);
66. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 28);
67. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP.432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
68. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2025 tentang Penetapan Bandar Udara Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025);
69. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.22/31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.22/57 Tahun 2016 Tentang Penetapan Terminal Penumpang Tipe B Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor);
70. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.34/07 Tahun 2021 tentang Penetapan Trayek Pelayanan Angkutan Dan Lintasan Penyeberangan Antar Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021);
71. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 622/2/Tahun 2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023).

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran / pagu indikatif pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Tujuan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah :

- a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif Tahun 2026 yang tertuang

dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisa dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024;

- b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029 pada tahun ke-1 periode Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- | | | |
|---------|---|--|
| BAB I | : | PENDAHULUAN |
| | | Menguraikan latar belakang; landasan hukum; maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dari Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. |
| BAB II | : | HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 |
| | | Memuat reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025, mengacu pada APBD Tahun 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD Tahun 2024-2026 untuk evaluasi Renja PD Tahun 2024 dan Renstra PD Tahun 2024-2026 untuk prakiraan capaian tahun 2025. Reviu hasil evaluasi, dan realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan/atau realisasi APBD untuk PD bersangkutan. |
| BAB III | : | TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH |
| | | Memuat Telaahan terhadap kebijakan nasional; Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. |
| BAB IV | : | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH |
| | | Menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatifnya untuk tahun 2026 dan perkiraan maju Tahun 2027 serta manajemen risiko program dan kegiatan tahun 2026. |
| BAB V | : | PENUTUP |
| | | Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut. |

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) 2024 dan Capaian Renstra PD

Pagu Anggaran yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 193.075.157.000,- sedangkan presentase penggunaan anggaran belanja di Tahun 2024 sebesar 98,36% atau sebesar Rp. 189.906.926.080,- dengan realisasi fisik sebesar 100 %.

Dengan gambaran kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan : Dari 38 indikator program semua indikator program mencapai target kinerja. Sedangkan untuk indikator kegiatan dari 83 indikator kegiatan semua indikator memenuhi target kinerja hasil / keluaran.
2. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : Dari 38 indikator program sebanyak 23 indikator program yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan, yaitu :
 - 1) Sebanyak 9 indikator program penunjang urusan pemerintah daerah yaitu Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD dan Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (Kantor Dinas, BPSPP Wilayah I s.d VI dan Balai Transportasi Jawa Tengah) dengan tingkat capaian 100%;
 - 2) Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A tercapai 0,97% dari target 0,97% dengan tingkat capaian 100 %;
 - 3) Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B tercapai 0,97% dari target 0,97% dengan tingkat capaian 100 %;
 - 4) Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A tercapai 0,98% dari target 0,98% dengan tingkat capaian 100 %;
 - 5) Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A tercapai 0,97% dari target 0,97% dengan tingkat capaian 100 %;

- 6) Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B tercapai 0,98% dari target 0,98% dengan tingkat capaian 100 %;
- 7) Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A tercapai 0,97% dari target 0,97% dengan tingkat capaian 100 %;
- 8) Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan tercapai 0,38% dari target 0,38% dengan tingkat capaian 100 %;
- 9) Rasio pemenuhan fasilitas keselamatan penyeberangan sungai tercapai 0,20% dari target 0,20% dengan tingkat capaian 100 %;
- 10) Rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan tercapai 0,04% dari target 0,04% dengan tingkat capaian 100 %;
- 11) Rasio implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis tercapai 0,50% dari target 0,50% dengan tingkat capaian 100 %;
- 12) Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B tercapai 0,01% dari target 0,01% dengan tingkat capaian 100 %;
- 13) Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A tercapai 0,21% dari target 0,21% dengan tingkat capaian 100 %;
- 14) Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A tercapai 0,17% dari target 0,17% dengan tingkat capaian 100 %;
- 15) Rasio trayek angkutan jalan tercapai 0,51% dari target 0,51% dengan tingkat capaian 100 %;

Sedangkan untuk indikator kegiatan dari 83 indikator kegiatan sebanyak 71 indikator kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dengan rincian pada Tabel 2.1.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : Dari 38 Indikator program sebanyak 15 Indikator program yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu :
 - 1) Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A tercapai 0,82% dari target 0,81% dengan tingkat capaian 101,23%;
 - 2) Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah

II Kelas A tercapai 0,83% dari target 0,81% dengan tingkat capaian 102,47 %;

- 3) Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A tercapai 0,83% dari target 0,81% dengan tingkat capaian 102,47 %;
- 4) Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A tercapai 0,83% dari target 0,81% dengan tingkat capaian 102,47 %;
- 5) Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A tercapai 0,82% dari target 0,81% dengan tingkat capaian 101,23%;
- 6) Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A tercapai 0,82% dari target 0,81% dengan tingkat capaian 101,23%;
- 7) Rasio kendaraan laik jalan di Jawa Tengah tercapai 0,99% dari target 0,981% dengan tingkat capaian 100,92%;
- 8) Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A tercapai 0,26% dari target 0,24% dengan tingkat capaian 108,33%;
- 9) Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A tercapai 0,22% dari target 0,20% dengan tingkat capaian 110,00%;
- 10) Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A tercapai 0,25% dari target 0,23% dengan tingkat capaian 108,70%;
- 11) Rasio konektivitas perkotaan tercapai 0,51% dari target 0,481% dengan tingkat capaian 106,03%;
- 12) Rasio pemanfaatan terminal tercapai 0,22% dari target 0,218% dengan tingkat capaian 100,92%;
- 13) Rasio konektivitas transportasi laut dan ASDP tercapai 0,33% dari target 0,31% dengan tingkat capaian 106,45%;
- 14) Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum tercapai 65,45% dari target 65,38% dengan tingkat capaian 100,11%;
- 15) Persentase perpindahan moda angkutan umum tercapai 52,22% dari target 51,72% dengan tingkat capaian 100,97%;

Sedangkan untuk indikator kegiatan dari 83 indikator kegiatan sebanyak 12 indikator kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dengan rincian pada Tabel 2.1.

4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya dan melebihi target kinerja program / kegiatan :

- a. Penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan dikarenakan koordinasi dengan K/L, OPD Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kab/Kota dan *Stakeholders* terkait dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
- b. Penyebab melebihi target kinerja program/kegiatan:
 - a) Meningkatnya rasio konektivitas perkotaan melebihi dari target yang ditetapkan dikarenakan adanya kerjasama berupa CSR dari perusahaan swasta serta kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan Pemerintah Kabupaten Kendal terkait dengan penyediaan fasilitas halte Trans Jateng;
 - b) Tercapainya konektivitas transportasi laut dan ASDP melebihi target disebabkan karena adanya kemudahan perizinan usaha angkutan laut melalui OSS RBA;
 - c) Peningkatan perpindahan moda angkutan umum dipengaruhi meningkatnya minat masyarakat menggunakan Trans Jateng serta terdapat penambahan armada pada tahun 2024 yaitu penambahan 1 jumlah armada untuk rute Surakarta-Wonogiri dan penambahan 2 armada untuk rute Semarang – Kendal, serta operasional rute Surakarta – Wonogiri secara penuh selama 1 Tahun;
 - d) Meningkatnya pemanfaatan terminal dipengaruhi adanya pemanfaatan terminal sebagai tempat pergerakan ekonomi masyarakat seperti pasar malam, pasar durian dan pusat kuliner, selain itu terdapat pemeliharaan terminal di Terminal Penggaron dengan penambahan fasilitas pojok baca serta pembangunan Terminal Kutoarjo tahap V dengan penambahan pusat kuliner “Keburejo Hangout Point”;
 - e) Meningkatnya pengguna angkutan umum pada masa lebaran dan natal dipengaruhi meningkatnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum salah satunya meningkatnya pengguna kereta api dari tahun 2023 ke 2024, selain itu ada program mudik gratis dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 61 Bus yang tersebar di beberapa titik di Jawa Tengah.
5. Capaian program/kegiatan terhadap RPD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2026 yang melampaui target kinerja program dan kegiatan memberikan implikasi positif terhadap peningkatan kelancaran pergerakan/mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mendorong pengembangan wilayah secara berkelanjutan.

Dengan diterbitkan Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi

Pemuthakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada Renja PD Tahun 2023 dan pada 2024-2025 menggunakan nomenklatur Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023. Adapun persandingan program/kegiatan tersebut sebagai berikut :

Urusan	Tahun 2023	Tahun 2024	Keterangan
Perhubungan	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Ada Perubahan Pada Nomenlaktur Sub Kegiatan
	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
	Pengelolaan Perkeretaapian	Pengelolaan Perkeretaapian	
	Pengelolaan Pelayaran	Pengelolaan Pelayaran	

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Provinsi Jawa Tengah

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target KinerjaHas il Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capian Realisasi Target Renstra PD (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X														
X	X													
X	X	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
					Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	%		100,00						
					Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)	%		100,00						
					Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)	%		100,00						

[illegible]

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target KinerjaHas il Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	Laporan		12						
					Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Laporan		12						
					Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Laporan		12						
					Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Laporan		12						
					Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Laporan		12						
					Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)	Laporan		12						
					Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)	Laporan		12						

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target KinerjaHas il Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)									
					Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	Laporan		-						
X	X	0	1.	Administrasi Barang										
	X	1	0	Milik Daerah pada										
			3	Perangkat Daerah										
					Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan		12						
X	X	0	1.	Administrasi										
	X	1	0	Kepegawaian										
			5	Perangkat Daerah										
					Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan		12						
X	X	0	1.	Administrasi Umum										
	X	1	0	Perangkat Daerah										
			6											
					Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	Laporan		12						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target KinerjaHas il Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
										Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Laporan		12						
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Laporan		12						
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Laporan		12						
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Laporan		12						
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)	Laporan		12						
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	Laporan		12						
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan		12						

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target KinerjaHas il Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					(Balai Transportasi Jawa Tengah)									
X	X	0	1.	Pengadaan Barang										
	X	1	0	Milik Daerah										
			7	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
					Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	Laporan		12						
					Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	Laporan		-						
X	X	0	1.	Penyediaan Jasa										
	X	1	0	Penunjang Urusan										
			8	Pemerintahan Daerah										
					Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	Laporan		12						
					Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Laporan		12						

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target KinerjaHas il Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capian Realisasi Target Renstra PD (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Laporan		12						
					Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Laporan		12						
					Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Laporan		12						
					Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)	Laporan		12						
					Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	Laporan		12						
					Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Laporan		12						

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target KinerjaHas il Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capian Realisasi Target Renstra PD (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pemerintahan Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)									
X	X	0	1.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
X	X	1	0											
			9											
					Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	Laporan		12						
					Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Laporan		12						
					Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Laporan		12						
					Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Laporan		12						
					Jumlah laporan Pemeliharaan Barang	Laporan		12						

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target KinerjaHas il Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capian Realisasi Target Renstra PD (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1	0		PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)										
5		2												
					Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang	%		38,66						
					Persentase jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan	%		12,99						
					Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM	%		5,68						
					Persentase penumpang angkutan umum pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	%		193,89						
					Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis	%		42,86						
					Persentase terminal bus tipe B sesuai standar pelayanan	%		43,75						
					Persentase Fasilitas pembangunan infrastruktur transportasi strategis	%		100,00						
					Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan	%		37,50						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target KinerjaHas il Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
										Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A									
						Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%		52,72						
						Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	%		60,00						
						Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	%		43,50						
						Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%		68,75						
						Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%		52,21						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target KinerjaHas il Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capian Realisasi Target Renstra PD (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%		42,31						
					Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%		79,89						
					Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	%		84,62						
					Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	%		66,59						
					Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%		44,83						
					Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola	%		84,23						

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target KinerjaHas il Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capian Realisasi Target Renstra PD (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A									
					Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi	%		34,85						
2	1	0	1.	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi										
					Jumlah Peraturan Gubernur Terkait Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi Jawa Tengah	Dokume n		1						
2	1	0	1.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi										
					Jumlah total perlengkapan jalan terpasang di Ruas Jalan Provinsi	Unit		4.252						
					Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah I Kelas A	Lokasi		10						
					Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah I Kelas A	Km		10,25						
					Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan	Lokasi		12						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target KinerjaHas il Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
										Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Di BPSPP Wilayah II Kelas B									
						Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah II Kelas B	Km		10,05						
						Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah III Kelas A	Lokasi		11						
						Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah III Kelas A	Km		11,45						
						Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah IV Kelas A	Lokasi		11						
						Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah IV Kelas A	Km		10,75						
						Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah V Kelas B	Lokasi		11						
						Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah V Kelas B	Km		9,75						

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target KinerjaHas il Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capian Realisasi Target Renstra PD (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah VI Kelas A	Lokasi		13						
					Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah VI Kelas A	Km		10,25						
					Jumlah shelter dalam kondisi baik yang siap operasional	Unit		214						
2	1	0	1.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B										
			0		Jumlah Terminal Tipe B yang sesuai standar pelayanan berdasarkan tingkat pemenuhan per aspek	Lokasi		14,00						
2	1	0	1.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi										
			0		Jumlah pelaksanaan Supervisi MRLL untuk Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan	Kali		42						
					Jumlah Rekomendasi Hasil Forum LLAJ	Dokume n		26						
					Jumlah Kabupaten/Kota yang dinilai	Kabupate n/Kota		18						

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target KinerjaHas il Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					pelaksanaanmanajemen dan rekayasa lalu lintas di ProvinsiJateng									
2	1 5	0 2	1. 0 6	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi										
					Jumlah Rekomendasi / Persetujuan Andalalin diJalan Provinsi	Dokume n		162						
2	1 5	0 2	1. 0 7	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan										
					Jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan	Orang		254						
					Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Perusahaan Angkutan Umum	Kegiatan		12						
					Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah I Kelas A	Unit		51.265						
					Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah II Kelas B	Unit		8.152						
					Jumlah Kendaraan terdata pada terminal	Unit		174.883						

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target KinerjaHas il Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capian Realisasi Target Renstra PD (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					type B Di BPSPP Wilayah III Kelas A									
					Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah IV Kelas A	Unit		25.712						
					Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah V Kelas B	Unit		82.996						
					Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah VI Kelas A	Unit		46.528						
2	1	0	1.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
	5	2	0											
			8											
					Jumlah penumpang angkutan umum yang terdata pada Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru	Orang		9.044.787						
					Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah I Kelas A	Kegiatan		8						
					Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode	Kegiatan		4						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target KinerjaHas il Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capian Realisasi Target Renstra PD (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
					Jumlah perusahaan AJDP yang di monitoring dan evaluasi	Unit								
2	1	0	1.	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				15						
					Jumlah trayek angkutan perintis yang terlayani (trayek)	Trayek		4						
					Jumlah perusahaan yang dievaluasi tarif dan load factor (Perusahaan)	Unit		-						
2	1	0		PENGELOLAAN PELAYARAN										
					Persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang	%		75,00						
					Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin	%		51,12						

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target KinerjaHas il Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capian Realisasi Target Renstra PD (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api	%		45,45						
2	1	0	1.	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian										
					"Jumlah perlintasan KA yang dilengkapi prasarana penunjang sesuai tingkat pemuenuhan per jenis Fasilitas keselamatan (Lokasi)	Lokasi		10						
X														
X	X													
X	X	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Sekretariat)	%	100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target KinerjaHas il Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capian Realisasi Target Renstra PD (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A)	%	100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B)	%	100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A)	%	100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target KinerjaHas il Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A)	%	100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B)	%	100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A)	%	100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
X	X	0	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target KinerjaHas il Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capian Realisasi Target Renstra PD (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	0	1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
X	X	1	0											
			2											
					Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (Sekretariat)	Dokume n	2		2	2	100	2	2	100
					Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (BPSPP Wilayah I)	Dokume n	1		1	1	100	1	1	100
					Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (BPSPP Wilayah II)	Dokume n	1		1	1	100	1	1	100
					Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (BPSPP Wilayah III)	Dokume n	1		1	1	100	1	1	100
					Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (BPSPP Wilayah IV)	Dokume n	1		1	1	100	1	1	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target KinerjaHas il Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capian Realisasi Target Renstra PD (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (BPSPP Wilayah V)	Dokume n	1		1	1	100	1	1	100
					Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (BPSPP Wilayah VI)	Dokume n	1		1	1	100	1	1	100
					Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (Balai Transportasi)	Dokume n	1		1	1	100	1	1	100
X	X	0	1.	Administrasi										
	X	1	0	Kepegawaian										
			5	Perangkat Daerah										
					Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (Sekretariat)	%	100		100	100	100	100	100	100
					Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (BPSPP Wilayah I)	%	100		100	100	100	100	100	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target KinerjaHas il Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capian Realisasi Target Renstra PD (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (BPSPP Wilayah II)	%	100		100	100	100	100	100	100
					Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (BPSPP Wilayah III)	%	100		100	100	100	100	100	100
					Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (BPSPP Wilayah IV)	%	100		100	100	100	100	100	100
					Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layananBPSPP Wilayah V)	%	100		100	100	100	100	100	100
					Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (BPSPP Wilayah VI)	%	100		100	100	100	100	100	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target KinerjaHas il Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capian Realisasi Target Renstra PD (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (Balai Transportasi)	%	100		100	100	100	100	100	100
X	X	0	1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
	X	1	0											
					Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (Sekretariat)	%	100		100	100	100	100	100	100
					Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (BSPP Wilayah I)	%	100		100	100	100	100	100	100
					Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (BPSPP Wilayah II)	%	100		100	100	100	100	100	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target KinerjaHas il Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capian Realisasi Target Renstra PD (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (BPSPP Wilayah III)	%	100		100	100	100	100	100	100
					Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (BPSPP Wilayah IV)	%	100		100	100	100	100	100	100
					Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (BPSPP Wilayah V)	%	100		100	100	100	100	100	100
					Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (BPSPP Wilayah VI)	%	100		100	100	100	100	100	100
					Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (Balai Transportasi)	%	100		100	100	100	100	100	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target KinerjaHas il Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capian Realisasi Target Renstra PD (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	0	1.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
X	X	1	0											
			9											
					Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (Sekretariat)	36	36		36	100	36	36	100	36
					Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (BPSPP Wilayah I)	Laporan	24		24	24	100	12	24	100
					Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (BPSPP Wilayah II)	Laporan	12		12	12	100	12	12	100
					Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (BPSPP Wilayah III)	Laporan	12		12	12	100	12	12	100

[illegible]

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target KinerjaHas il Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (Sekretariat)	Unit	30		16	16	100	35	35	117
X	X	0	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
					Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (Sekretariat)	Unit	286		285	285	100	49	286	100
					Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (BPSPP Wilayah I)	Unit	11		11	11	100	11	11	100
					Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (BPSPP Wilayah II)	Unit	2		2	2	100	2	2	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target KinerjaHas il Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
										Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (BPSPP Wilayah III)	Unit	21			21	21	100	21	21	100
					Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (BPSPP Wilayah IV)	Unit	8			8	8	100	8	8	100
					Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (BPSPP Wilayah V)	Unit	9			9	9	100	9	9	100
					Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (BPSPP Wilayah VI)	Unit	16			16	16	100	13	16	100
					Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (Balai Transportasi)	Unit	7			7	7	100	7	7	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target KinerjaHas il Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capian Realisasi Target Renstra PD (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	0	1.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										
X	X	1	0											
			3		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (Sekretariat)	Dokume n	1		1	1	100	1	1	100
X	X	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
		1												
					Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100		100	100	100	100	100	100
2	1	0		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)										
	5	2												
					Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Angka	0,86		0,81	0,82	101,23	0,84	0,84	97,67

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target KinerjaHas il Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Angka	0,87		0,81	0,83	102,47	0,84	0,84	96,55
					Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Angka	0,87		0,81	0,83	102,47	0,84	0,84	96,55
					Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Angka	0,87		0,81	0,83	102,47	0,84	0,84	96,55
					Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Angka	0,87		0,81	0,82	101,23	0,84	0,84	96,55
					Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Angka	0,87		0,81	0,82	101,23	0,84	0,84	96,55

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target KinerjaHas il Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Angka	0,93		0,97	0,97	100	0,95	0,95	102,15
					Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Angka	0,92		0,97	0,97	100	0,94	0,94	102,17
					Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Angka	0,93		0,98	0,98	100	0,95	0,95	102,15

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target KinerjaHas il Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Angka	0,92		0,97	0,97	100	0,94	0,94	102,17
					Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Angka	0,93		0,98	0,98	100	0,95	0,95	102,15
					Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Angka	0,92		0,97	0,97	100	0,95	0,95	103,26
					Rasio kendaraan laik jalan di Jawa Tengah	Angka	0,988		0,981	0,99	100,92	0,985	0,985	99,70
					Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	Angka	0,59		0,38	0,38	100,00	0,39	0,52	88,14

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target KinerjaHas il Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capian Realisasi Target Renstra PD (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1	0	1.	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan										
5	2	0	7											
					Jumlah Kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji berkala di jawa tengah	Unit	441363		438363	31,92	100,00	34,85	36,48	104,68
					Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Unit	23810		21596	22405	103,75	22676	22676	95,24
					Jumlah total kendaraan yang di ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Unit	1090		989	1261	127,50	1038	1038	95,23
					Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Unit	2457		2229	2241	100,54	2340	2340	95,24
					Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Unit	7425		6734	6889	102,30	7071	7071	95,23

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target KinerjaHas il Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capian Realisasi Target Renstra PD (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Unit	3842		3485	3500	100,43	3659	3659	95,24
					Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Unit	4408		3998	4025	100,68	4198	4198	95,24
2	1 5	0 2	1. 0 5	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi										
					Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Angka	0,67		0,22	0,22	100	0,33	0,44	65,67
					Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Angka	0,63		0,13	0,13	100	0,19	0,38	60,32

[illegible]

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target KinerjaHas il Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capian Realisasi Target Renstra PD (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi penilaian pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Provinsi Jateng	Kabupate n/Kota	19		15	15	100	17	17	89,47
					Jumlah Rekomendasi Hasil Forum LLAJ	Dokume n	12		12	12	100	12	12	100,00
2	1	0	1.	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi										
					Jumlah rekomendasi / persetujuan andalalin di Jalan provinsi	Dokume n	454		329	333	101,22	390	390	85,90
2	1	0	1.	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi										
					Rasio implementasi dokumen RIJLLAJ	Angka	0,53		0,47	0,47	100	0,5	0,5	94,34
2	1	0	1.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B										
					Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Angka	0,75		0,29	0,29	100	0,5	0,5	66,67

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target KinerjaHas il Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capian Realisasi Target Renstra PD (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Rasio Jumlah Tempat Perhentian Bus (TPB) Terpenuhi	Angka	0,79		0,61	0,63	103,28	0,622	0,743	94,05
2	1	0	1.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
	5	2	0 8											
					Rasio angkutan barang yang berijin	Angka	0,35		0,3	0,30	100	0,32	0,32	91,43
2	1	0	1.	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
	5	2	0 9											
					Rasio kawasan perkotaan yang memiliki rencana layanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Angka	0,86		0,71	0,71	100	0,86	0,86	100,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target KinerjaHas il Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capian Realisasi Target Renstra PD (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1	0	1.	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
5	2	1.	1											
					Rasio jaringan trayek pedesaan antar kabupaten kota dalam provinsi yang ditetapkan	Angka	0,13		0,04	0,04	100	0,09	0,09	69,23
2	1	0	1.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
5	2	1.	3											
					Rasio Angkutan Orang Dalam Trayek yang berijin	Angka	0,66		0,55	0,55	100	0,62	0,62	93,94
					Rasio angkutan taksi terpenuhi	Angka	0,45		0,43	0,43	100	0,44	0,44	97,78

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target KinerjaHas il Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	Angka	0,36		0,04	0,04	100,00	0,08	0,24	66,67
2	1	0	1.	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian										
			0 5 1		Rasio realisasi rencana induk perkeretaapian	Angka	0,762		0,341	0,34	99,71	0,36	0,698	91,60
2	1	0		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)										
					Rasio implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	Angka	0,55		0,5	0,50	100,00	0,52	0,52	94,55
					Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Angka	0,22		0,2	0,22	110,00	0,21	0,21	95,45
					Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Angka	0,03		0,01	0,01	100,00	0,02	0,02	66,67
					Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Angka	0,26		0,24	0,26	108,33	0,25	0,25	96,15

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target KinerjaHas il Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capian Realisasi Target Renstra PD (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Angka	0,25		0,23	0,25	108,70	0,24	0,24	96,00
					Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Angka	0,23		0,21	0,21	100,00	0,22	0,22	95,65
					Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Angka	0,19		0,17	0,17	100,00	0,18	0,18	94,74
					Rasio konektivitas perkotaan	Angka	0,532		0,481	0,51	106,03	0,483	0,519	97,56
					Rasio pemanfaatan terminal	Angka	0,24		0,218	0,22	100,92	0,229	0,229	95,42
					Rasio trayek angkutan jalan	Angka	0,58		0,51	0,51	100	0,56	0,56	96,55
					Rasio konektivitas transportasi laut dan ASDP	Angka	0,45		0,31	0,33	106,45	0,378	0,38	84,44
					Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum	%	69,36		65,38	65,45	100,11	67,34	67,34	97,09
					Persentase perpindahan moda angkutan umum	%	55		51,72	52,22	100,97	53	53	96,36

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target KinerjaHas il Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capian Realisasi Target Renstra PD (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1	0	1.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
5	2	0	8											
					Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani	Orang	28659581		27014404	34.663.259	128,31	27824836	27824836	97,09
2	1	0	1.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
5	2	0	8											
					Jumlah penumpang terlayani angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan	Orang	7134867		6810676	8.645.157	126,94	6944462	6944462	97,33

Sumber : Hasil Evaluasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Keterangan :

1. Kolom (2), (3), dan (4) diisi dengan program, kegiatan beserta indikator kinerja dan satuannya sesuai dengan Renja PD Tahun 2024
2. Kolom (5) diisi target kinerja akhir program dan kegiatan Tahun 2024 sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah (yang telah disesuaikan)
3. Kolom (6) diisi target kinerja program dan kegiatan sesuai Renja PD Tahun 2024;
4. Kolom (7) diisi dengan realisasi kinerja program dan kegiatan sesuai Renja PD Tahun 2024;

Dari rincian Tabel 2.1 tingkat capaian perkiraan realisasi indikator program Tahun 2024 terhadap target akhir Renstra PD Tahun 2024-2026 dapat diketahui bahwa proyeksi capaian indikator program semuanya melebihi target yang ditetapkan dari total 38 program sebanyak 23 program memenuhi target sedangkan sebanyak 15 program melebihi dari target yang ditetapkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Tahun 2024 kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tujuan Memantapkan Sistem Transportasi Yang Berorientasi Pada Konektivitas Antar Wilayah Pengembangan Di Provinsi Jawa Tengah serta dukungan terhadap sistem distribusi logistik Provinsi Jawa Tengah dengan indikator Persentase pelayanan Transportasi antar Kawasan pengembangan di Provinsi Jawa tengah sebesar 43,61% dari target 39,38% sehingga tingkat capainnya 110,74%. Berikut rincian capaian masing – masing sasaran :

1. Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi dengan indikator Persentase layanan jaringan distribusi transportasi sebesar 54,98% dari target 47,74% sehingga tingkat capainnya 115,17%;
2. Meningkatnya ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi dengan indikator Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi sebesar 29,19% dari target 23,73% sehingga tingkat capainnya 123,01%;
3. Meningkatnya Persentase perpindahan moda angkutan umum 46,67% dari target 46,67% sehingga tingkat capainnya 100,00%.

Adapun rincian capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah pada level program dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IK K	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2024	Proyeksi 2025	Catatan analisis
				2024	2025			
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(9)	(10)	(12)
1	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A)			100	100	100	100	Indikator seragam seluruh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Indikator masih digunakan dalam perencanaan Tahun 2024-2026)
2	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B)			100	100	100	100	Indikator seragam seluruh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Indikator masih digunakan dalam perencanaan Tahun 2024-2026)
3	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A)			100	100	100	100	Indikator seragam seluruh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Indikator masih digunakan dalam perencanaan Tahun 2024-2026)
4	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A)			100	100	100	100	Indikator seragam seluruh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Indikator masih digunakan dalam perencanaan Tahun 2024-2026)
5	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A)			100	100	100	100	Indikator seragam seluruh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Indikator masih digunakan dalam perencanaan Tahun 2024-2026)
6	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B)			100	100	100	100	Indikator seragam seluruh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Indikator masih digunakan dalam perencanaan Tahun 2024-2026)

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IK K	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2024	Proyeksi 2025	Catatan analisis
				2024	2025			
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(9)	(10)	(12)
7	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)			100	100	100	100	Indikator seragam seluruh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Indikator masih digunakan dalam perencanaan Tahun 2024-2026)
8	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Sekretariat)			100	100	100	100	Indikator seragam seluruh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Indikator masih digunakan dalam perencanaan Tahun 2024-2026)
9	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah			100	100	100	100	Indikator seragam seluruh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Indikator masih digunakan dalam perencanaan Tahun 2024-2026)
10	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A			0,81	0,84	0,83	0,84	Proyeksi Realisasi Tahun 2025 Target Renstra Murni Dapat Tercapai
11	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B			0,81	0,84	0,83	0,84	Proyeksi Realisasi Tahun 2025 Target Renstra Murni Dapat Tercapai
12	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A			0,81	0,84	0,82	0,84	Proyeksi Realisasi Tahun 2025 Target Renstra Murni Dapat Tercapai
13	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A			0,81	0,84	0,83	0,84	Proyeksi Realisasi Tahun 2025 Target Renstra Murni Dapat Tercapai
14	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A			0,81	0,84	0,82	0,84	Proyeksi Realisasi Tahun 2025 Target Renstra Murni Dapat Tercapai
15	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B			0,81	0,84	0,82	0,84	Proyeksi Realisasi Tahun 2025 Target Renstra Murni Dapat Tercapai

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IK K	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2024	Proyeksi 2025	Catatan analisis
				2024	2025			
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(9)	(10)	(12)
16	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A			0,98	0,95	0,98	0,95	Proyeksi Realisasi Tahun 2025 Target Renstra Murni Dapat Tercapai
17	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B			0,97	0,94	0,97	0,94	Proyeksi Realisasi Tahun 2025 Target Renstra Murni Dapat Tercapai
18	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A			0,97	0,95	0,97	0,95	Proyeksi Realisasi Tahun 2025 Target Renstra Murni Dapat Tercapai
19	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A			0,97	0,94	0,97	0,94	Proyeksi Realisasi Tahun 2025 Target Renstra Murni Dapat Tercapai
20	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A			0,97	0,95	0,97	0,95	Proyeksi Realisasi Tahun 2025 Target Renstra Murni Dapat Tercapai
21	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B			0,98	0,95	0,98	0,95	Proyeksi Realisasi Tahun 2025 Target Renstra Murni Dapat Tercapai
22	Rasio kendaraan laik jalan di Jawa Tengah			0,981	0,985	0,99	0,985	Proyeksi Realisasi Tahun 2025 Target Renstra Murni Dapat Tercapai
23	Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan			0,47	0,52	0,38	0,39	Proyeksi Realisasi Tahun 2025 Tidak Dapat Tercapai Dikarenakan Ada Penyesuaian Kebutuhan Yaitu Rambu Lalu Lintas Dari 400 Unit Menjadi 100 Unit, RPPJ Dari 30 Menjadi

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IK K	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2024	Proyeksi 2025	Catatan analisis
				2024	2025			
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(9)	(10)	(12)
								10 Unit, WL Dari 16 Menjadi 0, APILL Dari 2 Menjadi 0, dan LPJU Dari 216 Menjadi 142.
24	Rasio pemenuhan fasilitas keselamatan penyeberangan sungai			0,2	0,4	0,20	0,4	Proyeksi Realisasi Tahun 2024 Target Renstra Murni Dapat Tercapai
25	Rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan			0,04	0,24	0,04	0,08	Proyeksi Realisasi Tahun 2025 Tidak Dapat Tercapai Dikarenakan Ada Penyesuaian loksdi penanganan yang sebelumnya Kab. Brebes (JPL 263), Kab. Grobogan (JPL 39, 27, 81, 72, 54), Kab. Blora (JPL 99), Kab. Sragen (JPL 123, 138, 146, 72), Kab. Sukoharjo (JPL 9)di sesuaikan menjadi Kab. Cilacap JPL 2, JPL 464 B, JPL 446 H
26	Rasio implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis			0,5	0,52	0,50	0,52	Proyeksi Realisasi Tahun 2024 Target Renstra Murni Dapat Tercapai
27	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A			0,2	0,21	0,22	0,21	Proyeksi Realisasi Tahun 2024 Target Renstra Murni Dapat Tercapai
28	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B			0,01	0,02	0,01	0,02	Proyeksi Realisasi Tahun 2024 Target Renstra Murni Dapat Tercapai
29	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A			0,24	0,25	0,26	0,25	Proyeksi Realisasi Tahun 2024 Target Renstra Murni Dapat Tercapai
30	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A			0,23	0,24	0,25	0,24	Proyeksi Realisasi Tahun 2024 Target Renstra Murni Dapat Tercapai
31	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A			0,21	0,22	0,21	0,22	Proyeksi Realisasi Tahun 2024 Target Renstra Murni Dapat Tercapai
32	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B			0,17	0,18	0,17	0,18	Proyeksi Realisasi Tahun 2024 Target Renstra Murni Dapat Tercapai
33	Rasio konektivitas perkotaan			0,494	0,519	0,51	0,483	Proyeksi Realisasi Tahun 2024 Tidak Dapat Tercapai Dikarenakan Ada Penyesuaian Kebutuhan Yaitu Jumlah Shelter 28 Shelter Menjadi 6 Shelter

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IK K	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2024	Proyeksi 2025	Catatan analisis
				2024	2025			
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(9)	(10)	(12)
34	Rasio pemanfaatan terminal			0,218	0,229	0,22	0,229	Proyeksi Realisasi Tahun 2024 Target Renstra Murni Dapat Tercapai
35	Rasio trayek angkutan jalan			0,51	0,56	0,51	0,56	Proyeksi Realisasi Tahun 2024 Target Renstra Murni Dapat Tercapai
36	Rasio konektivitas transportasi laut dan ASDP			0,31	0,38	0,33	0,38	Proyeksi Realisasi Tahun 2024 Target Renstra Murni Dapat Tercapai
37	Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum			65,38	67,34	65,45	67,34	Proyeksi Realisasi Tahun 2024 Target Renstra Murni Dapat Tercapai
38	Persentase perpindahan moda angkutan umum			51	53	52,22	53	Proyeksi Realisasi Tahun 2024 Melebihi Target Dikarenakan Terdapat Penambahan 3 Unit Armada BRT Trans Jateng Masing-Masing 2 Unit Untuk Koridor Kendal dan 1 Unit Untuk Koridor Wonogiri yang Beroperasi Pada 1 Juli 2024

Sumber : Hasil Analisis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Keterangan :

- Kolom (2) diisi indikator program;
- Kolom (5) dan (6) diisi target kinerja program sesuai dengan Renstra PD (yang telah disesuaikan)
- Kolom (7) diisi realisasi kinerja program tahun 2024;
- Kolom (8) diisi perkiraan capaian kinerja program tahun 2023;
- Kolom (9) diisi catatan analisis dari kinerja indikator program tersebut.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Perhubungan yang memiliki peran penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan serta pembangunan di segala sektor yang diselenggarakan secara terpadu melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah di Jawa Tengah.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah memiliki kewenangan :

- a) Perumusan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran.
- b) Pelaksanaan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran.
- c) Pelaksanaan dan evaluasi pelaporan Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran.
- d) Pelaksanaan Fungsi lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

1. Peran Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Dinas Perhubungan memiliki peran strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah, sejalan dengan target pembangunan daerah yang menjadikan Jawa Tengah sebagai penopang utama sektor pangan, industri, dan jasa. Upaya memperkuat konektivitas antarwilayah terus dilakukan dengan berfokus pada pemerataan pembangunan di 10 wilayah pengembangan yang ada di Jawa Tengah. Selain itu, perhatian juga diarahkan pada peningkatan konektivitas antara wilayah utara dan selatan Jawa Tengah, serta mendukung pelaksanaan 136 program prioritas Gubernur Jawa Tengah..

Dalam rangka mencapai target kinerja pembangunan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah secara berkelanjutan melakukan koordinasi dan sinergitas program dengan berbagai pihak, baik antar perangkat daerah di tingkat provinsi, dengan pemerintah kabupaten/kota, maupun dengan kementerian/lembaga di tingkat pusat.

- a) Koordinasi dan Sinergitas Program Antar Perangkat Daerah Provinsi
 1. Optimalisasi peran Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dalam mendukung peningkatan keselamatan pada ruas jalan provinsi.

2. Koordinasi dan konsultasi dengan Biro Perekonomian, Biro Hukum, dan BPKAD terkait pembentukan Pejabat Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Trans Jateng.
 3. Sinkronisasi program dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 4. Koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Angkutan Lebaran, Natal, dan Tahun Baru, guna memastikan kelancaran arus transportasi masyarakat.
- b) Koordinasi dan Sinergitas Program dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
1. Peningkatan layanan angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) sebagai dukungan terhadap sektor pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenagakerjaan, UMKM, pariwisata, perindustrian, dan perdagangan. Upaya ini dilakukan melalui penataan kembali (re-routing) trayek angkutan perkotaan dan pedesaan sebagai bagian dari integrasi pengembangan layanan angkutan umum aglomerasi.
 2. Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait penyediaan infrastruktur penunjang angkutan aglomerasi massal Trans Jateng, baik melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) maupun dukungan APBD kabupaten/kota untuk pembangunan halte dan fasilitas pendukung lainnya.
 3. Peningkatan simpul transportasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, seperti Terminal Tipe C, guna mendukung integrasi jaringan transportasi antarmoda.
- c) Koordinasi dan Sinergitas Program dengan Kementerian/Lembaga di Tingkat Pusat
- Koordinasi dilakukan untuk mensinkronkan kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dengan program nasional, terutama dalam mendukung program prioritas Gubernur Jawa Tengah yang sebagian merupakan kewenangan pemerintah pusat, antara lain:
1. Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait penanganan infrastruktur transportasi kewenangan pusat, seperti reaktivasi jalur kereta api nonaktif di wilayah Jawa Tengah;
 2. Upaya peningkatan status Bandara Internasional Ahmad Yani dan Bandara Internasional Adi Soemarmo, yang sebelumnya diturunkan menjadi bandara domestik. Melalui koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, kedua

bandara tersebut kembali ditetapkan sebagai bandara internasional sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penetapan Bandar Udara Internasional di Indonesia;

3. Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Pelindo, dan pihak terkait lainnya dalam rangka optimalisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang sebagai generator ekonomi Jawa Tengah, serta pengembangan Pelabuhan Kendal dan Pelabuhan Batang untuk mendukung pertumbuhan industri di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan Kawasan Industri Kendal (KIK) di wilayah pantai utara Jawa.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagai berikut :
 - a. Bidang Lalu Lintas Jalan
 - 1) Terdapat banyak aduan masyarakat terkait permohonan perlengkapan jalan di ruas jalan provinsi;
 - 2) Masih kurangnya kendaraan laik jalan di Jawa Tengah;Hambatan :
 - 1) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas belum optimal;
 - 2) Perlunya rekomendasi hasil Forum LLAJ;
 - 3) Perlunya rekomendasi/persetujuan Andalalin di Jalan Provinsi;
 - 4) Masih banyaknya kebutuhan perlengkapan jalan;
 - 5) Masalah teknis dalam pemasangan LPJU (keterbatasan bahu jalan dan ketersediaan jaringan listrik tegangan rendah)
 - 6) Masih kurangnya Jumlah Kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji berkala di Jawa Tengah;
 - 7) Masih diperlukannya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Kendaraan karoseri yang sesuai uji tipe yang ditetapkan);
 - 8) Masih rendahnya Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi (sopir dan pelajar);
 - b. Bidang Angkutan Jalan
 - 1) Masih kurangnya konektivitas angkutan jalan.
 - 2) Penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum masih rendah.Hambatan :
 - 1) Masih rendahnya angkutan barang berijin;
 - 2) Masih kurangnya pemenuhan Angkutan Orang Dalam Trayek;
 - 3) Banyaknya Angkutan Dalam Trayek yang beroperasi tidak sesuai izin trayeknya;

- 4) Pengendalian dan pengawasan Tarif dan Load Factor kelas ekonomi belum optimal;
 - 5) Belum ada Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi;
 - 6) Belum semua Kawasan perkotaan yang memiliki rencana layanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
 - 7) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan sesuai kewenangan belum optimal;
 - 8) Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Kewenangan Provinsi Belum optimal.
 - 9) Penumpang angkutan umum yang terlayani pada periode arus lalu lintas tinggi masih rendah;
 - 10) Pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi belum optimal.
- c. Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian
- 1) Belum optimalnya Pemanfaatan Terminal;
 - 2) Masih kurangnya implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis;
 - 3) Belum semua perlintasan sebidang terpenuhi fasilitas sesuai dengan standar teknis perlintasan sebidang.
- Hambatan :
- 1) Tidak semua terminal Tipe B dalam kondisi baik;
 - 2) Tidak semua Terminal Tipe B mempunyai Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B;
 - 3) Pembangunan Gedung Terminal belum menyeluruh;
 - 4) Masih diperlukannya Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal;
 - 5) Belum semua Terminal Penumpang Tipe B asetnya sepenuhnya milik Pemerintah Provinsi;
 - 6) Masih kurangnya Implementasi Dokumen RIJLLAJ;
 - 7) Masih diperlukannya pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi;
 - 8) Terdapat kabupaten yang hanya memiliki terminal tipe C.
 - 9) Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi belum direview dan ditetapkan;
 - 10) Masih banyaknya perlintasan sebidang Kereta Api yang pemasangan fasilitas keselamatan belum sesuai standar.
- d. Bidang Pelayaran
- 1) Belum optimalnya Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP;
 - 2) Masih rendahnya Jumlah lintas Penyeberangan Sungai yang terpenuhi fasilitas keselamatan.
- Hambatan :

- 1) Belum semua trayek ASDP melengkapi dokumen sebagai persyaratan ijin trayek ASDP berdasarkan tingkatannya;
 - 2) Belum terpenuhinya Fasilitas Pelabuhan SDP ;
 - 3) Masih rendahnya perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin;
 - 4) Masih rendahnya *Berth Occupancy Ratio*;
 - 5) Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Transportasi Laut dan ASDP belum optimal;
 - 6) Proses P3D Pelabuhan Pengumpan Regional dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum selesai;
 - 7) Kurangnya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia.
- e. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Sejateng
- 1) Masih rendahnya rekomendasi *ramp check* yang ditindak lanjuti;
 - 2) DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani belum optimal menurunkan kecelakaan.
 - 3) Masih rendahnya keterisian Bus.
- Hambatan :
- 1) Masih rendahnya Jumlah Kendaraan yang dilakukan *ramp check*;
 - 2) Masih diperlukannya pengawasan terhadap pelaksanaan (WASTIB) untuk meningkatkan jumlah perusahaan angkutan umum yang menerapkan manajemen keselamatan (kelengkapan administrasi dan kelaikan jalan) terhadap kendaraan yang dimiliki.
 - 3) Kurangnya rehabilitasi DRK;
 - 4) Masih perlunya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi.
 - 5) Belum semua Terminal Penumpang Tipe B asetnya sepenuhnya milik Pemerintah Provinsi;
 - 6) Kurangnya pemeliharaan terminal Tipe B
- f. Balai Transportasi Jawa Tengah
- 1) Perpindahan moda angkutan umum belum optimal;
 - 2) Belum optimalnya Konektivitas Perkotaan.
- Hambatan :
- 1) Penumpang terlayani angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan belum optimal;
 - 2) Masih diperlukannya penyediaan bus Trans Jateng;
 - 3) Kurangnya Jumlah Tempat Perhentian Bus (TPB).
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*)

- a. Sasaran pembangunan daerah pemantapan sistem transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar Kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah tercapai;
- b. Program kegiatan yang ada dalam mendukung SDGs :
 - 1) Goal 9 : “Membangun insfratraktur tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi dengan target mengembangkan insfratsruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk insfratraktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembanungan ekonomi dan pengembangan wilayah terwujud dengan indikator :

No	Indikator SDGs Provinsi	Tahun 2024	
		Target	Realisasi
a)	Panjang jalur kereta api di Jawa Tengah	1034,030 Km	1053,765 Km
b)	Jumlah pelabuhan strategis di Jawa Tengah	PM	14 Pelabuhan

- a) Sampai dengan Tahun 2024 terealisasi 1.053,765 km/sp terdiri dari 878,155 km/sp jalur eksisting dan 175,61 km/sp jalur rencana yang teralisasi (Jalur ganda lintas selatan Purwokerto-Kutoarjo 103 km/sp, Solo-Kedungbanteng 44 km/sp, KA Bandara Adi Sumarmo 13,5 km/sp, Semarang-Demak-Rembang 0 km/sp, Purwokerto-Wonosobo 0 km/sp, Kedungjati-Tuntang-ambarawa-Magelang 5,11 km/sp, Rendegan-Sikampuh 10 km/sp dan KSPN Borobudur 0 km/sp);
- b) Jumlah Pelabuhan strategis di Provinsi Jawa Tengah 11 pelabuhan : Pelabuhan Tanjung Emas di Kota Semarang (pelabuhan utama), Pelabuhan Tanjung Intan di Kabupaten Cilacap (pelabuhan pengumpul), Pelabuhan Tegal (pelabuhan pengumpul), Pelabuhan Batang (pelabuhan pengumpan regional), Pelabuhan Kendal (pelabuhan pengumpan regional), Pelabuhan Jepara (pelabuhan pengumpan regional), Pelabuhan Karimun Jawa (pelabuhan pengumpan regional), Pelabuhan Legon Bajak di Karimunjawa (pelabuhan pengumpan regional), Pelabuhan Juwana (pelabuhan pengumpan regional), Pelabuhan Tasik Agung di Kabupaten Rembang (pelabuhan pengumpan regional), Pelabuhan Sluke di Kabupaten Rembang (pelabuhan pengumpan regional, dan 3 Pelabuhan Pengumpan Lokal yaitu : Pelabuhan Brebes, Pelabuhan Pemalang serta Pelabuhan Pekalongan.

2) Goal 11 : “Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif aman tangguh dan berkelanjutan terwujud dengan indikator :

No	Indikator SDGs Provinsi	Tahun 2024	
		Target	Realisasi
a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	PM	16,55%

a) Persentase pengguna moda transportasi pada Tahun 2024 di Kota Magelang 8,35%, Kota Surakarta 3,40%, Kota Salatiga 0,41%, Kota Semarang 0,66%, Kota Pekalongan 3,81% dan Kota Tegal 6,51%. Sedangkan Persentase pengguna Angkutan Umum Trans Jateng sebesar 4,08%.

4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

- a. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah:
- 1. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor masih tinggi terutama di wilayah perkotaan, sehingga meningkatkan kemacetan dan beban infrastruktur jalan;
 - 2. Rendahnya disiplin berlalu lintas serta masih terbatasnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap keselamatan transportasi;
 - 3. Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berbasis digital semakin meningkat;
 - 4. Belum optimalnya integrasi antar moda transportasi serta keterpaduan sistem transportasi di wilayah aglomerasi;
 - 5. Keterbatasan kapasitas serta belum optimalnya modernisasi sarana dan prasarana terminal sebagai simpul transportasi darat;
 - 6. Koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah (dengan Kementerian/Lembaga, POLRI, BUMN, dan Pemerintah Kabupaten/Kota) masih perlu ditingkatkan.
 - 7. Keterbatasan pendanaan sehingga diperlukan skema pembiayaan alternatif (CSR) dalam mendukung pembangunan dan pengelolaan transportasi berkelanjutan;
- b. Peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah:
- 1. Adanya kebijakan nasional terkait transformasi digital pelayanan publik dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mendorong inovasi layanan transportasi;

2. Pengembangan kawasan aglomerasi perkotaan, kawasan industri, dan kawasan pariwisata nasional yang meningkatkan kebutuhan akan layanan transportasi terintegrasi;
 3. Dukungan kebijakan pusat melalui Perpres Nomor 79 Tahun 2019 dan Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan infrastruktur strategis (bandara, pelabuhan, kereta api, terminal, dan jalan tol);
 4. Adanya dua bandar udara internasional di Jawa Tengah, yaitu Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani di Semarang dan Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo di Surakarta, sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2021 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional, yang membuka peluang peningkatan konektivitas antarwilayah, penguatan logistik udara, serta pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi daerah;
 5. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan angkutan umum;
 6. Adanya pengembangan dan perluasan layanan angkutan massal perkotaan (BRT/Trans Jateng) serta potensi pengembangan layanan feeder yang diinisiasi kabupaten/kota ke daerah penyangga;
 7. Potensi kolaborasi dengan sektor swasta dan UMKM dalam pengelolaan area layanan transportasi (terminal, dan fasilitas pendukung lainnya);
 8. Potensi pemanfaatan teknologi informasi dan data transportasi (Public Transport Information System/PTIS) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

Isu Strategis	Isu penting yang perlu ditindaklanjuti	Implementasi Riil
Konektivitas antar wilayah	a. Penyediaan prasarana transportasi dan fasilitas publik yang ramah bagi seluruh kelompok masyarakat khususnya kelompok rentan; b. Peningkatan jaringan trayek angkutan jalan; c. Peningkatan implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis;	a. Penyediaan layanan angkutan aglomerasi perkotaan Trans Jateng yang ramah bagi kelompok rentan melalui penyediaan ruang khusus di dalam bus, fasilitas ruang tunggu yang aksesibel, serta pemberian tarif khusus sebesar Rp1.000 bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia. b. Peningkatan jaringan trayek angkutan jalan melalui

Isu Strategis	Isu penting yang perlu ditindaklanjuti	Implementasi Riil
	d. Peningkatan Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP.	fasilitasi perizinan dan perumusan kebijakan (Masterplan Jekuti, DED, ATP/WTP Gelangmanggung, DED Petanglong, Trans Jateng Excecutif FS & ATP/WTP, Review Masterplan Subosukowonosraten) serta sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang/barang yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; c. Peningkatan kunjungan Bus dan penumpang di terminal tipe B melalui peningkatan terminal tipe B kondisi baik dan sesuai Standart dengan pembangunan Terminal Tipe B Kutoarjo, revitalisasi Terminal Tipe B Purbalingga serta pemeliharaan terminal tipe B di Jawa Tengah; d. Peningkatan Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP dengan pembangunan dermaga sungai dan pemenuhan Fasilitas Pelayanan Dermaga sungai di Sungai gangsa kabupaten Brebes serta fasilitasi perizinan usaha angkutan laut dan pelabuhan regional.
Simpul Transportasi	Peningkatan pemanfaatan terminal tipe B dan keterisian bus di terminal tipe B melalui pembangunan, pengembangan sarana dan prasarana serta pemeliharaan terminal tipe B untuk mendukung Kawasan strategis utamanya pada PKN dan PKW promosi, konektivitas Jalur Tengah Jawa Tengah serta mendukung operasional trans Jateng;	a. Peningkatan implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis utamanya terminal tipe B dan Jaringan Trayek aglomerasi perkotaan dan pedesaan sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada, serta infrastruktur strategis lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
Optimalisasi Ruang pergerakan	Meningkatkan Perpindahan moda ke angkutan umum	a. Penyediaan angkutan massal aglomerasi perkotaan (lanjutan

Isu Strategis	Isu penting yang perlu ditindaklanjuti	Implementasi Riil
		operasional trans jateng pada wilayah pengembangan Kedungsepur, Barlingmascakeb, Purwomanggung dan Subosukawonosraten) sebanyak 7 koridor dengan 115 bus.
Peningkatan Keselamatan Transportasi	a. Meningkatkan ruas jalan yang dilengkapi dengan kebutuhan minimal perlengkapan jalan utamanya antar Kawasan penumpu pangan yang ada di Jawa Tengah. b. Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan serta pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan pada Ruas Jalan Provinsi; c. Meningkatkan kendaraan laik jalan di Jawa Tengah; d. Pemenuhan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang KA pada Ruas Jalan Provinsi;	a. Peningkatan ruas jalan yang dilengkapi dengan kebutuhan minimal perlengkapan jalan utamanya mendukung konektifitas jalur pantura-pansela bagian timur serta akses logistik; b. Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan serta pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan pada Ruas Jalan Provinsi; c. Peningkatan kendaraan laik jalan di Jawa Tengah melalui Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, Palaksanaan Ramp Check serta peningkatan pemahaman keselamatan kepada pengemudi angkutan umum dan pelajar; d. Pemenuhan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang KA pada Ruas Jalan Provinsi.

Sumber : Hasil Analisis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu dilakukan dengan melakukan proses-proses sebagai berikut:

1. Identifikasi program dan/atau kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD.

Proses ini dilakukan agar program dan/atau kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD dapat teridentifikasi. Program dan kegiatan prioritas diidentifikasi dan diarahkan sebagai upaya pencapaian kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029. Hasil Identifikasi rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan transportasi dan keselamatan jalan yang mencakup beberapa kegiatan strategis. Kegiatan pertama adalah peningkatan pelayanan angkutan aglomerasi melalui lanjutan operasional tujuh koridor lama, yaitu Koridor Semarang-Bawen, Semarang-Kendal, Purwokerto-Purbalingga, Kutoarjo-Borobudur, Solo-Sumberlawang via Sangiran, Semarang-Gubug, serta Solo-Sukoharjo-Wonogiri. Selanjutnya, dilakukan peningkatan terminal angkutan jalan yang meliputi pembangunan Terminal Penumpang Tipe B Kutoarjo Tahap VI serta peningkatan Terminal Penumpang Tipe B Purbalingga di Kabupaten Purbalingga.

Selain itu, program ini juga mencakup kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di ruas jalan provinsi berupa pemenuhan fasilitas keselamatan jalan, khususnya melalui pengadaan dan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU). Upaya ini difokuskan untuk mendukung konektivitas dan aksesibilitas jalur distribusi pangan di wilayah Jawa Tengah sebagai tindak lanjut dalam mendukung program tematik pembangunan Jawa Tengah Tahun 2026, yaitu “Meneguhkan Posisi Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional.” Dalam rangka itu, dilakukan pemasangan LPJU sebanyak 200 unit pada ruas Jalan Sidareja-Cukangleuleus, Menganti-Kesugihan, Sragen-Batujamus/Batas Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Karanganyar-Gemolong, dan Purwodadi-Wirosari, serta peremajaan dan penggantian LPJU yang kinerjanya telah menurun sebanyak 283 titik yang tersebar di enam wilayah Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan (BPSPP).

Selanjutnya, kegiatan juga diarahkan pada pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada jaringan jalan provinsi melalui peningkatan peran Forum Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan (LLAJ) dalam implementasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ), sehingga diharapkan dapat meningkatkan keselamatan, kelancaran, dan efisiensi sistem transportasi di Jawa Tengah.

b. Pengelolaan Pelayaran

Program ini diarahkan terutama pada kegiatan pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, salah satunya melalui pembangunan Dermaga Desa Kajongan (Muarareja) Kota Tegal.

Selain itu, dilakukan kegiatan pembangunan serta penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional berupa fasilitasi dan koordinasi untuk optimalisasi fungsi pelabuhan pengumpan regional, khususnya Pelabuhan Kendal dan Pelabuhan Batang yang berperan penting dalam mendukung aktivitas industri di Kawasan Industri Kendal (KIK) dan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Pelabuhan Kendal saat ini didorong untuk dikembangkan oleh investor swasta, yaitu PT Samudra Pelabuhan Indonesia (SPI). PT SPI tengah melakukan kegiatan canvassing terhadap potensi bangkitan dan tarikan kargo dari para tenant di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar penyusunan forecasting volume kargo guna menentukan kelayakan investasi. Sebagai bagian dari tahapan tersebut, PT SPI telah menyelesaikan studi finansial pada tahun 2024. Sementara itu, di Kabupaten Batang, pembangunan Terminal Multipurpose Batang Tahap I telah mencapai progres sebesar 95,42 persen hingga bulan Juni 2025.

Selain kegiatan pembangunan pelabuhan, program ini juga mencakup penerbitan izin usaha jasa terkait, meliputi jasa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa lainnya yang berkaitan dengan angkutan laut, tally mandiri, serta jasa depo peti kemas. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui penerbitan rekomendasi teknis izin baru maupun perubahan bagi perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan perairan, guna mendukung kelancaran dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan kepelabuhanan di Jawa Tengah.

c. Pengelolaan Perkeretaapian

Program ini diarahkan terutama pada kegiatan penetapan rencana induk perkeretaapian yang diwujudkan melalui pemasangan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang kereta api pada beberapa lokasi di Kabupaten Cilacap (JPL 479, JPL 2, JPL 464B, JPL 441, JPL 446, dan JPL 446H). Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi standar keselamatan perlintasan kereta api sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan. Selain itu, program ini juga mencakup kegiatan fasilitasi implementasi kebijakan pemerintah pusat terkait pengembangan jaringan perkeretaapian di Jawa Tengah, khususnya dalam mendukung rencana reaktivasi jaringan jalur rel kereta api nonaktif agar dapat kembali berfungsi sebagai bagian dari sistem transportasi yang terpadu dan berkelanjutan di wilayah

Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan :

Pada rancangan awal RKPD terdapat 4 Program dan 38 Kegiatan dibandingkan dengan hasil analisis kebutuhan, terdapat perubahan menurut daftar skala prioritas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah .Perbandingan diantaranya:

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Rumusan kegiatan prioritas yang sudah sesuai dengan kebutuhan namun terdapat penyesuaian anggaran diantaranya, kegiatan peningkatan pelayanan angkutan aglomerasi berupa lanjutan operasional 7 koridor lama (Koridor Semarang-Bawen, Semarang-Kendal, Purwokerto-Purbalingga, Kutoarjo-Borobudur, Solo-Sumber Lawang Via Sangiran; Semarang-Gubug dan Solo-Sukoharjo-Wonogiri) dengan 115 unit Bus; Kegiatan peningkatan terminal angkutan jalan berupa rehabilitasi dan pembangunan terminal tipe B sebanyak 2 terminal, yaitu Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B Kutoarjo Tahap VI serta Peningkatan Terminal Penumpang Tipe B Purbalingga, kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi berupa pemenuhan fasilitas keselamatan jalan utamanya dengan pengadaan dan pemasangan LPJU di utamanya mendukung konektivitas jalur distribusi pangan di wilayah Jawa Tengah yaitu dengan jumlah 250 unit (Jalan Sidareja-Cukangleuleus 90 Unit, Menganti-Kesugihan 15 Unit, Sragen-Batujamus/Batas Kabupaten Karanganyar 30 Unit,

Kabupaten Karanganyar–Gemolong 35 Unit, dan Purwodadi–Wirosari 80 Unit) serta penggantian sparepart sebanyak 63 Unit ; kegiatan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi berupa peningkatan peran Forum LLAJ dalam implementasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ).

b. Pengelolaan Pelayaran

Rumusan kegiatan prioritas yang sudah sesuai dengan kebutuhan namun terdapat penyesuaian anggaran diantaranya kegiatan pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi salah satunya melalui pembangunan Dermaga Desa Kajongan (Muarareja) Kota Tegal.; kegiatan pembangunan serta penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional berupa fasilitasi dan koordinasi untuk optimalisasi fungsi pelabuhan pengumpan regional, khususnya Pelabuhan Kendal dan Pelabuhan Batang yang berperan penting dalam mendukung aktivitas industri di Kawasan Industri Kendal (KIK) dan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB); kegiatan penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas berupa penerbitan rekomendasi teknis ijin baru/perubahan perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan perairan.

c. Pengelolaan Perkeretaapian

Rumusan kegiatan prioritas sudah sesuai dengan kebutuhan namun terdapat penyesuaian anggaran diantaranya pada kegiatan penetapan rencana induk perkeretaapian berupa pemasangan fasilitas keselamatan perlintasan kereta api di perlintasan sebidang pemasangan sesuai dengan Pedoman teknis pengendalian lalu lintas di ruas jalan pada lokasi potensi kecelakaan di perlintasan sebidang dengan kereta api, terdapat penyesuaian terkait rencana pengadaan dan pemasangan warning light pada JPL 479 Cilacap, di mana kegiatan tersebut tidak lagi dilaksanakan. Selain itu terdapat fasilitasi implementasi kebijakan pusat terkait pengembangan jaringan perkeretaapian di Jawa Tengah, utamanya rencana reaktivasi jaringan jalan rel kereta api non aktif

Tabel 2.3 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(3)	(4)	(10)	(11)
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				66.408.998.000	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				68.792.811.000
	Kota Semarang,Pati, Surakarta, Kota Magelang, Banyumas, Kota Pekalongan, Grobogan, Blora, Demak, Batang, Pekalongan, Temanggung, Kab.Magelang, Boyolali, Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Purworejo, Sukoharjo, Banjarnegara, Purbalingga, Brebes	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Sekretariat) **	100	64.590.971.000		Kota Semarang,Pati, Surakarta, Kota Magelang, Banyumas, Kota Pekalongan, Grobogan, Blora, Demak, Batang, Pekalongan, Temanggung, Kab.Magelang, Boyolali, Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Purworejo, Sukoharjo, Banjarnegara, Purbalingga, Brebes	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Sekretariat) **	100	67.243.976.000
	Kota Semarang	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah **	100	416.600.000		Kota Semarang	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah **	100	245.683.000

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(3)	(4)	(10)	(11)
	Kota Surakarta	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	100	259.600.000		Kota Surakarta	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	100	247.100.000
	Kabupaten Pati	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	100	136.112.000		Kabupaten Pati	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	100	123.612.000
	Kota Semarang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat	100	170.340.000		Kota Semarang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana	100	157.840.000

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(3)	(4)	(10)	(11)
		daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A					dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A		
	Kota Magelang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	100	177.200.000		Kota Magelang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	100	164.700.000
	Kota Pekalongan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	100	183.900.000		Kota Pekalongan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	100	171.400.000

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(3)	(4)	(10)	(11)
	Kabupaten Banyumas	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	100	162.275.000		Kabupaten Banyumas	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	100	141.500.000
	Kota Semarang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	100	312.000.000		Kota Semarang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	100	297.000.000
PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				139.492.485.000	PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				136.438.696.000

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(3)	(4)	(10)	(11)
	Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonigiri, Sragen, Klaten	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	81,84	404.650.000		Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonigiri, Sragen, Klaten	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	81,84	358.208.000
	Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	86,20	115.950.000		Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	86,2	94.520.000
	Kendal, Demak, Semarang, Kota Semarang, Grobogan	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	57,12	210.625.000		Kendal, Demak, Semarang, Kota Semarang, Grobogan	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	57,12	181.700.000

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(3)	(4)	(10)	(11)
	Magelang, Temanggung, Purworejo, Wonosobo	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	92,83	197.800.000		Magelang, Temanggung, Purworejo, Wonosobo	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	92,83	166.530.000
	Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	88,66	251.990.000		Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	88,66	198.855.000
	Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	88,66	195.500.000		Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	87,09	166.570.000

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(3)	(4)	(10)	(11)
	Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonigiri, Sragen, Klaten	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	3,00	738.455.000		Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonigiri, Sragen, Klaten	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	3,00	645.080.000
	Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	3,00	562.345.000		Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	3,00	474.210.000

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(3)	(4)	(10)	(11)
	Kendal, Demak, Semarang, Kota Semarang, Grobogan	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	3,00	543.418.000		Kendal, Demak, Semarang, Kota Semarang, Grobogan	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	3,00	580.800.000
	Magelang, Temanggung, Purworejo, Wonosobo	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	3,00	581.205.000		Magelang, Temanggung, Purworejo, Wonosobo	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	3,00	470.344.000

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(3)	(4)	(10)	(11)
	Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	3,00	560.997.000		Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	3,00	506.037.000
	Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	3,00	594.505.000		Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	3,00	559.310.000
	Jawa Tengah	Persentase kendaraan laik jalan di Jawa Tengah	98,030	300.000.000		Jawa Tengah	Persentase kendaraan laik jalan di Jawa Tengah	98,03	192.113.000

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(3)	(4)	(10)	(11)
	Jawa Tengah	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan provinsi	10,98	4.759.428.000		Jawa Tengah	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan provinsi	6,94	5.564.416.000
	Jawa Tengah	Persentase implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	52,95	378.190.000		Jawa Tengah	Persentase implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	52,95	101.800.000
	Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	3,99	105.000.000		Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	3,99	55.000.000
	Kendal, Demak, Semarang, Kota Semarang, Grobogan	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	22,04	105.000.000		Kendal, Demak, Semarang, Kota Semarang, Grobogan	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	22,04	55.000.000

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(3)	(4)	(10)	(11)
	Magelang, Temanggung, Purworejo, Wonosobo	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	8,04	105.000.000		Magelang, Temanggung, Purworejo, Wonosobo	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	8,04	55.000.000
	Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	28,16	210.000.000		Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	28,16	55.000.000
	Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Wonosobo, Banjarnegara	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	43,53	105.000.000		Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Wonosobo, Banjarnegara	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	43,53	55.000.000

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(3)	(4)	(10)	(11)
	Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonigiri, Sragen, Klaten	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	45,11	525.000.000		Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonigiri, Sragen, Klaten	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	45,11	80.000.000
	Kota Semarang, Semarang, Banyumas, Purbalingga, Kendal, Surakarta, Sragen, Purworejo, Magelang, Grobogan, Sukoharjo, Wonogiri	Persentase penduduk terlayani transportasi umum (Trans Jateng)	4,040	119.805.449.000		Kota Semarang, Semarang, Banyumas, Purbalingga, Kendal, Surakarta, Sragen, Purworejo, Magelang, Grobogan, Sukoharjo, Wonogiri	Persentase penduduk terlayani transportasi umum (Trans Jateng)	4,42	118.885.631.000
	Purworejo, Sukoharjo, Purwodadi, Banjarnegara	Persentase kunjungan Bus pada terminal tipe B	70,14	6.073.500.000		Purworejo, Sukoharjo, Purwodadi, Banjarnegara	Persentase kunjungan Bus pada terminal tipe B	70,14	5.457.000.000
	Jawa Tengah	Rasio Trayek Angkutan Jalan	48,30	1.033.478.000		Jawa Tengah	Rasio Trayek Angkutan Jalan	46,74	783.757.000
	Jawa Tengah	Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru	69,85	1.030.000.000		Jawa Tengah	Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru	69,85	696.815.000

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(3)	(4)	(10)	(11)
		menggunakan angkutan umum					menggunakan angkutan umum		
PENGELOLAAN PELAYARAN				1.126.390.000	PENGELOLAAN PELAYARAN				716.983.000
	Jawa Tengah	Rasio Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP	0,47	1.126.390.000		Jawa Tengah	Rasio Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP	0,472	716.983.000
PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN				2.193.011.000	PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN				1.600.000.000
	Cilacap, Purworejo	Persentase perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	44,00	2.193.011.000		Cilacap, Purworejo	Persentase perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	28	1.600.000.000
JUMLAH				209.220.884.000	JUMLAH				207.548.490.000

2.5. Telaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan Perangkat daerah Kabupaten/ Kota diperoleh dari pelaksanaan Musrenbangwil, Forum PD, Reses DPRD, Dialog Interaktif dan Usulan Masyarakat yang dihimpun oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

Usulan Program dan Kegiatan yang diakomodir Dinas Perhubungan merupakan masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Renja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, selaras dengan program dan kegiatan kabupaten/kota, serta sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Provinsi Jawa Tengah

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
1	Kurangnya sarana prasarana berupa unit mobil skylift untuk perawatan LPJU.	Jawa Tengah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	• Belum Sinkron • Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah hanya memilik 2 mobil skylift sehingga pada pelaksanaannya kita berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan setempat. • Diusulkan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam FGD “Penanganan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Jawa Tengah Bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah”
B	PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
1	Kondisi jalur kereta api disisi selatan Jawa Tengah, Khususnya jalur Magelang – Ambarawa menimbulkan pertanyaan kapan akan dioperasikan kembali.	Jawa Tengah	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	-	• Belum Sinkron • Reaktivasi jalur KA lintas Semarang – Kedungjati – Ambarawa – Yogyakarta harapanya segera bisa terealisasi dari pemerinth pusat sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. • Diusulkan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam FGD “Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api di Jawa Tengah”
2	Apa Program terdekat Angkutan Umum yang dapat ditawarkan untuk wilayah Demak, Kudus, Jepara?	Jawa Tengah	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	• Sudah Sinkron • Waktu itu sempat diusulkan Trans Jateng untuk rute Semarang - Demak namun waktu itu sempat ada penolakan sehingga anggaran dialihkan ke rute Semarang – Kendal, dalam renstra rencana rute Trans Jateng rute Semarang – Demak tahun 2030 sedangkan Untuk koridor Jekuti (Jepara Kudus Pati) direncanakan tahun 2028; • Diusulkan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam FGD

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					“Menjaga Keberlangsungan Penyelenggaraan Angkutan Umum di Jawa Tengah”
3	Berkenan Bapak Gubernur Jawa Tengah untuk menegaskan penggunaan opsen kab/kota sebesar ...% (sesuai kebijakan Bapak Gubernur Jawa Tengah) untuk transportasi umum pada Pergub atau aturan sejenis dan opsen tersebut wajib murni hanya untuk support transportasi umum.	Jawa Tengah	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	• Belum Sinkron • Kota Semarang sudah menetapkan opsen pajak sebesar 5% melalui Perda serta Akan melaporkan kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah perihal opsen tersebut; • Diusulkan Dinas Perhubungan Kab. Semarang dalam FGD “Menjaga Keberlangsungan Penyelenggaraan Angkutan Umum di Jawa Tengah”
4	Sejauh mana perkembangan rencana jalan lingkar dan juga progres layanan Trans Jateng di wilayah Pekalongan	Jawa Tengah	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		• Layanan Trans Jateng di wilayah Pekalongan, terus melakukan evaluasi dan pemetaan terhadap potensi rute serta kebutuhan pengguna; • Pemerintah provinsi melalui Dinas Perhubungan telah menempatkan wilayah Pekalongan sebagai bagian dari wilayah pengembangan aglomerasi transportasi; • Beberapa tahap awal seperti kajian rute, identifikasi titik-titik potensial halte, hingga sinkronisasi dengan layanan angkutan lokal sedang dalam proses • Disampaikan dalam acara Forum Perangkat Daerah
5	Kapan Layanan Transjateng sampai ke Kab.Cilacap Terkait RTRW apakah terminal Tipe C Kroya diubah menjadi Terminal Tipe B	Jawa Tengah	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		• Membeli layanan atau service dari penyedia transportasi yang sudah ada dalam memenuhi kebutuhan transportasi. Keterbatasan anggaran sehingga di susun dan direalisasikan berdasarkan prioritas penggunaan dan kebutuhan. Kendaraan feeder akan di lakukan koordinasi selanjutnya. • Disampaikan dalam acara Forum Perangkat Daerah

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Didasarkan pada tema Visi “Indonesia Emas 2045”, yakni untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan, maka untuk mendukung Visi Presiden menuju Indonesia Emas 2045 guna menjalankan agenda pembangunan dimaksud, Visi Kementerian Perhubungan “Transportasi Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam mendukung visi tersebut Kementerian Perhubungan berpedoman pada 8 Asta Cita serta 17 Arah Pembangunan Nasional.

Untuk mewujudkan Visi tersebut Kementerian Perhubungan mempunyai 8 misi, yaitu :

1. Menyediakan transportasi yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan;
2. Mewujudkan dukungan transportasi terhadap ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi yang merata dan terintegrasi secara kesisteman;
4. Memperkuat kualitas SDM transportasi dan penerapan kebijakan transportasi yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan;
5. Memperkuat konektivitas transportasi nasional untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama;
6. Membangun transportasi kewilayahan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau;
7. Melanjutkan transformasi tata kelola dalam penyelenggaraan transportasi nasional;
8. Mewujudkan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

Pada Renja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, isu terkait keselamatan transportasi juga masih mendapatkan perhatian, diantaranya :

1. Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan, pemenuhan perlengkapan jalan di ruas jalan provinsi;
2. Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan di Jalan Provinsi yaitu penambahan dan pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) pada ruas Jalan Provinsi;
3. Peningkatan simpul transportasi yaitu dengan pembangunan dan revitalisasi terminal tipe B yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;

4. Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (berupa *life jacket*, rambu keselamatan, papan SOP penyeberangan).

Isu utama dan tantangan dalam penyediaan transportasi perkotaan dalam RKP 2026 adalah belum tersedianya layanan angkutan umum massal yang efisien, efektif, murah, nyaman, dan tepat waktu, serta sesuai dengan kebutuhan mobilitas di wilayah kota metropolitan dan kota besar. Sementara, dalam pelaksanaan *Major Project* pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan di wilayah metropolitan masih menghadapi tantangan antara lain :

1. Belum tersedianya dokumen perencanaan pengembangan sistem angkutan massal yang mengacu kepada upaya memenuhi kebutuhan mobilitas perkotaan yang terpadu dengan pengembangan wilayah metropolitan serta penyelenggaraan pelayanan integrasi antarmoda;
2. Belum terbentuknya kerangka kelembagaan yang memiliki kemampuan mengintegrasikan pengembangan dan penyelenggaraan transportasi perkotaan lintas wilayah administrasi dan lintas sistem angkutan di kawasan metropolitan;
3. Terbatasnya kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam pengembangan dan penyelenggaraan sistem angkutan umum massal perkotaan;
4. Kerangka regulasi yang bersifat menyeluruh untuk penyediaan fasilitas dukungan pendanaan untuk pembangunan proyek angkutan massal perkotaan di wilayah metropolitan.

Pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, penyediaan transportasi perkotaan masih menjadi perhatian utama. Hal ini diwujudkan melalui keberlanjutan operasional 7 (tujuh) koridor layanan angkutan umum Trans Jateng di kawasan aglomerasi perkotaan, serta persiapan pembukaan beberapa koridor baru pada Tahun 2027 dan 2028. Pada Tahun 2026 dilakukan persiapan pembukaan koridor pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung melalui penyusunan DED Trans Jateng Koridor Kabupaten Magelang – Kota Magelang – Kabupaten Temanggung, yang direncanakan akan mulai beroperasi pada Tahun 2027. Pada Tahun 2026 juga dilakukan persiapan pembukaan koridor Jekuti dan Petanglong melalui penyusunan Masterplan Trans Jateng Jekuti dan DED Trans Jateng Petanglong, yang direncanakan akan mulai beroperasi pada Tahun 2028.

Selain itu, Inisiasi Layanan Trans Jateng Eksekutif Koridor Bawen – Tawang yang direncanakan pada Tahun 2028 juga mulai dipersiapkan yaitu melalui pelaksanaan Kajian FS dan ATP/WTP. Pemenuhan fasilitas penunjang turut menjadi perhatian, antara lain

melalui penyediaan fasilitas tempat pemberhentian bus (TPB) pada koridor Solo–Sragen, Semarang–Grobogan, dan Solo–Wonogiri.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada sub bab sebelumnya yang dikaitkan dengan target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan Dan Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Transportasi		Indeks Pelayanan Transportasi	Angka	6,788
		Meningkatnya Keselamatan Perjalanan Transportasi di Jawa Tengah	Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi Jalan Provinsi	%	99,9838
		Meningkatnya Konektivitas Transportasi di Jawa Tengah	Rasio Konektivitas Provinsi	Angka	0,302
2	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Perhubungan		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan	Angka	85,15
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Dinas Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Perhubungan	Angka	81,6
		Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Perhubungan	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Perhubungan	Angka	3,11

Sumber : Hasil Perhitungan Dinas Perhubungan Prov. Jateng, 2025

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan SKPD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi serta Musrenbangwil. Adapun program dan kegiatan yang dirumuskan

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan utamanya pada kegiatan peningkatan konektivitas serta penguatan aspek keselamatan transportasi. Upaya tersebut diwujudkan melalui keberlanjutan operasional 7 (tujuh) koridor Trans Jateng yang telah berjalan, meliputi Koridor Semarang-Bawen, Semarang-Kendal, Purwokerto-Purbalingga, Kutoarjo-Borobudur, Solo-Sumberlawang via Sangiran, Semarang-Gubug, dan Solo-Sukoharjo-Wonogiri. Selain itu, pada Tahun 2026 dilakukan persiapan pembukaan koridor pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung melalui penyusunan DED Trans Jateng Koridor Kabupaten Magelang – Kota Magelang – Kabupaten Temanggung, yang direncanakan akan mulai beroperasi pada Tahun 2027. Kegiatan lainnya meliputi peningkatan simpul transportasi berupa pembangunan dan revitalisasi Terminal Penumpang Tipe B sebanyak dua lokasi, yaitu Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B Kutoarjo Tahap VI serta Peningkatan Terminal Penumpang Tipe B Purbalingga. Selanjutnya, kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di ruas jalan provinsi diarahkan pada pemenuhan fasilitas keselamatan jalan, khususnya melalui pengadaan dan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU). Pemasangan LPJU ini difokuskan untuk mendukung tema pembangunan Jawa Tengah Tahun 2027, yaitu ketahanan pangan, dengan prioritas pada jalur-jalur lumbung pangan utama, seperti Jl. Sidareja-Cukangleuleus, Jl. Menganti-Kesugihan, Jl. Sragen-Batujamus/Bts. Kab. Karanganyar, Jl. Bts. Kab. Karanganyar-Gemolong, serta Jl. Purwodadi-Wirosari. Selain itu, dilaksanakan pula kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi, yang diarahkan pada peningkatan peran Forum LLAJ dalam rangka implementasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ).

Program ini adalah dalam rangka mencapai indikator kinerja yaitu Rasio Trayek Angkutan Jalan; Persentase kunjungan Bus pada terminal tipe B; Persentase implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis; Persentase pengunjung terminal tipe B (pada semua BPSPP Wilayah); Persentase penduduk terlayani transportasi umum (Trans Jateng); Persentase kelengkapan jalan yang

telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan provinsi; Presentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani (pada semua BPSPP Wilayah); Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti (pada semua BPSPP Wilayah) dan Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum.

b. Pengelolaan Pelayaran

Program ini diarahkan utamanya pada kegiatan pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi berupa pembangunan dermaga DS Kajongan; kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional berupa kegiatan koordinasi guna mendorong optimalisasi fungsi dan pemanfaatan Pelabuhan Kendal Seaport serta Pelabuhan Batang; kegiatan penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas berupa penerbitan rekomendasi teknis ijin baru/perubahan perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan perairan.

Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu Rasio Konektivitas Transportasi Laut.

c. Pengelolaan Perkeretaapian

Program ini diarahkan utamanya pada kegiatan penetapan rencana induk perkeretaapian berupa pemasangan fasilitas keselamatan perlintasan kereta api di perlintasan sebidang pada 6 perlintasan sebidang di Kab. Cilacap (JPL 479, JPL 2. JPL 464B, JPL 441, JPL 446, JPL 446H) pemasangan sesuai dengan Pedoman teknis pengendalian lalu lintas di ruas jalan pada lokasi potensi kecelakaan di perlintasan sebidang dengan kereta api.

Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan.

Tabel 4.1 Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
Meningkatkan Kualitas Layanan Transportasi									138.755.679.000			160.438.983.000	Dinas Perhubungan
						Indeks Pelayanan Transportasi	Angka	6,788		Angka	6,904		Dinas Perhubungan
	Meningkatnya Keselamatan Perjalanan Transportasi di Jawa Tengah								11.758.693.000			18.112.473.000	
						Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi Jalan Provinsi	%	99,9838	11.758.693.000	%	99,984	18.112.473.000	Dinas Perhubungan
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGG ARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						10.158.693.000				
						Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	81,84	358.208.000	%	82,76	404.650.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran, Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
		2.15.02.1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					358.208.000			404.650.000	
						Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Unit	6889	358.208.000	Unit	6199	404.650.000	SEKSI ANGKUTAN
		2.15.02.1.07.0003			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				337.978.000			363.800.000	
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	36	337.978.000	Laporan	36	363.800.000	SEKSI ANGKUTAN
		2.15.02.1.07.0005			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				20.230.000			40.850.000	
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2	20.230.000	Laporan	2	40.850.000	SEKSI ANGKUTAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	%	86,2	94.520.000	%	86,92	115.950.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A
		2.15.02.1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					94.520.000			115.950.000	
						Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Unit	1261	94.520.000	Unit	1261	115.950.000	SEKSI ANGKUTAN
		2.15.02.1.07.0003			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				84.520.000			95.950.000	
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	36	84.520.000	Laporan	36	95.950.000	SEKSI ANGKUTAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
		2.15.02.1.0 7.0005			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				10.000.000			20.000.000	
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2	10.000.000	Laporan	2	20.000.000	SEKSI ANGKUTAN
						Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	57,12	181.700.000	%	59,3	210.625.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
		2.15.02.1.0 7		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					181.700.000			210.625.000	
						Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Unit	2241	181.700.000	Unit	2241	210.625.000	SEKSI ANGKUTAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
		2.15.02.1.0 7.0003			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				169.200.000			185.625.000	
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	36	169.200.000	Laporan	36	185.625.000	SEKSI ANGKUTAN
		2.15.02.1.0 7.0005			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				12.500.000			25.000.000	
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2	12.500.000	Laporan	2	25.000.000	SEKSI ANGKUTAN
						Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	92,83	166.530.000	%	93,19	197.800.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran, Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
		2.15.02.1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					166.530.000			197.800.000	
						Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Unit	6889	166.530.000	Unit	6889	197.800.000	SEKSI ANGKUTAN
		2.15.02.1.07.0003			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				151.530.000			167.800.000	
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	36	151.530.000	Laporan	36	167.800.000	SEKSI ANGKUTAN
		2.15.02.1.07.0005			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				15.000.000			30.000.000	
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2	15.000.000	Laporan	2	30.000.000	SEKSI ANGKUTAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran, Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	88,66	198.855.000	%	89,23	251.990.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
		2.15.02.1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					198.855.000			251.990.000	
						Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Unit	3500	198.855.000	Unit	3500	251.990.000	SEKSI ANGKUTAN
		2.15.02.1.07.0003			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				183.855.000			221.990.000	
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	36	183.855.000	Laporan	36	221.990.000	SEKSI ANGKUTAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
		2.15.02.1.0 7.0005			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				15.000.000			30.000.000	
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2	15.000.000	Laporan	2	30.000.000	SEKSI ANGKUTAN
						Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	%	87,09	166.570.000	%	87,74	195.500.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A
		2.15.02.1.0 7		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					166.570.000			195.500.000	
						Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Unit	3353	166.570.000	Unit	3353	195.500.000	SEKSI ANGKUTAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
		2.15.02.1.0 7.0003			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				151.570.000			165.500.000	
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	36	151.570.000	Laporan	36	165.500.000	SEKSI ANGKUTAN
		2.15.02.1.0 7.0005			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				15.000.000			30.000.000	
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2	15.000.000	Laporan	2	30.000.000	SEKSI ANGKUTAN
						Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan provinsi	%	6,94	5.564.416.000	%	7,51	6.073.329.000	Bidang Lalu Lintas Jalan
		2.15.02.1.0 2		Penyediaan Perlengkap an Jalan di Jalan Provinsi					5.445.560.000			5.546.584.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Persentase perlengkapan jalan terpenuhi	%	64,51	5.445.560.000	%	66,47	5.546.584.000	Pokja Rekayasa Lalu Lintas Jalan
		2.15.02.1.0 2.0002			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				5.445.560.000			5.546.584.000	
						Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit	361	5.445.560.000	Unit	622	5.546.584.000	Pokja Rekayasa Lalu Lintas Jalan
		2.15.02.1.0 5		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					81.540.000			451.745.000	
						Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi penilaian pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Provinsi Jateng	Kabupaten /Kota	19	22.916.000	Kabupat en/Kota	19	75.000.000	Pokja Manajemen Lalu Lintas Jalan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
		2.15.02.1.05.0003			Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi				22.916.000			75.000.000	
						Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Dokumen	30	22.916.000	Dokumen	30	75.000.000	Pokja Manajemen Lalu Lintas Jalan
						Jumlah Rekomendasi hasil forum LLAJ	Dokumen	12	58.624.000	Dokumen	12	376.745.000	Pokja Keselamatan Lalu Lintas Jalan
		2.15.02.1.05.0005			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi				58.624.000			376.745.000	
						Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan	7	58.624.000	Laporan	13	376.745.000	Pokja Keselamatan Lalu Lintas Jalan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
		2.15.02.1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi					37.316.000			75.000.000	
						Persentase tingkat kepatuhan pelaksanaan rekomendasi andalalin	%	73,13	37.316.000	%	74,61	75.000.000	Pokja Manajemen Lalu Lintas Jalan
		2.15.02.1.06.0007			Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin				37.316.000			75.000.000	
						Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	Dokumen	33	37.316.000	Dokumen	34	75.000.000	Pokja Manajemen Lalu Lintas Jalan
						Persentase kendaraan laik jalan di Jawa Tengah	%	98,03	192.113.000	%	98,05	300.000.000	Bidang Lalu Lintas Jalan
		2.15.02.1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					192.113.000			300.000.000	
						Jumlah Kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji berkala di jawa tengah	Unit	317984	192.113.000	Unit	318061	300.000.000	Pokja Keselamatan Lalu Lintas Jalan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
		2.15.02.1.0 7.0004			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi				173.460.000			250.000.000	
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Laporan	135	173.460.000	Laporan	135	250.000.000	Pokja Keselamatan Lalu Lintas Jalan
		2.15.02.1.0 7.0005			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				18.653.000			50.000.000	
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	66	18.653.000	Laporan	66	50.000.000	Pokja Keselamatan Lalu Lintas Jalan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	3	645.080.000	%	3	1.285.990.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
		2.15.02.1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					645.080.000			1.285.990.000	
						Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	55,56	645.080.000	%	66,67	1.285.990.000	SEKSI LALU LINTAS
		2.15.02.1.05.0004			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				192.840.000			198.480.000	
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	78	192.840.000	Laporan	78	198.480.000	SEKSI LALU LINTAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran, Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
		2.15.02.1.05.0007			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				452.240.000			1.087.510.000	
						Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	Unit	2	452.240.000	Unit	1	1.087.510.000	SEKSI LALU LINTAS
						Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	%	3	474.210.000	%	3	1.198.870.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A
		2.15.02.1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					474.210.000			1.198.870.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	%	43,75	474.210.000	%	50	1.198.870.000	SEKSI LALU LINTAS
		2.15.02.1.0 5.0004			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				116.040.000			121.680.000	
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	46	116.040.000	Laporan	46	121.680.000	SEKSI LALU LINTAS
		2.15.02.1.0 5.0007			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				358.170.000			1.077.190.000	
						Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	Unit	1	358.170.000	Unit	1	1.077.190.000	SEKSI LALU LINTAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	3	580.800.000	%	3	1.457.253.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
		2.15.02.1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					580.800.000			1.457.253.000	
						Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	33,33	580.800.000	%	61,11	1.457.253.000	SEKSI LALU LINTAS
		2.15.02.1.05.0004			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				140.040.000			145.680.000	
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	56	140.040.000	Laporan	56	145.680.000	SEKSI LALU LINTAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
		2.15.02.1.0 5.0007			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				440.760.000			1.311.573.000	
						Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	Unit	2	440.760.000	Unit	5	1.311.573.000	SEKSI LALU LINTAS
						Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	3	470.344.000	%	3	1.333.230.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
		2.15.02.1.0 5		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					470.344.000			1.333.230.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran, Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	33,33	470.344.000	%	53,33	1.333.230.000	SEKSI LALU LINTAS
		2.15.02.1.0 5.0004			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				120.840.000			126.480.000	
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	48	120.840.000	Laporan	48	126.480.000	SEKSI LALU LINTAS
		2.15.02.1.0 5.0007			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				349.504.000			1.206.750.000	
						Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	Unit	1	349.504.000	Unit	3	1.206.750.000	SEKSI LALU LINTAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	3	506.037.000	%	3	1.254.060.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
		2.15.02.1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					506.037.000			1.254.060.000	
						Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	45,83	506.037.000	%	58,33	1.254.060.000	SEKSI LALU LINTAS
		2.15.02.1.05.0004			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				130.440.000			136.080.000	
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	52	130.440.000	Laporan	52	136.080.000	SEKSI LALU LINTAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran, Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
		2.15.02.1.0 5.0007			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				375.597.000			1.117.980.000	
						Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	Unit	1	375.597.000	Unit	3	1.117.980.000	SEKSI LALU LINTAS
						Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	%	3	559.310.000	%	3	1.360.170.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A
		2.15.02.1.0 5		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					559.310.000			1.360.170.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	%	75	559.310.000	%	100	1.360.170.000	SEKSI LALU LINTAS
		2.15.02.1.0 5.0004			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				164.040.000			169.680.000	
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	66	164.040.000	Laporan	66	169.680.000	SEKSI LALU LINTAS
		2.15.02.1.0 5.0007			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				395.270.000			1.190.490.000	
						Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	Unit	1	395.270.000	Unit	1	1.190.490.000	SEKSI LALU LINTAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
		2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN						1.600.000.000			2.473.056.000	
						Persentase perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	%	28	1.600.000.000	%	36	2.473.056.000	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian
		2.15.05.1.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian					1.600.000.000			2.473.056.000	
						Persentase realisasi rencana induk perkeretaapian	%	70,48	1.600.000.000	%	72,71	2.473.056.000	Pokja Perkeretaapian
		2.15.05.1.01.0003			Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian				1.600.000.000			2.473.056.000	
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Laporan	7	1.600.000.000	Laporan	5	2.473.056.000	Pokja Perkeretaapian
	Meningkatnya Konektivitas Transportasi di Jawa Tengah								126.996.986.000			142.326.510.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran, Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Rasio Konektivitas Provinsi	Angka	0,302	126.996.986.000	Angka	0,327	142.326.510.000	Dinas Perhubungan
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						126.280.003.000			142.326.510.000	
						Persentase implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	%	52,95	101.800.000	%	55,58	378.190.000	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian
		2.15.02.1.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi					101.800.000			378.190.000	
						Persentase implementasi dokumen RIJLLAJ	%	43,9	101.800.000	%	47,56	378.190.000	Pokja Perencanaan Transportasi
		2.15.02.1.01.0002			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi				101.800.000			378.190.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	2	101.800.000	Dokumen	3	378.190.000	Pokja Perencanaan Transportasi
						Persentase kunjungan Bus pada terminal tipe B	%	70,14	5.457.000.000	%	70,28	6.905.000.000	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian
		2.15.02.1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					5.457.000.000			6.905.000.000	
						Presentase Keterpenuhan SPM Terminal Tipe B	%	53,48	5.457.000.000	%	54,72	6.905.000.000	Pokja Terminal Penumpang
		2.15.02.1.03.0001			Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B				155.000.000			105.000.000	
						Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Dokumen	2	155.000.000	Dokumen	1	105.000.000	Pokja Terminal Penumpang
		2.15.02.1.03.0007			Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				1.107.000.000			2.150.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Unit	1	1.107.000.000	Unit	2	2.150.000.000	Pokja Terminal Penumpang
		2.15.02.1.0 3.0010			Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang				4.195.000.000			4.650.000.000	
						Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Unit	1	4.195.000.000	Unit	1	4.650.000.000	Pokja Terminal Penumpang
						Persentase penduduk terlayani transportasi umum (Trans Jateng)	%	4,42	118.885.631.000	%	4,47	130.264.952.000	Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A
		2.15.02.1.0 2		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi					811.634.000			1.904.690.000	
						Persentase Jumlah Tempat Perhentian Bus (TPB) Terpenuhi	%	28,06	811.634.000	%	29,17	1.904.690.000	SEKSI SARANA DAN PRASARANA
		2.15.02.1.0 2.0002			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				811.634.000			1.904.690.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit	6	811.634.000	Unit	14	1.904.690.000	SEKSI SARANA DAN PRASARANA
		2.15.02.1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					118.073.997.000			128.360.262.000	
						Jumlah penumpang terlayani angkutan umum (Trans Jateng) di kawasan aglomerasi perkotaan	Orang	9557771	118.073.997.000	Orang	1E+07	128.360.262.000	SEKSI OPERASIONAL
		2.15.02.1.08.0003			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				118.073.997.000			128.360.262.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran, Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Unit	115	118.073.997.000	Unit	129	128.360.262.000	SEKSI OPERASIONAL
						Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	%	3,99	55.000.000	%	47,37	525.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A
		2.15.02.1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					55.000.000			525.000.000	
						Presentase terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	%	40,06	55.000.000	%	28,56	525.000.000	SEKSI ANGKUTAN
		2.15.02.1.03.0011			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				55.000.000			525.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	1	55.000.000	Unit	5	525.000.000	SEKSI ANGKUTAN
						Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	22,04	55.000.000	%	23,15	105.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
		2.15.02.1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					55.000.000			105.000.000	
						Presentase terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	31,91	55.000.000	%	32,46	105.000.000	SEKSI ANGKUTAN
		2.15.02.1.03.0011			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				55.000.000			105.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	1	55.000.000	Unit	1	105.000.000	SEKSI ANGKUTAN
						Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	8,04	55.000.000	%	38,71	105.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
		2.15.02.1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					55.000.000			105.000.000	
						Presentase terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	38,31	55.000.000	%	1	105.000.000	SEKSI ANGKUTAN
		2.15.02.1.03.0011			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				55.000.000			105.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	1	55.000.000	Unit	45,74	105.000.000	SEKSI ANGKUTAN
						Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	28,16	55.000.000	%	29,58	210.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
		2.15.02.1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					55.000.000			210.000.000	
						Presentase terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	42,94	55.000.000	%	43,29	210.000.000	SEKSI ANGKUTAN
		2.15.02.1.03.0011			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				55.000.000			210.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	1	55.000.000	Unit	2	210.000.000	SEKSI ANGKUTAN
						Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	%	43,53	55.000.000	%	45,74	105.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A
		2.15.02.1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					55.000.000			105.000.000	
						Presentase terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	%	31,71	55.000.000	%	31,71	105.000.000	SEKSI ANGKUTAN
		2.15.02.1.03.0011			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				55.000.000			105.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	1	55.000.000	Unit	1	105.000.000	SEKSI ANGKUTAN
						Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	45,11	80.000.000	%	47,37	525.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
		2.15.02.1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					80.000.000			525.000.000	
						Presentase terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	28,44	80.000.000	%	28,56	525.000.000	SEKSI ANGKUTAN
		2.15.02.1.03.0011			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				80.000.000			525.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran, Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	1	80.000.000	Unit	5	525.000.000	SEKSI ANGKUTAN
						Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum	%	69,85	696.815.000	%	70,55	1.100.000.000	Bidang Angkutan Jalan
		2.15.02.1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					696.815.000			1.100.000.000	
						Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani	Orang	35063886	696.815.000	Orang	4E+07	1.100.000.000	Pokja Angkutan Dalam Trayek

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
		2.15.02.1.0 8.0002			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi				696.815.000			1.100.000.000	
						Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Laporan	3	696.815.000	Laporan	3	1.100.000.000	Pokja Angkutan Dalam Trayek
						Rasio Trayek Angkutan Jalan	Angka	46,74	783.757.000	Angka	48,28	1.043.478.000	Bidang Angkutan Jalan
		2.15.02.1.0 8		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					19.810.000			40.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran, Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Persentase angkutan barang yang berijin	%	68,95	19.810.000	%	69,64	40.000.000	Pokja Angkutan Tidak Dalam Trayek
		2.15.02.1.0 8.0003			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				19.810.000			40.000.000	
						Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Unit	60	19.810.000	Unit	60	40.000.000	Pokja Angkutan Tidak Dalam Trayek

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
		2.15.02.1.09		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					660.173.000			560.288.000	
						Persentase Kawasan perkotaan yang memiliki rencana layanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%	48,72	660.173.000	%	51,28	560.288.000	Pokja Angkutan Aglomerasi
		2.15.02.1.09.0001			Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi				586.551.000			315.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen	6	586.551.000	Dokumen	3	315.000.000	Pokja Angkutan Aglomerasi
		2.15.02.1.0 9.0002			Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi				73.622.000			245.288.000	
						Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen	7	73.622.000	Dokumen	8	245.288.000	Pokja Angkutan Aglomerasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
		2.15.02.1.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					18.000.000			135.000.000	
						Presentase jaringan trayek pedesaan antar kabupaten kota dalam provinsi yang ditetapkan	%	13,04	18.000.000	%	17,39	135.000.000	Pokja Angkutan Aglomerasi
		2.15.02.1.11.0002			Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi				18.000.000			100.000.000	
						Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	18.000.000	Dokumen	1	100.000.000	Pokja Angkutan Aglomerasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
		2.15.02.1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					48.400.000			223.190.000	
						Persentase Angkutan Orang Dalam Trayek yang berijin	%	53,1	48.400.000	%	53,53	223.190.000	Pokja Angkutan Dalam Trayek
		2.15.02.1.13.0001			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				48.400.000			223.190.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran, Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	Unit	26	48.400.000	Unit	28	223.190.000	Pokja Angkutan Dalam Trayek
		2.15.02.1.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					17.374.000			35.000.000	
						Persentase angkutan taksi terpenuhi	%	18,85	17.374.000	%	19,22	35.000.000	Pokja Angkutan Tidak Dalam Trayek

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
		2.15.02.1.14.0004			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				17.374.000			35.000.000	
						Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Unit	37	17.374.000	Unit	37	35.000.000	Pokja Angkutan Tidak Dalam Trayek

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
		2.15.02.1.15		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					20.000.000			50.000.000	
						Presentase Trayek yang Ditetapkan Pemutakhiran Tarif	%	100	20.000.000	%	100	50.000.000	Pokja Angkutan Dalam Trayek
		2.15.02.1.15.0003			Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				20.000.000			50.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	1	20.000.000	Laporan	1	50.000.000	Pokja Angkutan Dalam Trayek
		2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						716.983.000			1.479.890.000	
						Rasio Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP	Angka	0,472	716.983.000	Angka	0,534	1.479.890.000	Bidang Pelayaran
		2.15.03.1.03		Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan					56.400.000			326.890.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Persentase dokumen terlengkapi sebagai persyaratan ijin trayek berdasarkan tingkatannya	%	51,52	56.400.000	%	57,58	326.890.000	Pokja Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
		2.15.03.1.0 3.0001			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				56.400.000			326.890.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	Unit	3	56.400.000	Unit	2	326.890.000	Pokja Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
		2.15.03.1.06		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi , Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas					37.387.000			100.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang diawasi	%	56,84	37.387.000	%	67,37	100.000.000	Pokja Angkutan Laut

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
		2.15.03.1.0 6.0001			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				37.387.000			100.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran, Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	30	37.387.000	Dokumen	30	100.000.000	Pokja Angkutan Laut
		2.15.03.1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional					38.536.000			100.000.000	
						Berth occupancy ratio	%	20,44	38.536.000	%	21,24	100.000.000	Pokja Kepelabuhanan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
		2.15.03.1.0 9.0001			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				38.536.000			100.000.000	
						Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	Unit	8	38.536.000	Unit	8	100.000.000	Pokja Kepelabuhanan
		2.15.03.1.1 0		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					584.660.000			953.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Persentase Fasilitas Pelabuhan SDP terpenuhi	%	60	584.660.000	%	67,5	953.000.000	Pokja Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
		2.15.03.1.1 0.0001			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				77.000.000			130.000.000	
						Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan	Laporan	1	77.000.000	Laporan	3	130.000.000	Pokja Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
		2.15.03.1.1 0.0002			Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				483.000.000			783.000.000	
						Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun	Unit	1	483.000.000	Unit	1	783.000.000	Pokja Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
		2.15.03.1.1 0.0009			Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				24.660.000			40.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Unit	18	24.660.000	Unit	28	40.000.000	Pokja Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Perhubungan									68.792.811.000			70.790.626.000	Dinas Perhubungan
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan	Angka	85,15		Angka	85,2		Dinas Perhubungan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Dinas Perhubungan								68.547.128.000			70.374.026.000	
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Perhubungan	Angka	81,6	68.547.128.000	Angka	81,65	70.374.026.000	Dinas Perhubungan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI						68.547.128.000			68.597.099.000	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perhubungan	%	100	67.243.976.000	%	100	68.597.099.000	SEKRETARIAT
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					47.162.594.000			50.688.719.000	
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	36	47.162.594.000	Dokumen	36	50.688.719.000	SUB BAGIAN KEUANGAN
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				46.366.833.000			49.843.519.000	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	300	46.366.833.000	Orang/Bulan	300	49.843.519.000	SUB BAGIAN KEUANGAN
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				745.200.000			745.200.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran, Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	745.200.000	Dokumen	12	745.200.000	SUB BAGIAN KEUANGAN
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				50.561.000			100.000.000	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	12	50.561.000	Laporan	12	100.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					955.000.000			1.155.000.000	
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	955.000.000	Dokumen	1	1.155.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				955.000.000			1.155.000.000	
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	955.000.000	Dokumen	1	1.155.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					160.000.000			175.000.000	
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	160.000.000	%	100	175.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				10.000.000			25.000.000	
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	10.000.000	Dokumen	1	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				150.000.000			150.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	150	150.000.000	Orang	150	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.024.000.000			1.855.500.000	
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.024.000.000	%	100	1.855.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000			20.000.000	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				24.000.000			48.000.000	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	24.000.000	Paket	1	48.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				50.000.000			50.000.000	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	50.000.000	Paket	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.000.000			30.000.000	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.000.000	Paket	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				52.500.000			82.500.000	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	52.500.000	Paket	1	82.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				5.000.000			5.000.000	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	40	5.000.000	Dokumen	40	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				60.000.000			60.000.000	
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	60.000.000	Laporan	12	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				760.000.000			1.500.000.000	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	760.000.000	Laporan	12	1.500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				37.500.000			60.000.000	
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	37.500.000	Dokumen	12	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.885.000.000			1.905.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	11	1.885.000.000	Unit	11	1.905.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.700.000.000			1.800.000.000	
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	1.700.000.000	Unit	1	1.800.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				80.000.000			0	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	80.000.000	Unit	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				105.000.000			105.000.000	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	105.000.000	Unit	10	105.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					14.552.912.000			11.330.480.000	
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	36	14.552.912.000	Laporan	36	11.330.480.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000			4.000.000	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	4.000.000	Laporan	12	4.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.589.225.000			1.811.000.000	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.589.225.000	Laporan	12	1.811.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12.959.687.000			9.515.480.000	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12.959.687.000	Laporan	12	9.515.480.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah					1.504.470.000			1.487.400.000	
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	288	1.504.470.000	Unit	288	1.487.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIA N
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				857.400.000			857.400.000	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	73	857.400.000	Unit	73	857.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIA N
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				80.000.000			80.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	29	80.000.000	Unit	29	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				350.000.000			300.000.000	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	350.000.000	Unit	1	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000			100.000.000	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	92	100.000.000	Unit	92	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				117.070.000			150.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran, Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	93	117.070.000	Unit	93	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	100	247.100.000	%	100	200.340.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.000.000			3.000.000	
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Dokumen	12	3.000.000	Dokumen	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.000.000			3.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	3.000.000	Dokumen	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.000.000			10.000.000	
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	100	5.000.000	%	100	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000			10.000.000	
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	5.000.000	Dokumen	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					132.500.000			112.340.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	100	132.500.000	%	100	112.340.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				44.500.000			67.500.000	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	44.500.000	Paket	1	67.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.000.000			5.000.000	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	12.000.000	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				11.000.000			4.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	11.000.000	Paket	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.500.000			1.500.000	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.500.000	Paket	1	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				52.000.000			19.340.000	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	52.000.000	Paket	1	19.340.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.500.000			15.000.000	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	7.500.000	Laporan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah					46.600.000			21.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Laporan	24	46.600.000	Laporan	24	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000			1.000.000	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.000.000	Laporan	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				45.600.000			20.000.000	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	45.600.000	Laporan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah					60.000.000			54.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Unit	21	60.000.000	Unit	9	54.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000			50.000.000	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000			4.000.000	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	20	10.000.000	Unit	8	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	%	100	123.612.000	%	100	166.112.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.000.000			3.000.000	
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Dokumen	12	3.000.000	Dokumen	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.000.000			3.000.000	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	3.000.000	Dokumen	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.000.000			10.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	%	100	5.000.000	%	100	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000			10.000.000	
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	5.000.000	Dokumen	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					56.612.000			94.112.000	
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	%	100	56.612.000	%	100	94.112.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				35.500.000			65.500.000	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	35.500.000	Paket	1	65.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000			3.000.000	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.000.000			2.000.000	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	2.000.000	Paket	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.000.000			1.000.000	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.000.000	Paket	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.612.000			7.612.000	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	7.612.000	Paket	1	7.612.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.500.000			15.000.000	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	7.500.000	Laporan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah					8.000.000			8.000.000	
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Laporan	24	8.000.000	Laporan	24	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000			1.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.000.000	Laporan	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				7.000.000			7.000.000	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	7.000.000	Laporan	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah					51.000.000			51.000.000	
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Unit	6	51.000.000	Unit	6	51.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000			50.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.000.000			1.000.000	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	1.000.000	Unit	5	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	100	157.840.000	%	100	285.100.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.000.000			3.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Dokumen	12	3.000.000	Dokumen	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.000.000			3.000.000	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	3.000.000	Dokumen	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.000.000			10.000.000	
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	100	5.000.000	%	100	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran, Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000			10.000.000	
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	5.000.000	Dokumen	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					74.840.000			165.500.000	
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	100	74.840.000	%	100	165.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				37.500.000			70.000.000	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	37.500.000	Paket	1	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000			12.000.000	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	Paket	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000			11.000.000	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	Paket	1	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.500.000			5.500.000	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.500.000	Paket	1	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				19.340.000			52.000.000	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	19.340.000	Paket	1	52.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.500.000			15.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	7.500.000	Laporan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					21.000.000			46.600.000	
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Laporan	24	21.000.000	Laporan	24	46.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000			1.000.000	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.000.000	Laporan	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				20.000.000			45.600.000	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	20.000.000	Laporan	12	45.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah					54.000.000			60.000.000	
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Unit	9	54.000.000	Unit	21	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000			50.000.000	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000			10.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	4.000.000	Unit	20	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	100	164.700.000	%	100	207.200.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.000.000			3.000.000	
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun pada pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Dokumen	12	3.000.000	Dokumen	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.000.000			3.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	3.000.000	Dokumen	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.000.000			10.000.000	
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	100	5.000.000	%	100	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000			10.000.000	
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	5.000.000	Dokumen	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					76.700.000			114.200.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	100	76.700.000	%	100	114.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				37.500.000			67.500.000	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	37.500.000	Paket	1	67.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000			5.000.000	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000			4.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	Paket	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.500.000			1.500.000	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.500.000	Paket	1	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				21.200.000			21.200.000	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	21.200.000	Paket	1	21.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.500.000			15.000.000	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	7.500.000	Laporan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah					26.000.000			26.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Laporan	24	26.000.000	Laporan	24	26.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000			1.000.000	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.000.000	Laporan	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				25.000.000			25.000.000	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	25.000.000	Laporan	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah					54.000.000			54.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Unit	8	54.000.000	Unit	8	54.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000			50.000.000	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000			4.000.000	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	4.000.000	Unit	7	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	100	171.400.000	%	100	192.275.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.000.000			3.000.000	
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Dokumen	12	3.000.000	Dokumen	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.000.000			3.000.000	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	3.000.000	Dokumen	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.000.000			10.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	100	5.000.000	%	100	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000			10.000.000	
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	5.000.000	Dokumen	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					81.000.000			112.200.000	
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	100	81.000.000	%	100	112.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.1. 06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor				38.500.000			66.500.000	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	38.500.000	Paket	1	66.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1. 06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.000.000			4.000.000	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.000.000	Paket	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1. 06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000			3.000.000	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1. 06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				2.000.000			1.500.000	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.000.000	Paket	1	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				22.000.000			22.200.000	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	22.000.000	Paket	1	22.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.500.000			15.000.000	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	7.500.000	Laporan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah					27.400.000			14.075.000	
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Laporan	24	27.400.000	Laporan	24	14.075.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000			1.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.000.000	Laporan	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				26.400.000			13.075.000	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	26.400.000	Laporan	12	13.075.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah					55.000.000			53.000.000	
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Unit	16	55.000.000	Unit	7	53.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000			50.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000			3.000.000	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	5.000.000	Unit	6	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	%	100	141.500.000	%	100	213.900.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.000.000			3.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Dokumen	12	3.000.000	Dokumen	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.000.000			3.000.000	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	3.000.000	Dokumen	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.000.000			10.000.000	
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	%	100	5.000.000	%	100	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran, Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000			10.000.000	
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	5.000.000	Dokumen	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					74.700.000			118.500.000	
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	%	100	74.700.000	%	100	118.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				36.500.000			68.500.000	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	36.500.000	Paket	1	68.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.000.000			6.000.000	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	Paket	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000			5.000.000	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.500.000			2.000.000	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.500.000	Paket	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				22.200.000			22.000.000	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	22.200.000	Paket	1	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.500.000			15.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	7.500.000	Laporan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5.800.000			27.400.000	
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Laporan	24	5.800.000	Laporan	24	27.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000			1.000.000	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.000.000	Laporan	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				4.800.000			26.400.000	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	4.800.000	Laporan	12	26.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					53.000.000			55.000.000	
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Unit	7	53.000.000	Unit	16	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000			50.000.000	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.000.000			5.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran, Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	3.000.000	Unit	15	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	%	100	297.000.000	%	100	512.000.000	Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A
		X.XX.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.000.000			3.000.000	
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	Dokumen	12	3.000.000	Dokumen	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.000.000			3.000.000	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	3.000.000	Dokumen	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					2.500.000			10.000.000	
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	%	100	2.500.000	%	100	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2.500.000			10.000.000	
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	2.500.000	Dokumen	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					34.000.000			41.500.000	
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	%	100	34.000.000	%	100	41.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.000.000			7.000.000	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	7.000.000	Paket	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.000.000			6.000.000	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.000.000	Paket	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.500.000			10.500.000	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	10.500.000	Paket	1	10.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.000.000			3.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran, Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.500.000			15.000.000	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	7.500.000	Laporan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah					5.000.000			5.000.000	
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	Laporan	12	5.000.000	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				5.000.000			5.000.000	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	5.000.000	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					252.500.000			252.500.000	
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	Unit	7	252.500.000	Unit	7	252.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				200.000.000			200.000.000	
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	200.000.000	Unit	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000			50.000.000	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.500.000			2.500.000	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	2.500.000	Unit	5	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Perhubungan								245.683.000			416.600.000	
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Perhubungan	Angka	3,11	245.683.000	Angka	3,15	416.600.000	Dinas Perhubungan
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						245.683.000			200.000.000	
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Perhubungan	%	100	245.683.000	%	100	416.600.000	SEKRETARIAT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.1.01		Perencanaan , Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					245.683.000			416.600.000	
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	245.683.000	%	100	416.600.000	SUB BAGIAN PROGRAM
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				120.064.000			261.600.000	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	120.064.000	Dokume n	9	261.600.000	SUB BAGIAN PROGRAM
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				62.619.000			85.000.000	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	62.619.000	Laporan	4	85.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				50.000.000			50.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran,Indikator Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah
								2026			2027		
								Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(16)	(17)	(18)
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	126	50.000.000	Data	126	50.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggara an Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				13.000.000			20.000.000	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	13.000.000	Dokumen	1	20.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM
JUMLAH									207.548.490.000			231.229.609.000	

Sumber : Dinas Perhubungan 2025

4.2. Manajemen Risiko Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

Subbab ini menyajikan hasil proses manajemen risiko di level program dan kegiatan prioritas tahun 2026. Program/kegiatan yang dilakukan proses manajemen risiko merupakan program/kegiatan yang dinilai menjadi program/kegiatan yang memberikan konstribusi cukup besar pada ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah maupun pembangunan daerah.

Sesuai dengan perhitungan skala resiko terdapat pernyataan resiko yang membutuhkan Rencana Tindak Pengendalian. Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 sesuai tabel berikut.

Tabel 4.2
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Sasaran/Program/Kegiatan
Perangkat Daerah (Nama PD) Tahun 2026

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Trayek Angkutan Jalan	Berkurangnya jumlah angkutan umum yang beroperasi	9	Melampaui batas usia kendaraan, perijinan di OSS belum terverifikasi, jaringan trayek tidak tersedia, dampak covid menyebabkan perusahaan belum bisa melakukan peremajaan	Pengeluaran untuk biaya transportasi masyarakat meningkat			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Trayek Angkutan Jalan	Menurunnya izin penyelenggaraan AODT yang diterbitkan	6	pendapatan pengusaha angkutan umum tidak sebanding dengan biaya operasional kendaraan	kualitas pelayanan angkutan umum menurun			
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase angkutan taksi terpenuhi□	Terdapat Angkutan Taksi (Taksi, AJDP,ASK) yang melampaui batas usia kendaraan	6	Perusahaan belum bisa melakukan peremajaan	Terdapat kendaraan Taksi (Taksi, AJDP,ASK) yang tidak perpanjangan izin			
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase angkutan barang yang berijin	Terdapat Angkutan Barang Umum yang belum berizin	6	Kurangnya sosialisasi terhadap PP 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko	Terdapat kendaraan Angkutan Barang Umum yang belum terverifikasi di OSS			
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase Angkutan Orang Dalam Trayek yang berijin	menurunnya izin penyelenggaraan AODT yang diterbitkan	6	pendapatan pengusaha angkutan umum tidak sebanding dengan biaya operasional kendaraan	kualitas pelayanan angkutan umum menurun			

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase Trayek yang Ditetapkan Pemutakhiran Tarif	Tayek yang dilapangan tidak sesuai dengan akhir trayek (berhenti di pertengahan trayek)	2	berkurangnya jumlah penumpang dan biaya operasional tinggi jika sampai titik akhir trayek	Hasil survey tarif kurang optimal			
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase jaringan trayek pedesaan antar kabupaten kota dalam provinsi yang ditetapkan	Terdapat kawasan pedesaan antar kabupaten kota dalam provinsi belum terlayani jaringan <u>trayek pedesaan</u>	9	Belum semua jaringan trayek pedesaan tersusun perencanaannya	Masyarakat pedesaan tidak mendapatkan pelayanan transportasi			
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase Kawasan perkotaan yang memiliki rencana layanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terdapat kawasan perkotaan antar kabupaten kota dalam provinsi belum terlayani jaringan trayek perkotaan	9	Belum semua jaringan trayek perkotaan tersusun perencanaannya	Pengeluaran biaya transportasi masyarakat meningkat			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan <u>angkutan umum</u>	Menurunnya jumlah penumpang angkutan umum ada masa angkutan lebaran dan nataru	9	pengguna kendaraan pribadi lebih banyak dan terjadi kenaikan harga tiket	meningkatnya resiko terjadinya kemacetan dan terjadinya inflasi			
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani	Menurunnya jumlah penumpang angkutan umum pada masa angkutan lebaran, natal dan tahun baru (<u>nataru</u>)	9	pengguna kendaraan pribadi lebih banyak	meningkatnya resiko terjadinya kemacetan			

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase kunjungan Bus pada terminal tipe B	terjadinya penyalahgunaan pemanfaatan terminal	4	Penyewa aset melakukan perubahan sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya	Mengganggu kegiatan operasional terminal			
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Presentase Keterpenuhihan SPM Terminal Tipe B	Belum terpenuhinya standart pelayanan minimal penyelenggaraan terminal tipe B	12	Peningkatan standar pelayanan minimal dikarenakan adanya prioritas pengembangan terminal	Rendahnya kepuasan masyarakat akibat masih adanya terminal penumpang tipe B yang kondisinya belum optimal	Melakukan identifikasi, evaluasi dan peningkatan standar pelayanan minimal terminal penumpang tipe B berdasarkan prioritas	Kepala bidang jaringan transportasi dan perkeretaapian	12 bulan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	Kurangnya jumlah simpul dan jaringan yang ditingkatkan	6	Proses Penyerahan aset yang belum selesai	Masyarakat tidak mendapat layanan simpul transportasi yang memadai			
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Persentase implementasi dokumen RIJLLAJ	Kurangnya jumlah simpul dan jaringan yang ditingkatkan	6	Proses Penyerahan aset yang belum selesai	Masyarakat tidak mendapat layanan simpul transportasi yang memadai			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pengunjung terminal tipe B pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Kurangnya minat masyarakat menggunakan transportasi umum di terminal	3	1. Penumpang masih memilih angkutan yang bisa menjemput dan mengantarkan sampai lokasi tujuan atau tetap memilih menggunakan kendaraan pribadi 2. Lokasi terminal tidak strategis sehingga bus tidak masuk ke dalam terminal	Tidak berfungsinya fungsi terminal sebagai simpul transportasi	Menumbuhkan minat masyarakat menggunakan transportasi umum di terminal	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I	12 Bulan

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Presentase terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I	Belum terpenuhinya standart pelayanan penyelenggaraan terminal tipe B Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	2	Belum optimalnya rehabilitasi Fasilitas Utama dan Pendukung terminal	Rendahnya kepuasan masyarakat akibat masih adanya terminal tipe B yang kondisinya kurang baik	Mengoptimalkan Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Tipe B dengan melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan terminal	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I	12 Bulan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B)	masih belum terpenuhi kebutuhan tingkat pelayanan umum dan keuangan	2	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Pelaksanaan layanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan administrasi kepegawaian mengalami keterlambatan	Memberikan pembinaan dan pengarahan kepada staf Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah II		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Penyusunan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN mengalami keterlambatan	6	Pelaksanaan kegiatan berjalan tidak sesuai dengan jadwal waktu yang sudah direncanakan	Terjadi deviasi pelaksanaan kegiatan	Melakukan monitoring pelaksanaan setiap kegiatan supaya tidak terjadi keterlambatan		
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pengunjung terminal tipe B pada Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Kurangnya minat masyarakat menggunakan transportasi umum di terminal	3	1. Penumpang masih memilih angkutan yang bisa menjemput dan mengantarkan sampai lokasi tujuan atau tetap memilih menggunakan kendaraan pribadi 2. Lokasi terminal tidak strategis sehingga bus tidak masuk ke dalam terminal	Tidak berfungsinya fungsi terminal sebagai simpul transportasi			

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Presentase terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III	Belum terpenuhinya standart pelayanan penyelenggaraan terminal tipe B Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	9	Belum optimalnya rehabilitasi Fasilitas Utama dan Pendukung terminal	Rendahnya kepuasan masyarakat akibat masih adanya terminal tipe B yang kondisinya kurang baik			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pengunjung terminal tipe B pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Kurangnya minat masyarakat menggunakan transportasi umum di terminal	3	1. Penumpang masih memilih angkutan yang bisa menjemput dan mengantarkan sampai lokasi tujuan atau tetap memilih menggunakan kendaraan pribadi 2. Lokasi terminal tidak strategis sehingga bus tidak masuk ke dalam terminal	Tidak berfungsinya fungsi terminal sebagai simpul transportasi			
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Presentase terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV	Belum terpenuhinya standart pelayanan penyelenggaraan terminal tipe B Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	2	Belum optimalnya rehabilitasi Fasilitas Utama dan Pendukung terminal	Rendahnya kepuasan masyarakat akibat masih adanya terminal tipe B yang kondisinya kurang baik			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pengunjung terminal tipe B pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Kurangnya minat masyarakat menggunakan transportasi umum di terminal	3	1. Penumpang masih memilih angkutan yang bisa menjemput dan mengantarkan sampai lokasi tujuan atau tetap memilih menggunakan kendaraan pribadi 2. Lokasi terminal tidak strategis sehingga bus tidak masuk ke dalam terminal	Tidak berfungsinya fungsi terminal sebagai simpul transportasi			

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Presentase terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V	Belum terpenuhinya standart pelayanan penyelenggaraan Terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	2	Belum optimalnya rehabilitasi fasilitas utama dan pendukung	Rendahnya kepuasan masyarakat akibat masih adanya Terminal Tipe B yang kondisinya kurang baik			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pengunjung terminal tipe B pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Berkurangnya minat masyarakat menggunakan transportasi umum di terminal	1	1. Penumpang masih memilih angkutan yang bisa menjemput dan mengantarkan sampai lokasi tujuan atau tetap memilih menggunakan kendaraan pribadi 2. Lokasi terminal tidak strategis sehingga bus tidak masuk ke dalam terminal	Tidak berfungsinya fungsi terminal sebagai simpul transportasi	Merehabilitasi Fasilitas Utama dan Fasilitas Pendukung Terminal	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI	12 bulan
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Presentase terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI	Belum terpenuhinya Fasilitas Utama dan Pendukung terminal tipe B sesuai ketentuan perundang-undangan	4	Belum optimalnya rehabilitasi Fasilitas Utama dan Pendukung terminal	Rendahnya kepuasan masyarakat akibat masih adanya terminal tipe B yang kondisinya kurang baik	Merehabilitasi Fasilitas Utama dan Fasilitas Pendukung Terminal	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI	12 bulan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum (Trans Jateng)	Terdapat titik lokasi yang potensial jumlah penumpangnya namun belum ada Tempat Pemberhentian Bus (TPB)	6	Masih terdapat resistensi angkutan eksisting yang melayani rute tersebut terhadap lokasi-lokasi yang mempunyai potensi penumpang	Penumpang trans jateng pada lokasi tersebut harus berjalan kaki atau diantar untuk menuju halte terdekat karena Trans Jateng menaikan/menurunkan penumpang pada Tempat Pemberhentian Bus (TPB)			

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyediaan Perlengkapan Jalan di JalanProvinsi	Persentase Jumlah Tempat Perhentian Bus (TPB) Terpenuhi	Spesifikasi teknis yang sesuai DED tidak sesuai kondisi lapangan akibat penolakan	6	Terjadi penolakan dari masyarakat karena merasa terganggu adanya Tempat Pemberhentian Bus (TPB)	Terjadi perbedaan dalam DED dengan kondisi di lapangan			
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) DaerahProvinsi	Jumlah penumpang terlayani angkutan umum (Trans Jateng) di kawasan aglomerasi perkotaan	Adanya rute yang terlayani dibawah kondisi ideal nilai load factor penumpangnya	12	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap rute baru, lokasi halte atau TPB yang kurang ideal, atau rute yang dilalui memang bukan wilayah yang padat atau ramai dengan penumpang	Layanan menjadi kurang efektif dan bermanfaat karena jumlah penumpang yang sedikit	Melakukan sosialisasi langsung terhadap masyarakat terhadap rute baru, lokasi halte dan membangun TPB yang potensial banyak calon penumpang	Kepala Balai Transportasi Jawa Tengah	12 Bulan
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP	Menurunnya tingkat Keamanan dan keselamatan transportasi laut dan ASDP	9	Transportasi laut dan ASDP tidak memenuhi kelaiklautan kapal	Jaminan keamanan dan keselamatan transportasi laut dan ASDP tidak terpenuhi			
Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Persentase dokumen terlengkapi sebagai persyaratan ijin trayek berdasarkan tingkatannya	Trayek penyeberangan ASDP belum semuanya ditetapkan	1	Terdapat persyaratan penerbitan ijin trayek yang belum terpenuhi	Tidak adanya penyeberangan yang dapat melayani masyarakat			
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelabuhan SDP terpenuhi	Penyelenggaraan ASDP tidak dapat berjalan maksimal	1	Kondisi sarana dan prasarana di Dermaga ASDP belum memenuhi SPM	Sarana dan prasarana penyeberangan tidak mendukung keamanan dan kenyamanan pengguna penyeberangan			

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang diawasi	Terkendalanya legalitas perizinan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	9	Kurangnya pemahaman dan sosialisasi kepada pelaku usaha yang akan melakukan perizinan berusaha	Terhambatnya para pelaku usaha dalam melakukan perizinan usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas			
Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang diawasi	Kegiatan usaha yang dijalankan pelaku usaha tidak sesuai dengan perizinan berusahnya	10	Sertifikat standar dengan tingkat risiko menengah rendah perizinannya terbit tanpa melalui verifikasi	Penyalahgunaan perizinan berusaha	Melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang perizinan berusahnya terbit otomatis	Kepala Bidang Pelayaran	12 Bulan
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Berth occupancy ratio	Menurunnya tingkat kunjungan kapal akibat kinerja pelabuhan yang menurun	4	Tidak optimalnya pemeliharaan dan pemenuhan fasilitas pelabuhan pada pelabuhan pengumpan regional	Menurunnya produktifitas pelabuhan pengumpan regional	Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional di Jawa Tengah	Kepala Bidang Pelayaran	12 Bulan

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan provinsi	Ruas jalan belum terpenuhi kebutuhan minimalnya	12	jumlah pemasangan fasilitas perlengkapan jalan tidak sesuai target	tidak tercapainya target pemasangan perlengkapan jalan	1. Pada setiap pelaksanaan dan monitoring kegiatan dilakukan pengecekan data kondisi lapangan untuk kebutuhan updating data kondisi perlengkapan jalan yang di input di GIS Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Menampung, menginventarisir, memetakan, dan membuat skala prioritas pemasangan perlengkapan jalan berdasarkan surat permohonan pemasangan perlengkapan jalan yang dikirimkan oleh Kabupaten/Kota; 3. Melaksanakan survey untuk menentukan titik lokasi pemasangan perlengkapan jalan	Kepala Bidang Lalu Lintas	12 Bulan

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi penilaian pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Provinsi Jateng	Belum seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota berpartisipasi dalam penilaian lomba tertib lalu lintas (Wahana Tata Nugraha)	4	Kurangnya antusiasme pemerintah Kab/Kota untuk mengikuti lomba tertib lalu lintas Wahana Tata Nugraha	Belum optimalnya sistem transportasi di kota/kabupaten terkait dengan manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan umum	Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi dengan Dinas Perhubungan Kab/Kota terkait kesiapan mengikuti lomba tertib lalu lintas Wahana Tata Nugraha	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan	12 Bulan
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Rekomendasi hasil forum LLAJ	Rekomendasi Forum LLAJ atas permasalahan belum mampu menjawab rencana aksi yang telah disusun	6	Terdapat OPD yang belum menjalankan hasil rekomendasi Forum LLAJ	Tidak tertanganinya Daerah Rawan Kecelakaan	1. Pemuktahiran Data Daerah Rawan Kecelakaan 2. Melakukan Forum LLAJ secara Berkala 3. Melakukan Monev terhadap Daerah Rawan Kecelakaan	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan	12 Bulan
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Persentase tingkat kepatuhan pelaksanaan rekomendasi andalalin	Terdapat Pembangun/Pengembang pusat kegiatan belum melaksanakan kewajiban penanganan dampak lalu lintas yang tertuang dalam Persetujuan Teknis Andalalin	4	Dokumen Andalalin hanya merupakan salah satu syarat izin mendirikan bangunan	Timbulnya dampak lalu lintas (kemacetan & kecelakaan) akibat pembangunan/pengembangan pusat kegiatan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kewajiban penanganan dampak lalu lintas yang tertuang dalam Persetujuan Teknis Andalalin	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan	12 Bulan

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyediaan Perlengkapan Jalan di JalanProvinsi	Persentase perlengkapan jalan terpenuhi	Jumlah perlengkapan jalan terpasang belum dapat memenuhi prioritas lokasi yang memerlukan pemasangan perlengkapan jalan di Jalan Provinsi Jawa Tengah	12	Terdapat usulan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan provinsi yang sifatnya mendesak yang belum masuk dalam perencanaan	Dengan tidak terpenuhinya kebutuhan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan maka tingkat keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal serta peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah tidak dapat tercapai.	1. Pada setiap pelaksanaan dan monitoring kegiatan dilakukan pengecekan data kondisi lapangan untuk kebutuhan updating data kondisi perlengkapan jalan yang di input di GIS Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Menampung, menginventarisir, memetakan, dan membuat skala prioritas pemasangan perlengkapan jalan berdasarkan surat permohonan pemasangan perlengkapan jalan yang dikirimkan oleh Kabupaten/Kota; 3. Melaksanakan survey untuk menentukan titik lokasi pemasangan perlengkapan jalan	Kepala Bidang Lalu Lintas	12 Bulan

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Presentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Meningkatnya tingkat frekuensi dan resiko di Lokasi Daerah Rawan Kecelakaan	12	Fasilitas Perlengkapan Jalan Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan belum optimal	Bertambahnya korban kecelakaan dengan tingkat Fatalitas tinggi	Memastikan fasilitas perlengkapan jalan tetap berfungsi sebagaimana mestinya	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I	12 bulan setiap tahun
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Surat pemberitahuan perbaikan dan pemberitahuan untuk tertib administrasi tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan	8	Perusahaan tidak memperhatikan surat pemberitahuan karena faktor ekonomi yang tidak mumpuni untuk mengganti komponen kendaraan yang sudah tidak laik	Tidak ada perbaikan dari pihak perusahaan terhadap kendaraan yang beroperasi sehingga kendaraan yang beroperasi tetap dalam kondisi kurang laik jalan dan tidak tertib administrasi	Memberikan Penyuluhan dan Sosialisasi terhadap pelaku usaha bidang angkutan umum di wilayah kerja BPSPP Wilayah I	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I	12 Bulan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Kurang maksimalnya pengelolaan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	2	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Pengelolaan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian kurang maksimal	Memberikan pembinaan kepada staf Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Jumlah kebutuhan Belanja Administrasi Umum Perangkat Daerah belum memenuhi prioritas	4	Adanya perubahan harga pada saat pelaksanaan kegiatan	Paket belanja administrasi umum yang disediakan terbatas	Melakukan efiseinsi dan efektifitas penggunaannya		

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Presentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Meningkatnya tingkat frekuensi dan resiko di Lokasi Daerah Rawan Kecelakaan	12	Fasilitas Perlengkapan Jalan Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan belum optimal	Bertambahnya korban kecelakaan dengan tingkat Fatalitas tinggi	Memastikan Fasilitas Perlengkapan Jalan tetap berfungsi sebagaimana mestinya	Kepala BPSPP Wilayah III	12 Bulan setiap tahun
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi Daerah Rawan Kecelakaan belum dapat memenuhi prioritas lokasi yang memerlukan pemasangan perlengkapan jalan di Jalan Provinsi Jawa Tengah	12	Keterbatasan ruang milik jalan dan faktor penunjang pada pemasangan perlengkapan jalan	Meningkatnya jumlah fatalitas kecelakaan	Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan secara bertahap dan berdasarkan prioritas	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III	12 bulan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Presentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Meningkatnya tingkat frekuensi dan resiko di Lokasi Daerah Rawan Kecelakaan	12	Fasilitas Perlengkapan Jalan Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan belum optimal	Bertambahnya korban kecelakaan dengan tingkat Fatalitas tinggi	Memastikan fasilitas perlengkapan jalan tetap berfungsi sebagaimana mestinya	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV	12 Bulan

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi Daerah Rawan Kecelakaan belum dapat memenuhi prioritas lokasi yang memerlukan pemasangan perlengkapan jalan di Jalan Provinsi Jawa Tengah	12	Keterbatasan ruang milik jalan dan faktor penunjang pada pemasangan perlengkapan jalan	Belum idealnya pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi DRK	Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan secara bertahap dan berdasarkan prioritas	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV	12 Bulan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Presentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Meningkatnya tingkat frekuensi dan resiko di Lokasi Daerah Rawan Kecelakaan	12	Fasilitas Perlengkapan Jalan Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan belum optimal	Bertambahnya korban kecelakaan dengan tingkat fatalitas tinggi	Memastikan fasilitas perlengkapan jalan tetap berfungsi sebagaimana mestinya	Kepala BPSPPP Wilayah V	12 bulan setiap tahun
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi Daerah Rawan Kecelakaan belum dapat memenuhi prioritas lokasi yang memerlukan pemasangan perlengkapan jalan di Jalan Provinsi Jawa Tengah	12	Keterbatasan ruang milik jalan dan faktor penunjang pada pemasangan perlengkapan jalan	Belum idealnya pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi DRK	Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan secara bertahap dan berdasarkan prioritas	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V	12 Bulan

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Presentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Meningkatnya tingkat frekuensi dan resiko di Lokasi Daerah Rawan Kecelakaan	12	Fasilitas Perlengkapan Jalan Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan belum optimal	Bertambahnya korban kecelakaan dengan tingkat Fatalitas tinggi	Memastikan fasilitas perlengkapan jalan tetap berfungsi sebagaimana mestinya	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI	12 bulan
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi Daerah Rawan Kecelakaan belum dapat memenuhi prioritas lokasi yang memerlukan pemasangan perlengkapan jalan di Jalan Provinsi Jawa Tengah	12	Keterbatasan ruang milik jalan dan faktor penunjang pada pemasangan perlengkapan jalan	Belum idealnya pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi DRK	Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan secara bertahap dan berdasarkan prioritas	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI	12 Bulan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Presentase kendaraan laik jalan di jawa tengah	Banyaknya perusahaan karoseri yang belum menerapkan Standart Manajemen Keselamatan	6	Belum terinfonya peraturan terbaru tentang Standart Manajemen Keselamatan	Peningkatan kecelakaan disebabkan karena kendaraan tidak memenuhi standart laik jalan			
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji berkala di jawa tengah	Terdapat Kendaraan Wajib Uji yang tidak lolos Uji Berkala	4	Kendaraan tidak sesuai Spesifikasi teknis (dimensi dan kelaikan kendaraan)	terjadi kecelakaan lalu lintas akibat overdimensi dan tidak laik jalan			

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Terdapat Kendaraan Yang Beroperasi Dalam Kondisi Tidak Laik Jalan pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wiayah I	4	Perusahaan atau Pemilik Kendaraan Angkutan Umum Yang Beroperasi Tidak mematuhi ketentuan standar kondisi kendaraan yang laik jalan sesuai peraturan perundang - undangan	Rendahnya jumlah angkutan yang beroperasi dalam kondisi laik jalan	Melaksanakan Rampcheck di terminal Tipe B Wilayah Kerja BPSPP Wilayah I dan melaporkan kegiatan berupa rekap kegiatan bulanan kepada Bidang Terkait	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I	12 Bulan
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi Daerah Rawan Kecelakaan belum dapat memenuhi prioritas lokasi yang memerlukan pemasangan perlengkapan jalan di Jalan Provinsi Jawa Tengah	12	Keterbatasan ruang milik jalan dan faktor penunjang pada pemasangan perlengkapan jalan	Belum idealnya pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi DRK	Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan secara bertahap dan berdasarkan prioritas	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I	12 Bulan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Terdapat penyesuaian Perda Pemerintahan Kabupaten/Kota yang menyebabkan perubahan tarif pembayaran retribusi persampahan berubah	1	Pengenaan tarif retribusi pelayanan persampahan sesuai dengan Perda terkait Retribusi Persampahan pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Bila terjadi perubahan Perda terkait pelaksanaan Retribusi Persampahan yang menetapkan adanya kenaikan tarif retribusi maka perlu diupayakan adanya penyesuaian	Melakukan Koordinasi Dengan Instansi Terkait		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Gedung kantor dan bangunan lainnya serta sarana dan prasarananya masih kurang terawat	6	Pada saat pelaksanaan kegiatan terjadi perubahan harga dibandingkan pada saat penyusunan anggaran	Pemeliharaan yang dilaksanakan tidak dilakukan secara menyeluruh tetapi menyesuaikan ketersediaan anggaran yang ada	Memaksimalkan anggaran yang ada dengan melaksanakan rehabilitasi pada titik/ lokasi dengan skala prioritas		

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Surat pemberitahuan perbaikan dan pemberitahuan untuk tertib administrasi tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan	8	Perusahaan tidak memperhatikan surat pemberitahuan karena faktor ekonomi yang tidak mumpuni untuk mengganti komponen kendaraan yang sudah tidak laik	Tidak ada perbaikan dari pihak perusahaan terhadap kendaraan yang beroperasi sehingga kendaraan yang beroperasi tetap dalam kondisi kurang laik jalan dan tidak tertib administrasi			
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Terdapat Kendaraan Yang Beroperasi Dalam Kondisi Tidak Laik Jalan pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wiayah III	6	Perusahaan atau Pemilik Kendaraan Angkutan Umum Yang Beroperasi Tidak mematuhi ketentuan standar kondisi kendaraan yang laik jalan sesuai peraturan perundang - undangan	Rendahnya jumlah angkutan yang beroperasi dalam kondisi laik jalan			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Surat pemberitahuan perbaikan dan pemberitahuan untuk tertib administrasi tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan	8	Perusahaan tidak memperhatikan surat pemberitahuan karena faktor ekonomi yang tidak mumpuni untuk mengganti komponen kendaraan yang sudah tidak laik	Tidak ada perbaikan dari pihak perusahaan terhadap kendaraan yang beroperasi sehingga kendaraan yang beroperasi tetap dalam kondisi kurang laik jalan dan tidak tertib administrasi			
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Terdapat Kendaraan Yang Beroperasi Dalam Kondisi Tidak Laik Jalan pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wiayah IV	4	Perusahaan atau Pemilik Kendaraan Angkutan Umum Yang Beroperasi Tidak mematuhi ketentuan standar kondisi kendaraan yang laik jalan sesuai peraturan perundang - undangan	Rendahnya jumlah angkutan yang beroperasi dalam kondisi laik jalan			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Surat pemberitahuan perbaikan dan pemberitahuan untuk tertib administrasi tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan	8	Perusahaan tidak memperhatikan surat pemberitahuan karena faktor ekonomi yang tidak mumpuni untuk mengganti komponen kendaraan yang sudah tidak laik	Tidak ada perbaikan dari pihak perusahaan terhadap kendaraan yang beroperasi sehingga kendaraan yang beroperasi tetap dalam kondisi kurang laik jalan dan tidak tertib administrasi			

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Terdapat kendaraan yang beroperasi dalam kondisi tidak laik jalan pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wiayah V	4	Perusahaan atau pemilik kendaraan angkutan umum yang beroperasi tidak mematuhi ketentuan standar kondisi kendaraan yang laik jalan sesuai peraturan perundang - undangan	Rendahnya jumlah angkutan yang beroperasi dalam kondisi laik jalan			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilavah VI Kelas A	Surat pemberitahuan perbaikan dan pemberitahuan untuk tertib administrasi tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan	1	Perusahaan tidak memperhatikan surat pemberitahuan karena faktor ekonomi yang tidak mumpuni untuk mengganti komponen kendaraan yang sudah tidak laik	Tidak ada perbaikan dari pihak perusahaan terhadap kendaraan yang beroperasi sehingga kendaraan yang beroperasi tetap dalam kondisi kurang laik jalan dan tidak tertib administrasi	Mendatangi serta melakukan pembinaan kepada perusahaan angkutan umum yang melanggar persyaratan teknis dan laik jalan	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI	12 Bulan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A)□	Masih belum terpenuhi kebutuhan tingkat pelayanan umum dan keuangan	2	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Pelaksanaan layanan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan dan administrasi kepegawaian mengalami keterlambatan			
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	Jumlah perlengkapan jalan terpasang di perlintasan sebidang KA belum dapat memenuhi prioritas lokasi yang memerlukan pemasangan perlengkapan jalan	12	Terdapat usulan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan provinsi yang sifatnya mendesak yang belum masuk dalam perencanaan	Dengan tidak terpenuhinya kebutuhan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan maka tingkat keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Pedoman Teknis Pengendalian Lalu Lintas pada lokasi potensi kecelakaan perlintasan sebidang tidak dapat tercapai	Melaksanakan survey untuk menentukan titik lokasi pemasangan perlengkapan jalan sesuai skala prioritas	Kepala Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	12 bulan setiap tahun
Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Persentase realisasi rencana induk perkeretaapian	Kurang optimalnya keselamatan di perlintasan sebidang KA	9	Alih status ruas jalan	Tidak tersedianya fasilitas keselamatan perlintasan KA			

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	Tingkat kinerja belum dilaporkan tepat waktu	6	belum adanya sistem pelaporan data yang memadai	dokumen yang tersusun belum bisa dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber data			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi tidak tepat waktu	6	Terdapat data dukung dan data teknis yang belum memadai	Terhambatnya proses perencanaan dan penganggaran sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Sekretariat) □	Pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak efektif dan efisien	6	Dokumen dan data dukung belum tersedia	Kegiatan perkantoran tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga mengganggu pelayanan masyarakat			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Administrasi keuangan tidak berjalan secara efisien	3	Dokumen dan data dukung yang memadai belum tersedia	Kegiatan administrasi keuangan tidak berjalan sebagaimana mestinya			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen pencairan yang diajukan berpotensi tidak lengkap/tidak benar	10	Adanya tekanan kepentingan	Menyebabkan biasanya fungsi verifikasi	Adanya penetapan sanksi	Subbag Keuangan	12 bulan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Proses klaim Asuransi sulit dilakukan	6	Data dukung Klaim asuransi tidak lengkap	Klaim asuransi tidak dapat dilakukan			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Pelaksanaan Kegiatan tidak terjadwal	4	Jadwal pelaksanaan kegiatan tidak dibuat sehingga kegiatan tidak berjalan maksimal	Kegiatan tidak dilaksanakan secara maksimal			

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Penyediaan tidak tepat waktu	6	Belum dibentuk penanggung jawab kegiatan	Penyediaan terlambat			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Penyediaan tidak tepat waktu	4	Belum dibentuk penanggung jawab kegiatan	Penyediaan terlambat			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Penyediaan tidak tepat waktu	4	Belum dibentuk penanggung jawab kegiatan	Penyediaan terlambat			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Menurunnya kinerja (kerusakan) sarana dan prasarana pemerintahan	4	Kurang optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan	Menurunnya kinerja aparatur pemerintahan			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A)□	Tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah belum optimal	2	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Pelaksanaan layanan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan dan administrasi kepegawaian mengalami keterlambatan	Memberikan Pengarahan, Pembinaan dan Pengawasan kepada seluruh staf Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I	March 2026
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Penyusunan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN mengalami keterlambatan	2	Kecepatan penyelesaian laporan SPJ tidak sama	Dokumen administrasi pelaksanaan keuangan perangkat daerah mengalami keterlambatan	Melaksanakan Monitoring dan Mengevaluasi Penyusunan dokumen administrasi agar tidak terjadi keterlambatan	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I	June 2026

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah belum optimal	2	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Pengelolaan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian kurang maksimal	Memberikan Pembinaan kepada Staf Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah I	Kepala Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah I	June 2026
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Layanan administrasi umum perangkat daerah belum optimal	2	Adanya perubahan harga pada saat pelaksanaan kegiatan	Memenuhi layanan administrasi umum menggunakan skala prioritas	Melakukan Efisiensi dan Efektivitas sesuai anggaran yang tersedia	Kepala Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah I	June 2026
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Penyusunan laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah belum optimal	2	Pengenaan tarif retribusi pelayanan persampahan sesuai dengan Perda terkait Retribusi Persampahan pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Bila terjadi perubahan Perda terkait pelaksanaan Retribusi Persampahan yang menetapkan adanya kenaikan tarif retribusi maka perlu diupayakan adanya penyesuaian	Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Instansi Terkait	Kepala Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah I	March 2026
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Gedung kantor dan bangunan lainnya serta sarana dan prasarananya masih kurang terawat.	2	Pada saat pelaksanaan kegiatan terjadi perubahan harga	Pemeliharaan yang dilaksanakan tidak dilakukan secara menyeluruh	Memaksimalkan Anggaran yang ada dengan Melaksanakan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kepala Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah I	March 2026
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Penyusunan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN mengalami keterlambatan	2	Pelaksanaan kegiatan berjalan tidak sesuai dengan jadwal waktu yang sudah direncanakan	Terjadi deviasi pelaksanaan kegiatan			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Kurang maksimalnya pengelolaan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	4	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Terhambatnya layanan administrasi kepegawaian			

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Jumlah kebutuhan Belanja Administrasi Umum Perangkat Daerah belum memenuhi prioritas	2	Adanya perubahan harga pada saat pelaksanaan kegiatan	Paket belanja administrasi umum yang disediakan terbatas			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Terdapat penyesuaian Perda Pemerintahan Kabupaten/Kota yang menyebabkan perubahan tarif pembayaran retribusi persampahan berubah	4	Pengenaan tarif retribusi pelayanan persampahan sesuai dengan Perda terkait Retribusi Persampahan pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Bila terjadi perubahan Perda terkait pelaksanaan Retribusi Persampahan yang menetapkan adanya kenaikan tarif retribusi maka perlu diupayakan adanya penyesuaian			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Gedung kantor dan bangunan lainnya serta sarana dan prasarannya masih kurang terawat.	4	Pada saat pelaksanaan kegiatan terjadi perubahan harga dibandingkan pada saat penyusunan anggaran.	Menurunnya kinerja aparatur pemerintahan			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pengunjung terminal tipe B pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Kurangnya minat masyarakat menggunakan transportasi umum di terminal	6	1. Kondisi fasilitas Terminal kurang memadai 2. Tidak ada daya tarik menuju terminal selain untuk mendapatkan Angkutan Umum 3. rendahnya kunjungan bus masuk terminal	Tidak berfungsinya fungsi terminal sebagai simpul transportasi dan ruang ekonomi	mempertahankan fungsi fasilitas Terminal (utama dan Penunjang) untuk memberikan kenyamanan serta menyediakan ruang ekonomi bagi bagi pengunjung dan masyarakat	Kepala BPSPP Wilayah II	12 Bulan

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Presentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Meningkatnya tingkat frekuensi dan resiko di Lokasi Daerah Rawan Kecelakaan	12	Perlengkapan Jalan yang dipasang tidak sesuai dengan rekomendasi	Bertambahnya korban kecelakaan dengan tingkat Fatalitas tinggi	Survey Inventarisasi kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan sesuai dengan sebab kecelakaan	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II	12 bulan setiap tahun
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Surat pemberitahuan perbaikan dan pemberitahuan untuk tertib administrasi tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan	6	1. Tidak adanya pengawasan dan penindakan di Jalan 2. rendahnya kemampuan pengusaha untuk pemeliharaan armada	meningkatnya jumlah kecelakaan Angkutan Penumpang Umum akibat tidak laik jalan	Pembinaan Kepada Perusahaan Angkutan Umum	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	12 Bulan
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Presentase terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II	Menurunnya kepuasan masyarakat terhadap Sarana Prasarana di Terminal	1	Belum optimalnya rehabilitasi Fasilitas Utama dan Pendukung terminal	berhentinya layanan Terminal akibat kerusakan fasilitas Terminal	Pemeliharaan Bangunan Gedung dan kantor Terminal Gagak Rimang	Kepala BPSPP Wilayah II	12 Bulan
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Terdapat Kendaraan Yang Beroperasi Dalam Kondisi Tidak Laik Jalan pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wiayah II	1	Perusahaan atau Pemilik Kendaraan Angkutan Umum Yang Beroperasi Tidak mematuhi ketentuan standar kondisi kendaraan yang laik jalan sesuai peraturan perundang - undangan	Menurunnya Jumlah Angkutan Umum yang berijin	Pembinaan Kepada Perusahaan Angkutan Umum	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	12 Bulan

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Kondisi lokasi DRK tidak dapat direhabilitasi	12	Keterbatasan ruang milik jalan dan faktor penunjang pada pemasangan perlengkapan jalan	Meningkatnya frekuensi resiko kecelakaan di lokasi tersebut	Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan secara bertahap dan berdasarkan prioritas	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	12 Bulan
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Terdapat Kendaraan Yang Beroperasi Dalam Kondisi Tidak Laik Jalan pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wiayah VI	1	Perusahaan atau Pemilik Kendaraan Angkutan Umum Yang Beroperasi Tidak mematuhi ketentuan standar kondisi kendaraan yang laik jalan sesuai peraturan perundang - undangan	Rendahnya jumlah angkutan yang beroperasi dalam kondisi laik jalan	Mengirimkan Surat Pemberitahuan Hasil Rampcheck kepada Perusahaan Angkutan Umum yang Kendaraannya tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasana Perhubungan Wilayah VI	12 Bulan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A)□	Masih belum terpenuhi kebutuhan tingkat pelayanan umum dan keuangan	2	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas	Pelaksanaan layanan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan dan administrasi kepegawaian mengalami keterlambatan,			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Penyusunan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN mengalami keterlambatan	2	Pelaksanaan kegiatan berjalan tidak sesuai dengan jadwal waktu yang sudah direncanakan	Terjadi deviasi pelaksanaan kegiatan			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Kurang maksimalnya pengelolaan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	2	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Pengelolaan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian kurang maksimal			

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Jumlah kebutuhan Belanja Administrasi Umum Perangkat Daerah belum memenuhi prioritas	2	Adanya perubahan harga pada saat pelaksanaan kegiatan	Paket belanja administrasi umum yang disediakan terbatas			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Terdapat penyesuaian Perda Pemerintahan Kabupaten/Kota yang menyebabkan perubahan tarif pembayaran retribusi persampahan berubah.	2	Pengenaan tarif retribusi pelayanan persampahan sesuai dengan Perda terkait Retribusi Persampahan pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Bila terjadi perubahan Perda terkait pelaksanaan Retribusi Persampahan yang menetapkan adanya kenaikan tarif retribusi maka perlu diupayakan adanya penyesuaian			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Gedung kantor dan bangunan lainnya serta sarana dan prasarannya masih kurang terawat.	2	Pada saat pelaksanaan kegiatan terjadi perubahan harga dibandingkan pada saat penyusunan anggaran.	Pemeliharaan yang dilaksanakan tidak dilakukan secara menyeluruh tetapi menyesuaikan ketersediaan anggaran yang ada			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B)□	masih belum terpenuhinya kebutuhan tingkat pelayanan umum dan keuangan	2	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Pelaksanaan layanan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan dan administrasi kepegawaian mengalami keterlambatan			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Penyusunan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN mengalami keterlambatan	2	Pelaksanaan kegiatan berjalan tidak sesuai dengan jadwal waktu yang sudah direncanakan	Terjadi deviasi pelaksanaan kegiatan			

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Kurang maksimalnya pengelolaan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	2	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Pengelolaan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian kurang maksimal			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Jumlah kebutuhan Belanja Administrasi Umum Perangkat Daerah belum memenuhi prioritas	2	Adanya perubahan harga pada saat pelaksanaan kegiatan	akut belanja administrasi umum yang disediakan terbatas			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Terdapat penyesuaian Perda Pemerintahan Kabupaten/Kota yang menyebabkan perubahan tarif pembayaran retribusi persampahan berubah	2	Pengenaan tarif retribusi pelayanan persampahan sesuai dengan Perda terkait Retribusi Persampahan pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Bila terjadi perubahan Perda terkait pelaksanaan Retribusi Persampahan yang menetapkan adanya kenaikan tarif retribusi maka perlu diupayakan adanya penyesuaian			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Gedung kantor dan bangunan lainnya serta sarana dan prasarananya masih kurang terawat	2	Pada saat pelaksanaan kegiatan terjadi perubahan harga dibandingkan pada saat penyusunan anggaran	Pemeliharaan yang dilaksanakan tidak dilakukan secara menyeluruh tetapi menyesuaikan ketersediaan anggaran yang ada			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A)□	Masih belum terpenuhi kebutuhan tingkat pelayanan umum dan keuangan	1	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Pelaksanaan layanan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan dan administrasi kepegawaian mengalami keterlambatan,	Memberikan pembinaan dan pengarahan kepada staf Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI	12 Bulan

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Penyusunan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN mengalami keterlambatan	1	Pelaksanaan kegiatan berjalan tidak sesuai dengan jadwal waktu yang sudah direncanakan	Terjadi deviasi pelaksanaan kegiatan	Melakukan monitoring pelaksanaan setiap kegiatan supaya tidak terjadi keterlambatan	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasana Perhubungan Wilayah VI	12 Bulan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Kurang maksimalnya pengelolaan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Pengelolaan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian kurang maksimal	Memberikan pembinaan kepada staf Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasana Perhubungan Wilayah VI	12 Bulan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Jumlah kebutuhan Belanja Administrasi Umum Perangkat Daerah belum memenuhi prioritas	1	Adanya perubahan harga pada saat pelaksanaan kegiatan	Paket belanja administrasi umum yang disediakan terbatas	Melakukan efiseinsi dan efektifitas penggunaannya	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasana Perhubungan Wilayah VI	12 Bulan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Terdapat penyesuaian Perda Pemerintahan Kabupaten/Kota yang menyebabkan perubahan tarif pembayaran retribusi persampahan berubah.	1	Pengenaan tarif retribusi pelayanan persampahan sesuai dengan Perda terkait Retribusi Persampahan pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Bila terjadi perubahan Perda terkait pelaksanaan Retribusi Persampahan yang menetapkan adanya kenaikan tarif retribusi maka perlu diupayakan adanya penyesuaian	Melakukan Koordinasi Dengan Instansi Terkait	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasana Perhubungan Wilayah VI	12 Bulan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Gedung kantor dan bangunan lainnya serta sarana dan prasarananya masih kurang terawat.	4	Pada saat pelaksanaan kegiatan terjadi perubahan harga dibandingkan pada saat penyusunan anggaran.	Pemeliharaan yang dilaksanakan tidak dilakukan secara menyeluruh tetapi menyesuaikan ketersediaan anggaran yang ada	Memaksimalkan anggaran yang ada dengan melaksanakan rehabilitasi pada titik/ lokasi dengan skala prioritas	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasana Perhubungan Wilayah VI	12 Bulan

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	Menurunnya tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Balai Transportasi Jawa Tengah	4	Belum semua komponen pendukung pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan tersedia	Pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Balai Transportasi Jawa Tengah kurang maksimal			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Penyusunan dokumen administrasi keuangan tidak baik	4	Kurangnya pegawai yang mempunyai kompetensi	Dokumen administrasi keuangan tidak disusun dengan baik dan benar			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Menurunnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	4	Kualitas layanan administrasi kepegawaian menurun karena pelaksanaan tidak sesuai SOP	Pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian tidak sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Menurunnya layanan administrasi umum Perangkat Daerah	4	Belum semua kebutuhan terakomodir	Adanya kebutuhan administrasi umum yang belum dapat terpenuhi secara optimal			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Kegiatan tidak dilaporkan dengan baik	4	Identifikasi kebutuhan belum optimal	Pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Kegiatan tata usaha kurang berjalan dengan baik	4	Pemeliharaan Barang milik daerah tidak terpelihara dengan baik	Kegiatan tata usaha kurang berjalan dengan baik karena fungsi barang milik daerah belum optimal			

4.3 Dukungan Terhadap 136 Program Daerah

Dalam pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan pada perencanaan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, diarahkan untuk mendukung 136 program prioritas Gubernur Jawa Tengah. Rincian program/kegiatan/subkegiatan tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Dukungan Terhadap 136 Program Daerah
Tahun 2026

No	Program Daetah	Rencana Aktivitas Rill	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mendorong pengembangan pelabuhan Tanjung Mas sebagai sentra ekonomi Jawa					
		Memfasilitasi kebutuhan rencana pengembangan Pelabuhan Tanjung Mas melalui penyelenggaraan rapat koordinasi / konsultasi / sinkronisasi. Mengusulkan kepada Pemerintah Pusat (Kemenhub cq. KSOP) untuk mendorong peningkatan kinerja Pelabuhan Tanjung Emas sebagai pintu keluar perdagangan.	2026 : 1 Kegiatan	• Program Pengelolaan Pelayaran • Keg Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional • Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Bidang Pelayaran	• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Peningkatan kualitas jalan provinsi dengan lebar 7 meter					
	Peningkatan Kualitas Jalan					

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Rill	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Provinsi baik di Wilayah Perbatasan maupun di Kabupaten / Desa					
	Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan Provinsi	Pemenuhan perlengkapan jalan berupa pemasangan baru lampu penerangan jalan umum (LPJU) di ruas jalan provinsi yang mempunyai nilai strategis tinggi dan secara teknis dapat dilaksanakan pemasangan LPJU (tersedia lahan dan jaringan tegangan rendah (JTR) PLN Diprioritaskan pada ruas jalan provinsi yang volume lalu lintas nya tinggi, memiliki nilai strategis mendukung perekonomian (akses pariwisata, jalur logistik dan perbatasan) dan yang berpotensi mengurangi frekuensi kejadian kecelakaan lalu lintas serta ruas jalan yang sudah dinyatakan tuntas penanganannya secara kebinamargaan.	250 Unit	• Program Penyelenggaraan LLAJ • Keg. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi • Sub Keg. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Bidang Lalu Lintas	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana • Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral • Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Peremajaan / penggantian LPJU yang kinerjanya sudah menurun berupa	63 Unit	• Program Penyelenggaraan LLAJ • Keg. Pelaksanaan Manajemen dan	• Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas

No	Program Daetah	Rencana Aktivitas Rill	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		penggantian suku cadang sesuai kebutuhan		Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi Sub Keg. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	- Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Penanganan kerusakan LPJU melalui pemenuhan kebutuhan jumlah armada kendaraan (crane/skylift) untuk pemeliharaan LPJU	1 Unit	- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi - Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Sub Keg. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Sekretariat Dinas Perhubungan	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Program Daetah	Rencana Aktivitas Rill	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Modernisasi Trans Jateng (armada bus, sistem, dan halte)					
	BLUD Pengelola Trans Jateng	Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola Trans Jateng dari semula UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Balai Transportasi Jawa Tengah menjadi PPK BLUD (Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah)	Proses BLUD	- Program Penyelenggaraan LLAJ - Keg. Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Sub Keg. Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	Bidang Angkutan	- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Kerjasama CSR dan BUMN/BUMD	Peningkatan kerjasama pembiayaan sarana dan prasarana pendukung Trans Jateng yang bersumber dari CSR BUMN/BUMD dan swasta	1 Kegiatan	- Program Penyelenggaraan LLAJ - Keg. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi - Sub Keg. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Balai Transportasi Kelas A	- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Modernisasi sistem Trans Jateng	Peningkatan pilihan pembayaran secara digital dan/atau cashless	2025 : 7% Pengguna menggunakan cashless 2026 : 7,2 % Pengguna menggunakan cashless 2027 : 7,4% Pengguna	- Program Penyelenggaraan LLAJ - Keg. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang	Balai Transportasi Kelas A	- Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital - Badan Pengelola Keuangan dan Aset

No	Program Daetah	Rencana Aktivitas Rill	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			menggunakan cashless 2028 : 7,6% Pengguna menggunakan cashless 2029 : 7,8% Pengguna menggunakan cashless 2027 : 8,0% Pengguna menggunakan cashless	dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sub Keg. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Daerah - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Dinas Pendidikan - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Inisiasi layanan Trans Jateng "Executive"	2026 : Kajian FS dan ATP / WTP	- Program Penyelengg. LLAJ - Keg. Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Sub Keg. Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	Bidang Angkutan	- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Dinas Pendidikan - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
		Pembangunan halte portable	2026 : Pembangunan halte portable sejumlah 6 unit untuk pentahapan pemenuhan halte koridor	- Program Penyelenggaraan LLAJ - Keg. Penyediaan Perlengkapan Jalan di	Balai Transportasi Kelas A	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Komunikasi,

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Rill	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			lama Trans Jateng.	Jalan Provinsi Sub Keg. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		Informatika dan Digital - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Dinas Pendidikan - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
4	Memastikan Integrasi Jaringan untuk menjamin Konektivitas Trans Jateng dengan Trans Kabupaten/Kota berbasis 10 Wilayah Pengembangan Aglomerasi					
		Pengembangan cakupan layanan (penambahan koridor, ritasi, jam operasional dan perpanjangan koridor) Trans Jateng	2026 : DED dan ATP WTP Trans Jateng Koridor Kab. Magelang – Kota Magelang – Kab. Temanggung; Masterplan Trans Jateng Jekuti	- Program Penyelenggaraan LLAJ - Keg. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar	- Balai Transportasi Kelas A - Bidang Angkutan	- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Program Daetah	Rencana Aktivitas Rill	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			DED Trans Jateng Petanglong Review Masterplan Subosukowonosraten	Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Sub Keg. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Program Penyelengg. LLAJ - Keg. Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Sub Keg. Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi		- Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Dinas Pendidikan - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
5	Optimalisasi Pelabuhan dan Bandara Perintis di Jawa Tengah sebagai Generator Aktivitas Perekonomian Global					
		Fasilitasi peningkatan kualitas, kapasitas dan kinerja pelabuhan dan bandara perintis dalam mendukung aktivitas perekonomian	2026 : 2 Kegiatan	- Program Pengelolaan Pelayaran - Keg Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan	- Bidang Pelayaran - Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Program Daetah	Rencana Aktivitas Rill	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Pengumpan Regional • Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional, dan; • Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Lalan (LLAJ) • Kegiatan Pemetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi • Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		• Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Dinas Pendidikan • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah • Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6	Berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dengan Mendorong revitalisasi jalur kereta api					
		Fasilitas revitalisasi jalur non aktif kereta api dan mengusulkan perpanjangan layanan kereta api komuter	2026 : 1 Kegiatan	• Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Lalan (LLAJ) • Kegiatan Pemetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi • Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ	• Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perindustrian dan Perdagangan • Dinas Kebudayaan,

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Rill	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Provinsi		Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sumber : Dinas Perhubungan 2025

Keterangan:

Kolom (2) diisi 136 Program Daerah yang didukung oleh perangkat daerah;

Kolom (3) diisi dengan rencana aktivitas riil yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan 136 Program Daerah;

Kolom (4) diisi dengan output/target/volume yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun perencanaan;

Kolom (5) diisi program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah yang mendukung program daerah;

Kolom (6) diisi dengan unit kerja di perangkat daerah yang melaksanakan langsung aktivitas riil pendukung program daerah;

Kolom (7) diisi dengan perangkat daerah lainnya yang berkolaborasi dalam pelaksanaan program daerah.

BAB V

PENUTUP

1. Renja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah telah mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat, mewadahi Rencana Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2026 serta menjadi cerminan dari perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dalam pencapaian target pembangunan Tahun 2026. Di sisi lain pihak, Renja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah telah menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial serta bersifat logis, dinamis dan fleksibel agar berdaya guna dan berhasil guna. Target indikator, fokus dan lokus dalam Renja menyesuaikan dengan dinamika perubahan global, nasional dan regional serta ketersediaan anggaran berdasarkan pada kemampuan pendanaan daerah;
2. Adapun kaidah-kaidah pelaksanaan dari Renja adalah :
 - a. Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 mengacu kepada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
 - b. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah menyusun Rancangan Awal Renja PD dengan mempertimbangkan masukan dari *Stakeholders* terkait dan menyelenggarakan Forum PD untuk mendapatkan masukan penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD;
 - c. Bappeda melakukan proses finalisasi RKPD Tahun 2026 melalui Forum Musrenbang;
 - d. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah menyempurnakan Renja PD berdasarkan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sesuai Pergub.
3. Tindak lanjut dari Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah dijadikan sebagai salah satu pedoman dalam menyusun RKA-PD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.

Tabel 1
Identifikasi Risiko

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio trayek angkutan jalan	Berkurangnya jumlah angkutan umum yang beroperasi	Risiko Strategis	Melampaui batas usia kendaraan, perijinan di OSS belum terverifikasi, jaringan trayek tidak tersedia, dampak covid menyebabkan perusahaan belum bisa melakukan <u>peremajaan</u>	Pengeluaran untuk biaya transportasi masyarakat meningkat	Masyarakat
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio trayek angkutan jalan	Menurunnya izin penyelenggaraan AODT yang diterbitkan	Risiko Kepatuhan	pendapatan pengusaha angkutan umum tidak sebanding dengan biaya operasional kendaraan	kualitas pelayanan angkutan umum menurun	Dinas perhubungan, Perusahaan angkutan AKDP, Masyarakat
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio angkutan taksi terpenuhi	Terdapat Angkutan Taksi (Taksi, AJDP,ASK) yang melampaui batas usia kendaraan	Risiko Kepatuhan	Perusahaan belum bisa melakukan peremajaan	Terdapat kendaraan Taksi (Taksi, AJDP,ASK) yang tidak perpanjangan izin	Perusahaan yang tertib administrasi serta memiliki kendaraan yang berijin
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio angkutan barang yang berijin	Terdapat Angkutan Barang Umum yang belum berizin	Risiko Operasional	Kurangnya sosialisasi terhadap PP 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko	Terdapat kendaraan Angkutan Barang Umum yang belum terverifikasi di OSS	Perusahaan yang tertib administrasi serta memiliki kendaraan yang berijin
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Angkutan Orang Dalam Trayek yang berijin	menurunnya izin penyelenggaraan AODT yang diterbitkan	Risiko Kepatuhan	pendapatan pengusaha angkutan umum tidak sebanding dengan biaya operasional kendaraan	kualitas pelayanan angkutan umum menurun	Dinas perhubungan, Perusahaan angkutan AKDP, Masyarakat
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio trayek yang ditetapkan pemukhtahiran tarif	Tayek yang dilapangan tidak sesuai dengan akhir trayek (berhenti di <u>pertengahan trayek</u>)	Risiko Operasional	berkurangnya jumlah penumpang dan biaya operasional tinggi jika sampai titik akhir trayek	Hasil survey tarif kurang optimal	Dinas Perhubungan, Perusahaan AKDP dan Masyarakat
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio jaringan trayek pedesaan antar kabupaten kota dalam provinsi yang ditetapkan	Terdapat kawasan pedesaan antar kabupaten kota dalam provinsi belum terlayani jaringan trayek pedesaan	Risiko Operasional	Belum semua jaringan trayek pedesaan tersusun perencanaannya	Masyarakat pedesaan tidak mendapatkan pelayanan transportasi	Masyarakat

8	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio kawasan perkotaan yang memiliki rencana layanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Terdapat kawasan perkotaan antar kabupaten kota dalam provinsi belum terlayani jaringan trayek perkotaan	Risiko Operasional	Belum semua jaringan trayek perkotaan tersusun perencanaannya	Pengeluaran biaya transportasi masyarakat meningkat	Masyarakat
9	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum	Menurunnya jumlah penumpang angkutan umum ada masa angkutan lebaran dan nataru	Risiko Strategis	pengguna kendaraan pribadi lebih banyak dan terjadi kenaikan harga tiket	meningkatnya resiko terjadinya kemacetan dan terjadinya inflasi	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
10	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani	Menurunnya jumlah penumpang angkutan umum pada masa angkutan lebaran, natal dan tahun baru (nataru)	Risiko Operasional	pengguna kendaraan pribadi lebih banyak	meningkatnya resiko terjadinya kemacetan	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Masyarakat
11	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio pemanfaatan terminal	terjadinya penyalahgunaan pemanfaatan terminal	Risiko Strategis	Penyewa aset melakukan perubahan sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya	Mengganggu kegiatan operasional terminal	Masyarakat dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
12	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio terminal tipe B dalam kondisi baik	Belum terpenuhinya standart pelayanan minimal penyelenggaraan terminal tipe B	Risiko Operasional	Peningkatan standar pelayanan minimal dikarenakan adanya prioritas pengembangan terminal	Rendahnya kepuasan masyarakat akibat masih adanya terminal penumpang tipe B yang kondisinya belum optimal	Masyarakat

13	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	Kurangnya jumlah simpul dan jaringan yang ditingkatkan	Risiko Operasional	Proses Penyerahan aset yang belum selesai	Masyarakat tidak mendapat layanan simpul transportasi yang memadai	Masyarakat
14	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio implementasi dokumen RIJLLAJ	Kurangnya jumlah simpul dan jaringan yang ditingkatkan	Risiko Operasional	Proses Penyerahan aset yang belum selesai	Masyarakat tidak mendapat layanan simpul transportasi yang memadai	Masyarakat
15	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Kurangnya minat masyarakat menggunakan transportasi umum di terminal	Risiko Strategis	1. Penumpang masih memilih angkutan yang bisa menjemput dan mengantarkan sampai lokasi tujuan atau tetap memilih menggunakan kendaraan pribadi 2. Lokasi terminal tidak strategis sehingga bus tidak masuk ke dalam terminal	Tidak berfungsinya fungsi terminal sebagai simpul transportasi	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
16	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Belum terpenuhinya standart pelayanan penyelenggaraan terminal tipe B Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Risiko Reputasi	Belum optimalnya rehabilitasi Fasilitas Utama dan Pendukung terminal	Rendahnya kepuasan masyarakat akibat masih adanya terminal tipe B yang kondisinya kurang baik	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
17	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	masih belum terpenuhi kebutuhan tingkat pelayanan umum dan keuangan	Risiko Strategis	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Pelaksanaan layanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan administrasi kepegawaian mengalami keterlambatan	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

18	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Penyusunan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN mengalami keterlambatan	Risiko Reputasi	Pelaksanaan kegiatan berjalan tidak sesuai dengan jadwal waktu yang sudah direncanakan	Terjadi deviasi pelaksanaan kegiatan	masyarakat & BPSPP WIL.II
19	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Kurangnya minat masyarakat menggunakan transportasi umum di terminal	Risiko Strategis	1. Penumpang masih memilih angkutan yang bisa menjemput dan mengantar sampai lokasi tujuan atau tetap memilih menggunakan kendaraan pribadi 2. Lokasi terminal tidak strategis sehingga bus tidak masuk ke dalam terminal	Tidak berfungsinya fungsi terminal sebagai simpul transportasi	Masyarakat
20	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Belum terpenuhinya standart pelayanan penyelenggaraan terminal tipe B Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Risiko Reputasi	Belum optimalnya rehabilitasi Fasilitas Utama dan Pendukung terminal	Rendahnya kepuasan masyarakat akibat masih adanya terminal tipe B yang kondisinya kurang baik	Masyarakat
21	Sasaran Strategis	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Kurangnya minat masyarakat menggunakan transportasi umum di terminal	Risiko Strategis	1. Penumpang masih memilih angkutan yang bisa menjemput dan mengantar sampai lokasi tujuan atau tetap memilih menggunakan kendaraan pribadi 2. Lokasi terminal tidak strategis sehingga bus tidak masuk ke dalam terminal	Tidak berfungsinya fungsi terminal sebagai simpul transportasi	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

22	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Belum terpenuhinya standart pelayanan penyelenggaraan terminal tipe B Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Risiko Reputasi	Belum optimalnya rehabilitasi Fasilitas Utama dan Pendukung terminal	Rendahnya kepuasan masyarakat akibat masih adanya terminal tipe B yang kondisinya kurang baik	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
23	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Kurangnya minat masyarakat menggunakan transportasi umum di terminal	Risiko Strategis	1. Penumpang masih memilih angkutan yang bisa menjemput dan mengantar sampai lokasi tujuan atau tetap memilih menggunakan kendaraan pribadi 2. Lokasi terminal tidak strategis sehingga bus tidak masuk ke dalam terminal	Tidak berfungsinya fungsi terminal sebagai simpul transportasi	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
24	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Belum terpenuhinya standart pelayanan penyelenggaraan Terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Risiko Reputasi	Belum optimalnya rehabilitasi fasilitas utama dan pendukung	Rendahnya kepuasan masyarakat akibat masih adanya Terminal Tipe B yang kondisinya kurang baik	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
25	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Berkurangnya minat masyarakat menggunakan transportasi umum di terminal	Risiko Reputasi	1. Penumpang masih memilih angkutan yang bisa menjemput dan mengantar sampai lokasi tujuan atau tetap memilih menggunakan kendaraan pribadi 2. Lokasi terminal tidak strategis sehingga bus tidak masuk ke dalam terminal	Tidak berfungsinya fungsi terminal sebagai simpul transportasi	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

26	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Belum terpenuhinya Fasilitas Utama dan Pendukung terminal tipe B sesuai ketentuan perundang-undangan	Risiko Reputasi	Belum optimalnya rehabilitasi Fasilitas Utama dan Pendukung terminal	Rendahnya kepuasan masyarakat akibat masih adanya terminal tipe B yang kondisinya kurang baik	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
27	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas perkotaan	Terdapat titik lokasi yang potensial jumlah penumpangnya namun belum ada Tempat Pemberhentian Bus (TPB)	Risiko Strategis	Masih terdapat resistensi angkutan eksisting yang melayani rute tersebut terhadap lokasi-lokasi yang mempunyai potensi penumpang	Penumpang trans Jateng pada lokasi tersebut harus berjalan kaki atau diantar untuk menuju halte terdekat karena Trans Jateng menaikan/menurunkan penumpang pada Tempat Pemberhentian Bus (TPB)	Penumpang Trans Jateng
28	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Jumlah Tempat Perhentian Bus (TPB) Terpenuhi	Spesifikasi teknis yang sesuai DED tidak sesuai kondisi lapangan akibat <u>penolakan</u>	Risiko Operasional	Terjadi penolakan dari masyarakat karena merasa terganggu adanya Tempat Pemberhentian Bus (TPB)	Terjadi perbedaan dalam DED dengan kondisi di lapangan	Masyarakat pengguna layanan jasa Trans Jateng
29	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah penumpang terlayani angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan	Adanya rute yang terlayani dibawah kondisi ideal nilai load factor penumpangnya	Risiko Operasional	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap rute baru, lokasi halte atau TPB yang kurang ideal, atau rute yang dilalui memang bukan wilayah yang padat atau ramai dengan penumpang	Layanan menjadi kurang efektif dan bermanfaat karena jumlah penumpang yang sedikit	Masyarakat pengguna layanan jasa Trans Jateng
30	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio konektivitas transportasi laut dan ASDP	Menurunnya tingkat Keamanan dan keselamatan transportasi laut dan ASDP	Risiko Kepatuhan	Transportasi laut dan ASDP tidak memenuhi kelaiklautan kapal	Jaminan keamanan dan keselamatan transportasi laut dan ASDP tidak terpenuhi	Masyarakat

31	Sasaran Strategis	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio dokumen terlengkapi sebagai persyaratan ijin trayek berdasar <u>tingkatannya</u>	Trayek penyeberangan ASDP belum semuanya ditetapkan	Risiko Operasional	Terdapat persyaratan penerbitan ijin trayek yang belum terpenuhi	Tidak adanya penyeberangan yang dapat melayani masyarakat	Masyarakat
32	Sasaran Strategis	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Fasilitas Pelabuhan SDP terpenuhi	Penyelenggaraan ASDP tidak dapat berjalan maksimal	Risiko Operasional	Kondisi sarana dan prasarana di Dermaga ASDP belum memenuhi SPM	Sarana dan prasarana penyeberangan tidak mendukung keamanan dan kenyamanan pengguna penyeberangan	Masyarakat
33	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin	Terkendalanya legalitas perizinan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Risiko Operasional	Kurangnya pemahaman dan sosialisasi kepada pelaku usaha yang akan melakukan perizinan berusaha	Terhambatnya para pelaku usaha dalam melakukan perizinan usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas	Dinas Perhubungan
34	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang <u>berijin</u>	Kegiatan usaha yang dijalankan pelaku usaha tidak sesuai dengan perizinan berusahnya	Risiko Fraud	Sertifikat standar dengan tingkat risiko menengah rendah perizinannya terbit tanpa melalui verifikasi	Penyalahgunaan perizinan berusaha	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
35	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Berth occupancy ratio	Menurunnya tingkat kunjungan kapal akibat kinerja pelabuhan yang <u>menurun</u>	Risiko Operasional	Tidak optimalnya pemeliharaan dan pemenuhan fasilitas pelabuhan pada pelabuhan pengumpan regional	Menurunnya produktifitas pelabuhan pengumpan regional	Dinas Perhubungan

36	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	Ruas jalan belum terpenuhi kebutuhan minimalnya	Risiko Strategis	jumlah pemasangan fasilitas perlengkapan jalan tidak sesuai target	tidak tercapainya target pemasangan perlengkapan jalan	Masyarakat
37	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi penilaian pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Provinsi Jateng	Belum seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota berpartisipasi dalam penilaian lomba tertib lalu lintas (Wahana Tata Nugraha)	Risiko Operasional	Kurangnya antusiasme pemerintah Kab/Kota untuk mengikuti lomba tertib lalu lintas Wahana Tata Nugraha	Belum optimalnya sistem transportasi di kota/kabupaten terkait dengan manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan umum	Dishub Prov. Jawa Tengah
38	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Rekomendasi Hasil Forum LLAJ	Rekomendasi Forum LLAJ atas permasalahan belum mampu menjawab rencana aksi yang telah disusun	Risiko Kemitraan	Terdapat OPD yang belum menjalankan hasil rekomendasi Forum LLAJ	Tidak tertanganinya Daerah Rawan Kecelakaan	Masyarakat Pengguna Jalan
39	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah rekomendasi / persetujuan andalalin di Jalan provinsi	Terdapat Pembangun/Pengembang pusat kegiatan belum melaksanakan kewajiban penanganan dampak lalu lintas yang tertuang dalam Persetujuan Teknis Andalalin	Risiko Operasional	Dokumen Andalalin hanya merupakan salah satu syarat izin mendirikan bangunan	Timbulnya dampak lalu lintas (kemacetan & kecelakaan) akibat pembangunan/pengembangan pusat kegiatan	Masyarakat pengguna jalan

40	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio perlengkapan jalan terpasang	Jumlah perlengkapan jalan terpasang belum dapat memenuhi prioritas lokasi yang memerlukan pemasangan perlengkapan jalan di Jalan Provinsi Jawa Tengah	Risiko Operasional	Terdapat usulan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan provinsi yang sifatnya mendesak yang belum masuk dalam perencanaan	Dengan tidak terpenuhinya kebutuhan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan maka tingkat keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal serta peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah tidak dapat tercapai.	Masyarakat
41	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Meningkatnya tingkat frekuensi dan resiko di Lokasi Daerah Rawan Kecelakaan	Risiko Strategis	Fasilitas Perlengkapan Jalan Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan belum optimal	Bertambahnya korban kecelakaan dengan tingkat Fatalitas tinggi	Masyarakat

42	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Surat pemberitahuan perbaikan dan pemberitahuan untuk tertib administrasi tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan	Risiko Operasional	Perusahaan tidak memperhatikan surat pemberitahuan karena faktor ekonomi yang tidak mumpuni untuk mengganti komponen kendaraan yang sudah tidak laik	Tidak ada perbaikan dari pihak perusahaan terhadap kendaraan yang beroperasi sehingga kendaraan yang beroperasi tetap dalam kondisi kurang laik jalan dan tidak tertib administrasi	Masyarakat
43	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Kurang maksimalnya pengelolaan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Risiko Strategis	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Pengelolaan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian kurang maksimal	masyarakat pengguna jalan
44	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Jumlah kebutuhan Belanja Administrasi Umum Perangkat Daerah belum memenuhi prioritas	Risiko Operasional	Adanya perubahan harga pada saat pelaksanaan kegiatan	Paket belanja administrasi umum yang disediakan terbatas	masyarakat & BPSPP WIL.II

45	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Meningkatnya tingkat frekuensi dan resiko di Lokasi Daerah Rawan Kecelakaan	Risiko Strategis	Fasilitas Perlengkapan Jalan Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan belum optimal	Bertambahnya korban kecelakaan dengan tingkat Fatalitas tinggi	Masyarakat
46	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi Daerah Rawan Kecelakaan belum dapat memenuhi prioritas lokasi yang memerlukan pemasangan perlengkapan jalan di Jalan Provinsi Jawa Tengah	Risiko Operasional	Keterbatasan ruang milik jalan dan faktor penunjang pada pemasangan perlengkapan jalan	Meningkatnya jumlah fatalitas kecelakaan	Masyarakat
47	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Meningkatnya tingkat frekuensi dan resiko di Lokasi Daerah Rawan Kecelakaan	Risiko Strategis	Fasilitas Perlengkapan Jalan Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan belum optimal	Bertambahnya korban kecelakaan dengan tingkat Fatalitas tinggi	Masyarakat

48	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi Daerah Rawan Kecelakaan belum dapat memenuhi prioritas lokasi yang memerlukan pemasangan perlengkapan jalan di Jalan Provinsi Jawa Tengah	Risiko Operasional	Keterbatasan ruang milik jalan dan faktor penunjang pada pemasangan perlengkapan jalan	Belum idealnya pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi DRK	Masyarakat
49	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Meningkatnya tingkat frekuensi dan resiko di Lokasi Daerah Rawan Kecelakaan	Risiko Strategis	Fasilitas Perlengkapan Jalan Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan belum optimal	Bertambahnya korban kecelakaan dengan tingkat fatalitas tinggi	Masyarakat
50	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi Daerah Rawan Kecelakaan belum dapat memenuhi prioritas lokasi yang memerlukan pemasangan perlengkapan jalan di Jalan Provinsi Jawa Tengah	Risiko Operasional	Keterbatasan ruang milik jalan dan faktor penunjang pada pemasangan perlengkapan jalan	Belum idealnya pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi DRK	Masyarakat

51	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Meningkatnya tingkat frekuensi dan resiko di Lokasi Daerah Rawan Kecelakaan	Risiko Strategis	Fasilitas Perlengkapan Jalan Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan belum optimal	Bertambahnya korban kecelakaan dengan tingkat Fatalitas tinggi	Masyarakat
52	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi Daerah Rawan Kecelakaan belum dapat memenuhi prioritas lokasi yang memerlukan pemasangan perlengkapan jalan di Jalan Provinsi Jawa Tengah	Risiko Operasional	Keterbatasan ruang milik jalan dan faktor penunjang pada pemasangan perlengkapan jalan	Belum idealnya pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi DRK	Masyarakat
53	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio kendaraan laik jalan di Jawa Tengah	Banyaknya perusahaan karoseri yang belum menerapkan Standart Manajemen Keselamatan	Risiko Strategis	Belum terinfonya peraturan terbaru tentang Standart Manajemen Keselamatan	Peningkatan kecelakaan disebabkan karena kendaraan tidak memenuhi standart laik jalan	Masyarakat pengguna jalan dan perusahaan karoseri
54	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji berkala di jawa tengah	Terdapat Kendaraan Wajib Uji yang tidak lolos Uji Berkala	Risiko Kepatuhan	Kendaraan tidak sesuai Spesifikasi teknis (dimensi dan kelaikan kendaraan)	terjadi kecelakaan lalu lintas akibat overdimensi dan tidak laik jalan	Masyarakat Pengguna Jalan

55	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Terdapat Kendaraan Yang Beroperasi Dalam Kondisi Tidak Laik Jalan pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wiayah I	Risiko Strategis	Perusahaan atau Pemilik Kendaraan Angkutan Umum Yang Beroperasi Tidak mematuhi ketentuan standar kondisi kendaraan yang laik jalan sesuai peraturan perundang - undangan	Rendahnya jumlah angkutan yang beroperasi dalam kondisi laik jalan	Masyarakat
56	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi Daerah Rawan Kecelakaan belum dapat memenuhi prioritas lokasi yang memerlukan pemasangan perlengkapan jalan di Jalan Provinsi Jawa Tengah	Risiko Kepatuhan	Keterbatasan ruang milik jalan dan faktor penunjang pada pemasangan perlengkapan jalan	Belum idealnya pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi DRK	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
57	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Terdapat penyesuaian Perda Pemerintahan Kabupaten/Kota yang menyebabkan perubahan tarif pembayaran retribusi persampahan berubah	Risiko Strategis	Pengenaan tarif retribusi pelayanan persampahan sesuai dengan Perda terkait Retribusi Persampahan pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Bila terjadi perubahan Perda terkait pelaksanaan Retribusi Persampahan yang menetapkan adanya kenaikan tarif retribusi maka perlu diupayakan adanya penyesuaian	Masyarakat
58	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah total kendaraan yang di ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Gedung kantor dan bangunan lainnya serta sarana dan prasarananya masih kurang terawat	Risiko Operasional	Pada saat pelaksanaan kegiatan terjadi perubahan harga dibandingkan pada saat penyusunan anggaran	Pemeliharaan yang dilaksanakan tidak dilakukan secara menyeluruh tetapi menyesuaikan ketersediaan anggaran yang ada	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

59	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang tindak lanjut pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Surat pemberitahuan perbaikan dan pemberitahuan untuk tertib administrasi tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan	Risiko Strategis	Perusahaan tidak memperhatikan surat pemberitahuan karena faktor ekonomi yang tidak mumpuni untuk mengganti komponen kendaraan yang sudah tidak laik	Tidak ada perbaikan dari pihak perusahaan terhadap kendaraan yang beroperasi sehingga kendaraan yang beroperasi tetap dalam kondisi kurang laik jalan dan tidak tertib administrasi	Masyarakat
60	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Terdapat Kendaraan Yang Beroperasi Dalam Kondisi Tidak Laik Jalan pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III	Risiko Kepatuhan	Perusahaan atau Pemilik Kendaraan Angkutan Umum Yang Beroperasi Tidak mematuhi ketentuan standar kondisi kendaraan yang laik jalan sesuai peraturan perundang - undangan	Rendahnya jumlah angkutan yang beroperasi dalam kondisi laik jalan	Masyarakat
61	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang tindak lanjut pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Surat pemberitahuan perbaikan dan pemberitahuan untuk tertib administrasi tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan	Risiko Strategis	Perusahaan tidak memperhatikan surat pemberitahuan karena faktor ekonomi yang tidak mumpuni untuk mengganti komponen kendaraan yang sudah tidak laik	Tidak ada perbaikan dari pihak perusahaan terhadap kendaraan yang beroperasi sehingga kendaraan yang beroperasi tetap dalam kondisi kurang laik jalan dan tidak tertib administrasi	Masyarakat
62	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Terdapat Kendaraan Yang Beroperasi Dalam Kondisi Tidak Laik Jalan pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV	Risiko Kepatuhan	Perusahaan atau Pemilik Kendaraan Angkutan Umum Yang Beroperasi Tidak mematuhi ketentuan standar kondisi kendaraan yang laik jalan sesuai peraturan perundang - undangan	Rendahnya jumlah angkutan yang beroperasi dalam kondisi laik jalan	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

63	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang tindak lanjut pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Surat pemberitahuan perbaikan dan pemberitahuan untuk tertib administrasi tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan	Risiko Strategis	Perusahaan tidak memperhatikan surat pemberitahuan karena faktor ekonomi yang tidak mumpuni untuk mengganti komponen kendaraan yang sudah tidak laik	Tidak ada perbaikan dari pihak perusahaan terhadap kendaraan yang beroperasi sehingga kendaraan yang beroperasi tetap dalam kondisi kurang laik jalan dan tidak tertib administrasi	masyarakat
64	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Terdapat kendaraan yang beroperasi dalam kondisi tidak laik jalan pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wiayah V	Risiko Kepatuhan	Perusahaan atau pemilik kendaraan angkutan umum yang beroperasi tidak mematuhi ketentuan standar kondisi kendaraan yang laik jalan sesuai peraturan perundang - undangan	Rendahnya jumlah angkutan yang beroperasi dalam kondisi laik jalan	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
65	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang tindak lanjut pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Surat pemberitahuan perbaikan dan pemberitahuan untuk tertib administrasi tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan	Risiko Kepatuhan	Perusahaan tidak memperhatikan surat pemberitahuan karena faktor ekonomi yang tidak mumpuni untuk mengganti komponen kendaraan yang sudah tidak laik	Tidak ada perbaikan dari pihak perusahaan terhadap kendaraan yang beroperasi sehingga kendaraan yang beroperasi tetap dalam kondisi kurang laik jalan dan tidak tertib administrasi	Masyarakat
66	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Masih belum terpenuhi kebutuhan tingkat pelayanan umum dan keuangan	Risiko Kepatuhan	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Pelaksanaan layanan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan dan administrasi kepegawaian mengalami keterlambatan	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

67	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	Jumlah perlengkapan jalan terpasang di perlintasan sebidang KA belum dapat memenuhi prioritas lokasi yang memerlukan pemasangan perlengkapan jalan	Risiko Strategis	Terdapat usulan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan provinsi yang sifatnya mendesak yang belum masuk dalam perencanaan	Dengan tidak terpenuhinya kebutuhan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan maka tingkat keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Pedoman Teknis Pengendalian Lalu Lintas pada lokasi potensi kecelakaan perlintasan sebidang tidak dapat tercapai	Masyarakat
68	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Rasio realisasi rencana induk perkeretaapian	Kurang optimalnya keselamatan di perlintasan sebidang KA	Risiko Strategis	Alih status ruas jalan	Tidak tersedianya fasilitas keselamatan perlintasan KA	Masyarakat
69	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	Tingkat kinerja belum dilaporkan tepat waktu	Risiko Kepatuhan	belum adanya sistem pelaporan data yang memadai	dokumen yang tersusun belum bisa dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber data	Dinas Perhubungan
70	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi tidak tepat waktu	Risiko Operasional	Terdapat data dukung dan data teknis yang belum memadai	Terhambatnya proses perencanaan dan penganggaran sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

71	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Sekretariat)	Pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak efektif dan efisien	Risiko Operasional	Dokumen dan data dukung belum tersedia	Kegiatan perkantoran tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga mengganggu pelayanan masyarakat	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
72	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Administrasi keuangan tidak berjalan secara efisien	Risiko Operasional	Dokumen dan data dukung yang memadai belum tersedia	Kegiatan administrasi keuangan tidak berjalan sebagaimana mestinya	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
73	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen pencairan yang diajukan berpotensi tidak lengkap/tidak benar	Risiko Fraud	Adanya tekanan kepentingan	Menyebabkan biasanya fungsi verifikasi	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
74	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Proses klaim Asuransi sulit dilakukan	Risiko Operasional	Data dukung Klaim asuransi tidak lengkap	Klaim asuransi tidak dapat dilakukan	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
75	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Pelaksanaan Kegiatan tidak terjadwal	Risiko Operasional	Jadwal pelaksanaan kegiatan tidak dibuat sehingga kegiatan tidak berjalan maksimal	Kegiatan tidak dilaksanakan secara maksimal	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

76	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Penyediaan tidak tepat waktu	Risiko Operasional	Belum dibentuk penanggung jawab kegiatan	Penyediaan terlambat	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
77	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Penyediaan tidak tepat waktu	Risiko Operasional	Belum dibentuk penanggung jawab kegiatan	Penyediaan terlambat	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
78	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Penyediaan tidak tepat waktu	Risiko Operasional	Belum dibentuk penanggung jawab kegiatan	Penyediaan terlambat	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
79	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Menurunnya kinerja (kerusakan) sarana dan prasarana pemerintahan	Risiko Operasional	Kurang optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan	Menurunnya kinerja aparaturnya pemerintahan	Aparatur pemerintahan dan masyarakat penerima layanan

80	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A)	Tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah belum optimal	Risiko Strategis	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Pelaksanaan layanan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan dan administrasi kepegawaian mengalami keterlambatan	Masyarakat dan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
81	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Penyusunan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN mengalami keterlambatan	Risiko Operasional	Kecepatan penyelesaian laporan SPJ tidak sama	Dokumen administrasi pelaksanaan keuangan perangkat daerah mengalami keterlambatan	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
82	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah belum optimal	Risiko Operasional	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Pengelolaan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian kurang maksimal	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
83	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Layanan administrasi umum perangkat daerah belum optimal	Risiko Operasional	Adanya perubahan harga pada saat pelaksanaan kegiatan	Memenuhi layanan administrasi umum menggunakan skala prioritas	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A

84	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Penyusunan laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah belum optimal	Risiko Operasional	Pengenaan tarif retribusi pelayanan persampahan sesuai dengan Perda terkait Retribusi Persampahan pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Bila terjadi perubahan Perda terkait pelaksanaan Retribusi Persampahan yang menetapkan adanya kenaikan tarif retribusi maka perlu diupayakan adanya penyesuaian	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait.
85	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Gedung kantor dan bangunan lainnya serta sarana dan prasarananya masih kurang terawat.	Risiko Operasional	Pada saat pelaksanaan kegiatan terjadi perubahan harga	Pemeliharaan yang dilaksanakan tidak dilakukan secara menyeluruh	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
86	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B)	Penyusunan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN mengalami keterlambatan	Risiko Strategis	Pelaksanaan kegiatan berjalan tidak sesuai dengan jadwal waktu yang sudah direncanakan	Terjadi deviasi pelaksanaan kegiatan	masyarakat & Pegawai
87	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Kurang maksimalnya pengelolaan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Risiko Operasional	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Terhambatnya layanan administrasi kepegawaian	masyarakat, OPD

88	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Jumlah kebutuhan Belanja Administrasi Umum Perangkat Daerah belum memenuhi prioritas	Risiko Operasional	Adanya perubahan harga pada saat pelaksanaan kegiatan	Paket belanja administrasi umum yang disediakan terbatas	Pegawai BPSPP Wilayah II
89	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Terdapat penyesuaian Perda Pemerintahan Kabupaten/Kota yang menyebabkan perubahan tarif pembayaran retribusi persampahan berubah	Risiko Operasional	Pengenaan tarif retribusi pelayanan persampahan sesuai dengan Perda terkait Retribusi Persampahan pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Bila terjadi perubahan Perda terkait pelaksanaan Retribusi Persampahan yang menetapkan adanya kenaikan tarif retribusi maka perlu diupayakan adanya penyesuaian	Masyarakat, BPSPP Wilayah II
90	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Gedung kantor dan bangunan lainnya serta sarana dan prasarananya masih kurang terawat.	Risiko Operasional	Pada saat pelaksanaan kegiatan terjadi perubahan harga dibandingkan pada saat penyusunan anggaran.	Menurunnya kinerja aparatur pemerintahan	masyarakat
91	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Kurangnya minat masyarakat menggunakan transportasi umum di terminal	Risiko Operasional	1. Kondisi fasilitas Terminal kurang memadai 2. Tidak ada daya tarik menuju terminal selain untuk mendapatkan Angkutan Umum 3. rendahnya kunjungan bus masuk terminal	Tidak berfungsinya fungsi terminal sebagai simpul transportasi dan ruang ekonomi	Masyarakat

92	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A)	Meningkatnya tingkat frekuensi dan resiko di Lokasi Daerah Rawan Kecelakaan	Risiko Strategis	Perlengkapan Jalan yang dipasang tidak sesuai dengan rekomendasi	Bertambahnya korban kecelakaan dengan tingkat Fatalitas tinggi	Masyarakat dan Pegawai
93	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Surat pemberitahuan perbaikan dan pemberitahuan untuk tertib administrasi tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan	Risiko Operasional	1. Tidak adanya pengawasan dan penindakan di Jalan 2. rendahnya kemampuan pengusaha untuk pemeliharaan armada	meningkatnya jumlah kecelakaan Angkutan Penumpang Umum akibat tidak laik jalan	Masyarakat dan Pegawai
94	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Menurunnya kepuasan masyarakat terhadap Sarana Prasarana di Terminal	Risiko Operasional	Belum optimalnya rehabilitasi Fasilitas Utama dan Pendukung terminal	berhentinya layanan Terminal akibat kerusakan fasilitas Terminal	Masyarakat dan Pegawai
95	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Terdapat Kendaraan Yang Beroperasi Dalam Kondisi Tidak Laik Jalan pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II	Risiko Operasional	Perusahaan atau Pemilik Kendaraan Angkutan Umum Yang Beroperasi Tidak mematuhi ketentuan standar kondisi kendaraan yang laik jalan sesuai peraturan perundang - undangan	Menurunnya Jumlah Angkutan Umum yang berijin	Masyarakat dan Pegawai

96	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Kondisi lokasi DRK tidak dapat direhabilitasi	Risiko Operasional	Keterbatasan ruang milik jalan dan faktor penunjang pada pemasangan perlengkapan jalan	Meningkatnya frekuensi resiko kecelakaan di lokasi tersebut	Masyarakat dan Pegawai
97	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Terdapat Kendaraan Yang Beroperasi Dalam Kondisi Tidak Laik Jalan pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wiayah VI	Risiko Operasional	Perusahaan atau Pemilik Kendaraan Angkutan Umum Yang Beroperasi Tidak mematuhi ketentuan standar kondisi kendaraan yang laik jalan sesuai peraturan perundang - undangan	Rendahnya jumlah angkutan yang beroperasi dalam kondisi laik jalan	Masyarak dan Pegawai
98	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A)	Masih belum terpenuhi kebutuhan tingkat pelayanan umum dan keuangan	Risiko Operasional	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas	Pelaksanaan layanan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan dan administrasi kepegawaian mengalami keterlambatan,	Masyarakat dan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
99	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Penyusunan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN mengalami keterlambatan	Risiko Operasional	Pelaksanaan kegiatan berjalan tidak sesuai dengan jadwal waktu yang sudah direncanakan	Terjadi deviasi pelaksanaan kegiatan	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV

100	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Kurang maksimalnya pengelolaan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Risiko Operasional	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Pengelolaan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian kurang maksimal	BPSPP Wilayah IV
101	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Jumlah kebutuhan Belanja Administrasi Umum Perangkat Daerah belum memenuhi prioritas	Risiko Operasional	Adanya perubahan harga pada saat pelaksanaan kegiatan	Paket belanja administrasi umum yang disediakan terbatas	BPSPP Wilayah IV
102	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Terdapat penyesuaian Perda Pemerintahan Kabupaten/Kota yang menyebabkan perubahan tarif pembayaran retribusi persampahan berubah.	Risiko Operasional	Pengenaan tarif retribusi pelayanan persampahan sesuai dengan Perda terkait Retribusi Persampahan pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Bila terjadi perubahan Perda terkait pelaksanaan Retribusi Persampahan yang menetapkan adanya kenaikan tarif retribusi maka perlu diupayakan adanya penyesuaian	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait.
103	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Gedung kantor dan bangunan lainnya serta sarana dan prasarananya masih kurang terawat.	Risiko Operasional	Pada saat pelaksanaan kegiatan terjadi perubahan harga dibandingkan pada saat penyusunan anggaran.	Pemeliharaan yang dilaksanakan tidak dilakukan secara menyeluruh tetapi menyesuaikan ketersediaan anggaran yang ada	BPSPP Wilayah IV

104	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B)	masih belum terpenuhinya kebutuhan tingkat pelayanan umum dan keuangan	Risiko Strategis	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Pelaksanaan layanan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan dan administrasi kepegawaian mengalami keterlambatan	Masyarakat dan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B
105	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Penyusunan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN mengalami keterlambatan	Risiko Operasional	Pelaksanaan kegiatan berjalan tidak sesuai dengan jadwal waktu yang sudah direncanakan	Terjadi deviasi pelaksanaan kegiatan	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V
106	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Kurang maksimalnya pengelolaan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Risiko Operasional	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Pengelolaan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian kurang maksimal	Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah V
107	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Jumlah kebutuhan Belanja Administrasi Umum Perangkat Daerah belum memenuhi prioritas	Risiko Operasional	Adanya perubahan harga pada saat pelaksanaan kegiatan	aket belanja administrasi umum yang disediakan terbatas	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B

108	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Terdapat penyesuaian Perda Pemerintahan Kabupaten/Kota yang menyebabkan perubahan tarif pembayaran retribusi persampahan berubah	Risiko Operasional	Pengenaan tarif retribusi pelayanan persampahan sesuai dengan Perda terkait Retribusi Persampahan pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Bila terjadi perubahan Perda terkait pelaksanaan Retribusi Persampahan yang menetapkan adanya kenaikan tarif retribusi maka perlu diupayakan adanya penyesuaian	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V dan Pemerintah Kabupaten terkait.
109	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Gedung kantor dan bangunan lainnya serta sarana dan prasarananya masih kurang terawat	Risiko Operasional	Pada saat pelaksanaan kegiatan terjadi perubahan harga dibandingkan pada saat penyusunan anggaran	Pemeliharaan yang dilaksanakan tidak dilakukan secara menyeluruh tetapi menyesuaikan ketersediaan anggaran yang ada	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V
110	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A)	Masih belum terpenuhi kebutuhan tingkat pelayanan umum dan keuangan	Risiko Operasional	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Pelaksanaan layanan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan dan administrasi kepegawaian mengalami keterlambatan,	Masyarakat dan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
111	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Penyusunan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN mengalami keterlambatan	Risiko Operasional	Pelaksanaan kegiatan berjalan tidak sesuai dengan jadwal waktu yang sudah direncanakan	Terjadi deviasi pelaksanaan kegiatan	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A

112	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Kurang maksimalnya pengelolaan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Risiko Operasional	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Pengelolaan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian kurang maksimal	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
113	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Jumlah kebutuhan Belanja Administrasi Umum Perangkat Daerah belum memenuhi prioritas	Risiko Operasional	Adanya perubahan harga pada saat pelaksanaan kegiatan	Paket belanja administrasi umum yang disediakan terbatas	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
114	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Terdapat penyesuaian Perda Pemerintahan Kabupaten/Kota yang menyebabkan perubahan tarif pembayaran retribusi persampahan berubah.	Risiko Operasional	Pengenaan tarif retribusi pelayanan persampahan sesuai dengan Perda terkait Retribusi Persampahan pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Bila terjadi perubahan Perda terkait pelaksanaan Retribusi Persampahan yang menetapkan adanya kenaikan tarif retribusi maka perlu diupayakan adanya penyesuaian	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait.
115	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Gedung kantor dan bangunan lainnya serta sarana dan prasarananya masih kurang terawat.	Risiko Operasional	Pada saat pelaksanaan kegiatan terjadi perubahan harga dibandingkan pada saat penyusunan anggaran.	Pemeliharaan yang dilaksanakan tidak dilakukan secara menyeluruh tetapi menyesuaikan ketersediaan anggaran yang ada	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A

116	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	Menurunnya tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Balai Transportasi Jawa Tengah	Risiko Strategis	Belum semua komponen pendukung pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan tersedia	Pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Balai Transportasi Jawa Tengah kurang maksimal	Balai Transportasi Jawa Tengah
117	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Penyusunan dokumen administrasi keuangan tidak baik	Risiko Operasional	Kurangnya pegawai yang mempunyai kompetensi	Dokumen administrasi keuangan tidak disusun dengan baik dan benar	Balai Transportasi Jawa Tengah
118	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Menurunnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Risiko Operasional	Kualitas layanan administrasi kepegawaian menurun karena pelaksanaan tidak sesuai SOP	Pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian tidak sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan	Pegawai Balai Transportasi Jawa Tengah
119	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Menurunnya layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Risiko Operasional	Belum semua kebutuhan terakomodir	Adanya kebutuhan administrasi umum yang belum dapat terpenuhi secara optimal	Pegawai Balai Transportasi Jawa Tengah
120	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Kegiatan tidak dilaporkan dengan baik	Risiko Operasional	Identifikasi kebutuhan belum optimal	Pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana	Balai Transportasi Jawa Tengah

121	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Kegiatan tata usaha kurang berjalan dengan baik	Risiko Operasional	Pemeliharaan Barang milik daerah tidak terpelihara dengan baik	Kegiatan tata usaha kurang berjalan dengan baik karena fungsi barang milik daerah belum optimal	Pegawai Balai Transportasi Jawa Tengah
-----	------------------	---	--	---	--------------------	--	---	--

Tabel 2
Analisis Risiko

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Berkurangnya jumlah angkutan umum yang beroperasi	4	3	12	Ada	Pengawasan, monitoring & evaluasi, sosialisasi dan pemberian sanksi	Memadai	3	3	9
Menurunnya izin penyelenggaraan AODT yang diterbitkan	3	3	9	Ada	pembinaan kepada pengusaha angkutan umum agar menerapkan standar pelayanan angkutan umum	Memadai	2	3	6
Terdapat Angkutan Taksi (Taksi, AJDP,ASK) yang melampaui batas usia kendaraan	3	3	9	Ada	Monitoring dan evaluasi ke perusahaan yang bermasalah	Memadai	3	2	6
Terdapat Angkutan Barang Umum yang belum berizin	4	2	8	Ada	Sosialisasi, Pembinaan & pengawasan ke perusahaan angkutan barang umum	Memadai	3	2	6
menurunnya izin penyelenggaraan AODT yang diterbitkan	3	3	9	Ada	pembinaan kepada pengusaha angkutan umum agar menerapkan standar pelayanan angkutan umum	Memadai	2	3	6

Tayek yang dilapangan tidak sesuai dengan akhir trayek (berhenti di pertengahan trayek)	3	3	9	Ada	Melaksanakan evaluasi penetapan tarif angkutan umum dan menghimbau kepada perusahaan agar melakukan operasional sesuai dengan sk trayek dan KP yang ditetapkan	Memadai	2	1	2
Terdapat kawasan pedesaan antar kabupaten kota dalam provinsi belum terlayani jaringan trayek pedesaan	3	3	9	Ada	penyusunan usulan rencana jaringan trayek pedesaan	Belum Memadai	2	3	6
Terdapat kawasan perkotaan antar kabupaten kota dalam provinsi belum terlayani jaringan trayek perkotaan	4	3	12	Ada	penyusunan usulan rencana jaringan trayek perkotaan	Memadai	3	3	9
Menurunnya jumlah penumpang angkutan umum ada masa angkutan lebaran dan nataru	4	4	16	Ada	Penyediaan posko terpadu pelayanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru serta dilakukannya pengendalian harga tiket bersama <u>steakholder terkait</u>	Memadai	3	3	9
Menurunnya jumlah penumpang angkutan umum pada masa angkutan lebaran, natal dan tahun baru (nataru)	4	4	16	Ada	Penyediaan posko terpadu pelayanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru	Memadai	3	3	9
terjadinya penyalahgunaan pemanfaatan terminal	2	2	4	Ada	Monitoring dan evaluasi di terminal	Belum Memadai	2	2	4

Belum terpenuhinya standart pelayanan minimal penyelenggaraan terminal tipe B	3	4	12	Ada	1. Melakukan identifikasi standar pelayanan minimal terminal penumpang tipe B 2. Melakukan evaluasi standar pelayanan minimal terminal penumpang tipe B 3. Melakukan peningkatan standar pelayanan minimal terminal penumpang tipe sesuai prioritas	Belum Memadai	2	3	10
Kurangnya jumlah simpul dan jaringan yang ditingkatkan	3	3	9	Ada	Audiensi dengan stakeholder terkait	Memadai	3	2	6
Kurangnya jumlah simpul dan jaringan yang ditingkatkan	3	3	9	Ada	Audiensi dengan stakeholder terkait	Memadai	3	2	6
Kurangnya minat masyarakat menggunakan transportasi umum di terminal	3	2	6	Ada	Melaksanakan Pemeliharaan dan Rehabilitasi fasilitas utama dan penunjang terminal guna menambah kenyamanan masyarakat yang menggunakan fasilitas terminal dan menugaskan petugas dengan tupoksi pengarah arus bus untuk masuk ke terminal	Memadai	3	1	3

Belum terpenuhinya standart pelayanan penyelenggaraan terminal tipe B Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	3	1	3	Ada	Membuat skala prioritas jenis fasilitas dan lokasi terminal tipe B yang akan di rehabilitasi	Memadai	2	1	2
masih belum terpenuhi kebutuhan tingkat pelayanan umum dan keuangan	3	2	6	Ada	1. Rehabilitasi fasilitas utama dan penunjang terminal 2. Menugaskan petugas dengan tupoksi pengarah arus bus untuk masuk ke terminal	Belum Memadai	2	2	4
Penyusunan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN mengalami keterlambatan	2	1	2	Ada	Membuat skala prioritas jenis fasilitas dan lokasi terminal tipe B yang akan di rehabilitasi	Memadai	1	1	1
Kurangnya minat masyarakat menggunakan transportasi umum di terminal	3	2	6	Ada	1. Rehabilitasi fasilitas utama dan penunjang terminal 2. Menugaskan petugas dengan tupoksi pengarah arus bus untuk masuk ke terminal	Memadai	3	1	3
Belum terpenuhinya standart pelayanan penyelenggaraan terminal tipe B Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	3	3	9	Ada	Membuat skala prioritas jenis fasilitas dan lokasi terminal tipe B yang akan di rehabilitasi	Belum Memadai	3	3	9

Kurangnya minat masyarakat menggunakan transportasi umum di terminal	3	2	6	Ada	1. Rehabilitasi fasilitas utama dan penunjang terminal 2. Menugaskan petugas dengan tupoksi pengarah arus bus untuk masuk ke terminal	Memadai	3	1	3
Belum terpenuhinya standart pelayanan penyelenggaraan terminal tipe B Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	3	1	3	Ada	Membuat skala prioritas jenis fasilitas dan lokasi terminal tipe B yang akan di rehabilitasi	Memadai	2	1	2
Kurangnya minat masyarakat menggunakan transportasi umum di terminal	3	2	6	Ada	1. Rehabilitasi fasilitas utama dan penunjang terminal 2. Menugaskan petugas dengan tupoksi pengarah arus bus untuk masuk ke Terminal	Memadai	3	1	3
Belum terpenuhinya standart pelayanan penyelenggaraan Terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	3	1	3	Ada	Membuat skala prioritas jenis fasilitas dan lokasi Terminal Tipe B yang akan di rehabilitasi	Belum Memadai	2	1	2
Berkurangnya minat masyarakat menggunakan transportasi umum di terminal	4	3	12	Ada	1. Rehabilitasi fasilitas utama dan penunjang terminal 2. Menugaskan petugas dengan tupoksi pengarah arus bus untuk masuk ke terminal	Memadai	2	3	6

Belum terpenuhinya Fasilitas Utama dan Pendukung terminal tipe B sesuai ketentuan perundang-undangan	3	3	9	Ada	Membuat skala prioritas jenis fasilitas dan lokasi terminal tipe B yang akan di rehabilitasi	Memadai	2	2	4
Terdapat titik lokasi yang potensial jumlah penumpangnya namun belum ada Tempat Pemberhentian Bus (TPB)	3	3	9	Ada	Penumpang trans Jateng pada lokasi tersebut harus berjalan kaki atau diantar untuk menuju halte terdekat karena Trans Jateng menaikan/menurunkan penumpang pada Tempat Pemberhentian Bus (TPB)	Memadai	2	3	6
Spesifikasi teknis yang sesuai DED tidak sesuai kondisi lapangan akibat penolakan	4	3	12	Ada	Melakukan penggeseran TPB ke titik yang tidak terjadi penolakan	Memadai	3	2	6
Adanya rute yang terlayani dibawah kondisi ideal nilai load factor penumpangnya	4	4	16	Ada	Mengajak sekolah-sekolah yang berada pada rute Trans Jateng untuk melaksanakan kegiatan edutrip menggunakan bus Trans Jateng dan memberikan sosialisasi kepada pabrik atau kantor-kantor yang dilewati rute Trans Jateng untuk menggunakan bus Trans Jateng sebagai moda angkutan dari/menuju kantor	Memadai	3	4	12

Menurunnya tingkat Keamanan dan keselamatan transportasi laut dan ASDP	4	4	16	Ada	Sosialisasi pemenuhan kelaiklautan kapal untuk keamanan dan keselamatan transportasi laut dan ASDP	Memadai	3	3	9
Trayek penyeberangan ASDP belum semuanya ditetapkan	2	1	2	Ada	Rekap data kebutuhan trayek	Memadai	1	1	1
Penyelenggaraan ASDP tidak dapat berjalan maksimal	2	1	2	Ada	Melengkapi sarana dan prasarana ASDP	Memadai	1	1	1
Terkendalanya legalitas perizinan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	4	4	16	Ada	FGD pelaku usaha angkutan laut dan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan	Memadai	3	3	9
Kegiatan usaha yang dijalankan pelaku usaha tidak sesuai dengan perizinan berusahnya	3	5	15	Ada	Memeriksa secara berkala pada sistem OSS RBA	Memadai	2	5	10
Menurunnya tingkat kunjungan kapal akibat kinerja pelabuhan yang menurun	3	4	12	Ada	Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelabuhan pengumpan regional di Jawa Tengah	Memadai	2	2	4
Ruas jalan belum terpenuhi kebutuhan minimalnya	4	3	12	Ada	Usulan Bantuan Teknis Kemenhub dan CSR	Belum Memadai	3	4	12

Belum seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota berpartisipasi dalam penilaian lomba tertib lalu lintas (Wahana Tata Nugraha)	3	2	6	Ada	Sosialisasi dan Koordinasi dengan Pemerintah Kab/Kota	Memadai	2	2	4
Rekomendasi Forum LLAJ atas permasalahan belum mampu menjawab rencana aksi yang telah disusun	3	3	9	Ada	Melaksanakan supervisi Daerah Rawan Kecelakaan	Memadai	2	3	6
Terdapat Pembangun/Pengembang pusat kegiatan belum melaksanakan kewajiban penanganan dampak lalu lintas yang tertuang dalam Persetujuan Teknis Andalalin	2	3	6	Ada	Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil andalalin	Memadai	2	2	4

Jumlah perlengkapan jalan terpasang belum dapat memenuhi prioritas lokasi yang memerlukan pemasangan perlengkapan jalan di Jalan Provinsi Jawa Tengah	3	4	12	Ada	1. Pada setiap pelaksanaan dan monitoring kegiatan dilakukan pengecekan data kondisi lapangan untuk kebutuhan updating data kondisi perlengkapan jalan yang di input di GIS Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Menampung, menginventarisir, memetakan, dan membuat skala prioritas pemasangan perlengkapan jalan berdasarkan surat permohonan pemasangan perlengkapan jalan yang dikirimkan oleh Kabupaten/Kota; 3. Melaksanakan survey untuk menentukan titik lokasi pemasangan perlengkapan jalan sesuai skala prioritas.	Belum Memadai	3	4	12
Meningkatnya tingkat frekuensi dan resiko di Lokasi Daerah Rawan Kecelakaan	3	4	12	Ada	Pemasangan perlengkapan jalan berupa guardrail dan rambu chevron	Belum Memadai	3	4	12

Surat pemberitahuan perbaikan dan pemberitahuan untuk tertib administrasi tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan	3	4	12	Ada	Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan secara bertahap dan maksimal	Belum Memadai	3	4	12
Kurang maksimalnya pengelolaan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	3	4	12	Ada	Pemasangan Perlengkapan jalan DRK, Himbauan, Sosialisasi	Belum Memadai	3	4	12
Jumlah kebutuhan Belanja Administrasi Umum Perangkat Daerah belum memenuhi prioritas	3	4	12	Ada	Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan secara bertahap dan maksimal	Belum Memadai	3	4	12
Meningkatnya tingkat frekuensi dan resiko di Lokasi Daerah Rawan Kecelakaan	3	4	12	Ada	Memasang Perlengkapan Jalan sementara	Belum Memadai	3	4	12
Jumlah pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi Daerah Rawan Kecelakaan belum dapat memenuhi prioritas lokasi yang memerlukan pemasangan perlengkapan jalan di Jalan Provinsi Jawa Tengah	3	4	12	Ada	Pemasangan rambu - rambu sementara dan berita jalan	Memadai	3	4	12
Meningkatnya tingkat frekuensi dan resiko di Lokasi Daerah Rawan Kecelakaan	3	4	12	Ada	Pemasangan perlengkapan jalan berupa guardrail dan rambu chevron	Belum Memadai	3	4	12

Jumlah pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi Daerah Rawan Kecelakaan belum dapat memenuhi prioritas lokasi yang memerlukan pemasangan perlengkapan jalan di Jalan Provinsi Jawa Tengah	3	4	12	Ada	Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan secara bertahap dan maksimal	Belum Memadai	3	4	12
Meningkatnya tingkat frekuensi dan resiko di Lokasi Daerah Rawan Kecelakaan	3	4	12	Ada	Pemasangan perlengkapan jalan berupa Guardrail dan Rambu Chevron	Belum Memadai	3	4	12
Jumlah pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi Daerah Rawan Kecelakaan belum dapat memenuhi prioritas lokasi yang memerlukan pemasangan perlengkapan jalan di Jalan Provinsi Jawa Tengah	3	4	12	Ada	Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan secara bertahap dan maksimal	Belum Memadai	3	4	12
Meningkatnya tingkat frekuensi dan resiko di Lokasi Daerah Rawan Kecelakaan	3	4	12	Ada	Pemasangan perlengkapan jalan pada Titik Daerah Rawan Kecelakaan Sesuai Kebutuhan Berdasarkan hasil survei lapangan	Memadai	2	3	6

Jumlah pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi Daerah Rawan Kecelakaan belum dapat memenuhi prioritas lokasi yang memerlukan pemasangan perlengkapan jalan di Jalan Provinsi Jawa Tengah	3	4	12	Ada	Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan secara bertahap dan maksimal	Memadai	2	3	6
Banyaknya perusahaan karoseri yang belum menerapkan Standart Manajemen Keselamatan	4	3	12	Ada	Melakukan Koordinasi untuk melakukan pengawasan penerapan Standart Manajemen Keselamatan dengan BPTD Wilayah Kelas II Jateng terkait Data perusahaan karoseri yang masih aktif di Provinsi Jawa Tengah	Memadai	3	2	6
Terdapat Kendaraan Wajib Uji yang tidak lolos Uji Berkala	3	2	6	Ada	Pembinaan dan pengawasan pada perusahaan karoseri terkait kesesuaian persyaratan teknis kendaraan	Memadai	2	2	4
Terdapat Kendaraan Yang Beroperasi Dalam Kondisi Tidak Laik Jalan pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I	4	3	12	Ada	Melaksanakan Pembinaan perusahaan kepada pemilik atau pengurus badan usaha	Belum Memadai	4	2	8

Jumlah pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi Daerah Rawan Kecelakaan belum dapat memenuhi prioritas lokasi yang memerlukan pemasangan perlengkapan jalan di Jalan Provinsi Jawa Tengah	4	2	8	Ada	Melakukan Rampcehck Secara Berkala sebagai sarana alat kontrol kondisi keselamatan kendaraan dan Melaksanakan Pembinaan kepada Pemilik Kendaraan melalui Perusahaan Angkutan Berbadan Hukum guna memberikan penekanan kepada pelaku usaha untuk menyediakan angkutan umum berkeselamatan	Memadai	2	2	4
Terdapat penyesuaian Perda Pemerintahan Kabupaten/Kota yang menyebabkan perubahan tarif pembayaran retribusi persampahan berubah	3	2	6	Ada	Diberikan himbauan & peringatan	Belum Memadai	3	2	6
Gedung kantor dan bangunan lainnya serta sarana dan prasarannya masih kurang terawat	2	1	2	Ada	1. Melakukan Rampcehck Secara Berkala 2. Melaksanakan Pembinaan kepada Pemilik Kendaraan melalui Perusahaan Angkutan Berbadan Hukum	Memadai	1	1	1
Surat pemberitahuan perbaikan dan pemberitahuan untuk tertib administrasi tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan	4	3	12	Ada	Pembinaan Perusahaan	Memadai	4	2	8

Terdapat Kendaraan Yang Beroperasi Dalam Kondisi Tidak Laik Jalan pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wiayah III	3	3	9	Ada	1. Melakukan Rampcehck Secara Berkala 2. Melaksanakan Pembinaan kepada Pemilik Kendaraan melalui Perusahaan Angkutan Berbadan Hukum	Memadai	3	2	6
Surat pemberitahuan perbaikan dan pemberitahuan untuk tertib administrasi tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan	4	3	12	Ada	Pembinaan perusahaan	Belum Memadai	4	2	8
Terdapat Kendaraan Yang Beroperasi Dalam Kondisi Tidak Laik Jalan pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wiayah IV	4	2	8	Ada	1. Melakukan Rampcehck Secara Berkala 2. Melaksanakan Pembinaan kepada Pemilik Kendaraan melalui Perusahaan Angkutan Berbadan Hukum	Memadai	2	2	4
Surat pemberitahuan perbaikan dan pemberitahuan untuk tertib administrasi tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan	4	3	12	Ada	Pembinaan perusahaan	Belum Memadai	4	2	8
Terdapat kendaraan yang beroperasi dalam kondisi tidak laik jalan pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wiayah V	4	2	8	Ada	1. Melakukan rampcehck secara berkala 2. Melaksanakan pembinaan kepada pemilik kendaraan melalui perusahaan angkutan berbadan hukum	Memadai	2	2	4

Surat pemberitahuan perbaikan dan pemberitahuan untuk tertib administrasi tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan	2	2	4	Ada	Pembinaan perusahaan	Memadai	1	1	1
Masih belum terpenuhi kebutuhan tingkat pelayanan umum dan keuangan	2	2	4	Ada	1. Melakukan Rampcehck Secara Berkala 2. Melaksanakan Pembinaan kepada Pemilik Kendaraan melalui Perusahaan Angkutan Berbadan Hukum	Memadai	1	1	1
Jumlah perlengkapan jalan terpasang di perlintasan sebidang KA belum dapat memenuhi prioritas lokasi yang memerlukan pemasangan perlengkapan jalan	4	3	12	Ada	1. Pada setiap pelaksanaan dan monitoring kegiatan dilakukan pengecekan data kondisi lapangan untuk kebutuhan updating data kondisi perlengkapan jalan yang di input di GIS Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Melaksanakan survey untuk menentukan titik lokasi pemasangan perlengkapan jalan sesuai skala prioritas.	Belum Memadai	4	3	12

Kurang optimalnya keselamatan di perlintasan sebidang KA	3	3	9	Ada	Pemeliharaan perlintasan yang sudah terpasang dan pemenuhan fasilitas keselamatan perlintasan sebidang KA	Belum Memadai	3	3	9
Tingkat kinerja belum terlaporkan tepat waktu	3	3	9	Ada	Penyusunan Database melalui sistem dan Pemantau sistem Controlling	Memadai	2	3	6
Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi tidak tepat waktu	3	3	9	Ada	Penyusunan Database melalui sistem dan dokumen laporan tahunan serta perhubungan dalam angka	Memadai	2	3	6
Pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak efektif dan efisien	3	3	9	Ada	Berkoordinasi dengan pihak terkait	Memadai	2	3	6
Administrasi keuangan tidak berjalan secara efisien	2	3	6	Ada	Monitoring dan evaluasi secara berkala	Memadai	1	3	3
Dokumen pencairan yang diajukan berpotensi tidak lengkap/tidak benar	3	5	15	Ada	Adanya pengawasan dan evaluasi oleh pimpinan	Memadai	2	5	10
Proses klaim Asuransi sulit dilakukan	3	3	9	Ada	Dibentuk SK Kepala Dinas tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dan Tim Pengadaan Barang/Jasa	Memadai	2	3	6

Pelaksanaan Kegiatan tidak terjadwal	2	3	6	Ada	Dibentuk SK Kepala Dinas tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dan Tim Pengadaan Barang/Jasa	Memadai	2	2	4
Penyediaan tidak tepat waktu	3	3	9	Ada	Dibentuk SK Kepala Dinas tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dan Tim Pengadaan Barang/Jasa	Memadai	2	3	6
Penyediaan tidak tepat waktu	3	2	6	Ada	Dibentuk SK Kepala Dinas tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dan Tim Pengadaan Barang/Jasa	Memadai	2	2	4
Penyediaan tidak tepat waktu	3	2	6	Ada	Dibentuk SK Kepala Dinas tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dan Tim Pengadaan Barang/Jasa	Memadai	2	2	4
Menurunnya kinerja (kerusakan) sarana dan prasarana pemerintahan	3	2	6	Ada	Optimalisasi pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan sesuai dengan kemendesakan	Memadai	2	2	4
Tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah belum optimal	2	2	2	Ada	1. Memotivasi kepedulian pegawai terkait pengelolaan data kepegawaian yang lebih baik 2. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan supaya tidak terjadi keterlambatan	Memadai	2	1	2

Penyusunan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN mengalami keterlambatan	2	2	2	Ada	Melakukan monitoring pelaksanaan setiap kegiatan supaya tidak terjadi keterlambatan	Memadai	2	1	2
Layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah belum optimal	2	2	2	Ada	1. Memberdayakan tenaga Non ASN 2. Memotivasi kepedulian pegawai terkait pengelolaan data kepegawaian yang lebih baik	Memadai	2	1	2
Layanan administrasi umum perangkat daerah belum optimal	2	2	2	Ada	melakukan efiseinsi dan efektifitas	Memadai	2	1	2
Penyusunan laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah belum optimal	2	2	2	Ada	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait	Memadai	2	1	2
Gedung kantor dan bangunan lainnya serta sarana dan prasarannya masih kurang terawat.	2	2	2	Ada	Melaksanakan pemeliharaan sesuai skala prioritas kerusakan	Memadai	2	1	2
Penyusunan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN mengalami keterlambatan	2	2	4	Ada	1. Memotivasi kepedulian pegawai terkait pengelolaan data kepegawaian yang lebih baik 2. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan supaya tidak terjadi keterlambatan	Memadai	2	1	2
Kurang maksimalnya pengelolaan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	4	3	12	Ada	Melakukan monitoring pelaksanaan setiap kegiatan supaya tidak terjadi keterlambatan	Memadai	2	3	6

Jumlah kebutuhan Belanja Administrasi Umum Perangkat Daerah belum memenuhi prioritas	2	3	6	Ada	1. Memberdayakan tenaga Non ASN 2. Memotivasi kepedulian pegawai terkait pengelolaan data kepegawaian yang lebih baik	Memadai	1	2	2
Terdapat penyesuaian Perda Pemerintahan Kabupaten/Kota yang menyebabkan perubahan tarif pembayaran retribusi persampahan berubah	2	3	6	Ada	melakukan efiseinsi dan efektifitas	Memadai	2	2	4
Gedung kantor dan bangunan lainnya serta sarana dan prasarannya masih kurang terawat.	2	2	4	Ada	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait	Memadai	1	1	1
Kurangnya minat masyarakat menggunakan transportasi umum di terminal	3	3	9	Ada	Melaksanakan pemeliharaan sesuai skala prioritas kerusakan	Memadai	3	2	6
Meningkatnya tingkat frekuensi dan resiko di Lokasi Daerah Rawan Kecelakaan	3	1	3	Ada	1. Memotivasi kepedulian pegawai terkait pengelolaan data kepegawaian yang lebih baik 2. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan supaya tidak terjadi keterlambatan	Memadai	2	1	2
Surat pemberitahuan perbaikan dan pemberitahuan untuk tertib administrasi tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan	2	2	4	Belum Ada	Melakukan monitoring pelaksanaan setiap kegiatan supaya tidak terjadi keterlambatan	Memadai	2	1	2

Menurunnya kepuasan masyarakat terhadap Sarana Prasarana di Terminal	2	3	6	Ada	1. Memberdayakan tenaga Non ASN 2. Memotivasi kepedulian pegawai terkait pengelolaan data kepegawaian yang lebih baik	Memadai	2	2	4
Terdapat Kendaraan Yang Beroperasi Dalam Kondisi Tidak Laik Jalan pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wiayah II	2	2	4	Ada	melakukan efiseinsi dan efektifitas	Memadai	2	1	2
Kondisi lokasi DRK tidak dapat direhabilitasi	3	2	6	Ada	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait	Memadai	2	2	4
Terdapat Kendaraan Yang Beroperasi Dalam Kondisi Tidak Laik Jalan pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wiayah VI	3	2	6	Ada	Melaksanakan pemeliharaan sesuai skala prioritas kerusakan	Memadai	2	2	4
Masih belum terpenuhi kebutuhan tingkat pelayanan umum dan keuangan	2	2	4	Ada	1. Memotivasi kepedulian pegawai terkait pengelolaan data kepegawaian yang lebih baik 2. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan supaya tidak terjadi keterlambatan	Memadai	2	1	2
Penyusunan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN mengalami keterlambatan	2	2	4	Ada	Melakukan monitoring pelaksanaan setiap kegiatan supaya tidak terjadi keterlambatan	Memadai	2	1	2

Kurang maksimalnya pengelolaan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	2	2	4	Ada	1. Memberdayakan tenaga Non ASN 2. Memotivasi kepedulian pegawai terkait pengelolaan data kepegawaian yang lebih baik	Memadai	2	1	2
Jumlah kebutuhan Belanja Administrasi Umum Perangkat Daerah belum memenuhi prioritas	2	2	4	Ada	melakukan efiseinsi dan efektifitas penggunaannya	Memadai	2	1	2
Terdapat penyesuaian Perda Pemerintahan Kabupaten/Kota yang menyebabkan perubahan tarif pembayaran retribusi persampahan berubah.	2	2	4	Ada	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait	Memadai	2	1	2
Gedung kantor dan bangunan lainnya serta sarana dan prasarannya masih kurang terawat.	2	2	4	Ada	Melaksanakan pemeliharaan sesuai skala prioritas kerusakan	Memadai	2	1	2
masih belum terpenuhinya kebutuhan tingkat pelayanan umum dan keuangan	2	2	4	Ada	1. Memotivasi kepedulian pegawai terkait pengelolaan data kepegawaian yang lebih baik 2. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan supaya tidak terjadi keterlambatan	Memadai	2	1	2
Penyusunan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN mengalami keterlambatan	2	2	4	Ada	Melakukan monitoring pelaksanaan setiap kegiatan supaya tidak terjadi keterlambatan	Memadai	2	1	2

Kurang maksimalnya pengelolaan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	2	2	4	Ada	1. Memberdayakan tenaga Non ASN 2. Memotivasi kepedulian pegawai terkait pengelolaan data kepegawaian yang lebih baik	Memadai	2	1	2
Jumlah kebutuhan Belanja Administrasi Umum Perangkat Daerah belum memenuhi prioritas	2	2	4	Ada	melakukan efiseinsi dan efektifitas penggunaannya	Memadai	2	1	2
Terdapat penyesuaian Perda Pemerintahan Kabupaten/Kota yang menyebabkan perubahan tarif pembayaran retribusi persampahan berubah	2	2	4	Ada	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait	Memadai	2	1	2
Gedung kantor dan bangunan lainnya serta sarana dan prasarannya masih kurang terawat	2	2	4	Ada	Melaksanakan pemeliharaan sesuai skala prioritas kerusakan	Memadai	2	1	2
Masih belum terpenuhi kebutuhan tingkat pelayanan umum dan keuangan	2	2	4	Ada	1. Memotivasi kepedulian pegawai terkait pengelolaan data kepegawaian yang lebih baik 2. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan supaya tidak terjadi keterlambatan	Memadai	1	1	1
Penyusunan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN mengalami keterlambatan	2	2	4	Ada	Melakukan monitoring pelaksanaan setiap kegiatan supaya tidak terjadi keterlambatan	Memadai	1	1	1

Kurang maksimalnya pengelolaan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	2	2	4	Ada	1. Memberdayakan tenaga Non ASN 2. Memotivasi kepedulian pegawai terkait pengelolaan data kepegawaian yang lebih baik	Memadai	1	1	1
Jumlah kebutuhan Belanja Administrasi Umum Perangkat Daerah belum memenuhi prioritas	2	2	4	Ada	melakukan efiseinsi dan efektifitas penggunaannya	Memadai	1	1	1
Terdapat penyesuaian Perda Pemerintahan Kabupaten/Kota yang menyebabkan perubahan tarif pembayaran retribusi persampahan berubah.	2	2	4	Ada	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait	Memadai	1	1	1
Gedung kantor dan bangunan lainnya serta sarana dan prasarannya masih kurang terawat.	3	3	9	Ada	Melaksanakan pemeliharaan sesuai skala prioritas kerusakan	Memadai	2	2	4
Menurunnya tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Balai Transportasi Jawa Tengah	3	2	6	Ada	Melakukan penyediaan sesuai prioritas dengan melihat keterdesakan	Belum Memadai	2	2	4
Penyusunan dokumen administrasi keuangan tidak baik	3	3	9	Ada	Melakukan pembinaan dan pengawasan penyusunan dokumen administrasi keuangan	Memadai	2	2	4
Menurunnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	3	3	9	Ada	Peningkatan kualitas layanan sesuai SOP	Memadai	2	2	4

Menurunnya layanan administrasi umum Perangkat Daerah	3	2	6	Ada	Identifikasi kebutuhan dan pemenuhannya sesuai dengan skala prioritas	Belum Memadai	2	2	4
Kegiatan tidak dilaporkan dengan baik	3	2	6	Ada	melakukan evaluasi kegiatan agar sesuai dengan kebutuhan riil	Belum Memadai	2	2	4
Kegiatan tata usaha kurang berjalan dengan baik	3	3	9	Ada	melakukan evaluasi kegiatan dan identifikasi kondisi barang milik daerah	Belum Memadai	2	2	4

Tabel 3
Risiko Prioritas

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Berkurangnya jumlah angkutan umum yang beroperasi	9	Bidang Angkutan Jalan	Melampaui batas usia kendaraan, perijinan di OSS belum terverifikasi, jaringan trayek tidak tersedia, dampak covid menyebabkan perusahaan belum bisa melakukan peremajaan	Pengeluaran untuk biaya transportasi masyarakat meningkat
Menurunnya izin penyelenggaraan AODT yang diterbitkan	6	Bidang Angkutan Jalan	pendapatan pengusaha angkutan umum tidak sebanding dengan biaya operasional kendaraan	kualitas pelayanan angkutan umum menurun
Terdapat Angkutan Taksi (Taksi, AJDP,ASK) yang melampaui batas usia kendaraan	6	Bidang Angkutan Jalan- AOTDT	Perusahaan belum bisa melakukan peremajaan	Terdapat kendaraan Taksi (Taksi, AJDP,ASK) yang tidak perpanjangan izin
Terdapat Angkutan Barang Umum yang belum berizin	6	Bidang Angkutan Jalan- AOTDT	Kurangnya sosialisasi terhadap PP 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko	Terdapat kendaraan Angkutan Barang Umum yang belum terverifikasi di OSS
menurunnya izin penyelenggaraan AODT yang diterbitkan	6	Bidang Angkutan Jalan- AODT	pendapatan pengusaha angkutan umum tidak sebanding dengan biaya operasional kendaraan	kualitas pelayanan angkutan umum menurun
Tayek yang dilapangan tidak sesuai dengan akhir trayek (berhenti di pertengahan trayek)	2	Bidang Angkutan Jalan- AODT	berkurangnya jumlah penumpang dan biaya operasional tinggi jika sampai titik akhir trayek	Hasil survey tarif kurang optimal

Terdapat kawasan pedesaan antar kabupaten kota dalam provinsi belum terlayani jaringan trayek pedesaan	9	Bidang Angkutan Jalan- Angkutan Aglomerasi Perkotaan dan Perbatasan	Belum semua jaringan trayek pedesaan tersusun perencanaannya	Masyarakat pedesaan tidak mendapatkan pelayanan transportasi
Terdapat kawasan perkotaan antar kabupaten kota dalam provinsi belum terlayani jaringan trayek perkotaan	9	Bidang Angkutan Jalan- Angkutan Aglomerasi Perkotaan dan Perbatasan	Belum semua jaringan trayek perkotaan tersusun perencanaannya	Pengeluaran biaya transportasi masyarakat meningkat
Menurunnya jumlah penumpang angkutan umum ada masa angkutan lebaran dan nataru	9	Bidang Angkutan Jalan	pengguna kendaraan pribadi lebih banyak dan terjadi kenaikan harga tiket	meningkatnya resiko terjadinya kemacetan dan terjadinya inflasi
Menurunnya jumlah penumpang angkutan umum pada masa angkutan lebaran, natal dan tahun baru (nataru)	9	Bidang Angkutan Jalan- AODT	pengguna kendaraan pribadi lebih banyak	meningkatnya resiko terjadinya kemacetan
terjadinya penyalahgunaan pemanfaatan terminal	4	Bidang Jatraska	Penyewa aset melakukan perubahan sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya	Mengganggu kegiatan operasional terminal
Belum terpenuhinya standart pelayanan minimal penyelenggaraan terminal tipe B	12	Bidang Jatraska- Terminal Angkutan Jalan	Peningkatan standar pelayanan minimal dikarenakan adanya prioritas pengembangan terminal	Rendahnya kepuasan masyarakat akibat masih adanya terminal penumpang tipe B yang kondisinya belum optimal
Kurangnya jumlah simpul dan jaringan yang ditingkatkan	6	Bidang Jatraska	Proses Penyerahan aset yang belum selesai	Masyarakat tidak mendapat layanan simpul transportasi yang memadai

Kurangnya jumlah simpul dan jaringan yang ditingkatkan	6	Bidang Jatranska-Perencanaan Transportasi	Proses Penyerahan aset yang belum selesai	Masyarakat tidak mendapat layanan simpul transportasi yang memadai
Kurangnya minat masyarakat menggunakan transportasi umum di terminal	3	BPSPP Wilayah I	1. Penumpang masih memilih angkutan yang bisa menjemput dan mengantarkan sampai lokasi tujuan atau tetap memilih menggunakan kendaraan pribadi 2. Lokasi terminal tidak strategis sehingga bus tidak masuk ke dalam terminal	Tidak berfungsinya fungsi terminal sebagai simpul transportasi
Belum terpenuhinya standart pelayanan penyelenggaraan terminal tipe B Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	2	BPSPP Wilayah I - Seksi Angkutan	Belum optimalnya rehabilitasi Fasilitas Utama dan Pendukung terminal	Rendahnya kepuasan masyarakat akibat masih adanya terminal tipe B yang kondisinya kurang baik
masih belum terpenuhi kebutuhan tingkat pelayanan umum dan keuangan	2	BPSPP II - Sub Bag TU	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Pelaksanaan layanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan administrasi kepegawaian mengalami keterlambatan
Penyusunan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN mengalami keterlambatan	6	BPSPP II - Sub Bag TU	Pelaksanaan kegiatan berjalan tidak sesuai dengan jadwal waktu yang sudah direncanakan	Terjadi deviasi pelaksanaan kegiatan

Kurangnya minat masyarakat menggunakan transportasi umum di terminal	3	BPSPP Wilayah III	1. Penumpang masih memilih angkutan yang bisa menjemput dan mengantarkan sampai lokasi tujuan atau tetap memilih menggunakan kendaraan pribadi 2. Lokasi terminal tidak strategis sehingga bus tidak masuk ke dalam terminal	Tidak berfungsinya fungsi terminal sebagai simpul transportasi
Belum terpenuhinya standart pelayanan penyelenggaraan terminal tipe B Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	9	BPSPP Wilayah III - Seksi Angkutan	Belum optimalnya rehabilitasi Fasilitas Utama dan Pendukung terminal	Rendahnya kepuasan masyarakat akibat masih adanya terminal tipe B yang kondisinya kurang baik
Kurangnya minat masyarakat menggunakan transportasi umum di terminal	3	BPSPP Wilayah IV	1. Penumpang masih memilih angkutan yang bisa menjemput dan mengantarkan sampai lokasi tujuan atau tetap memilih menggunakan kendaraan pribadi 2. Lokasi terminal tidak strategis sehingga bus tidak masuk ke dalam terminal	Tidak berfungsinya fungsi terminal sebagai simpul transportasi
Belum terpenuhinya standart pelayanan penyelenggaraan terminal tipe B Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	2	BPSPP Wilayah IV - Seksi Angkutan	Belum optimalnya rehabilitasi Fasilitas Utama dan Pendukung terminal	Rendahnya kepuasan masyarakat akibat masih adanya terminal tipe B yang kondisinya kurang baik

Kurangnya minat masyarakat menggunakan transportasi umum di terminal	3	BPSPP Wilayah V	1. Penumpang masih memilih angkutan yang bisa menjemput dan mengantarkan sampai lokasi tujuan atau tetap memilih menggunakan kendaraan pribadi 2. Lokasi terminal tidak strategis sehingga bus tidak masuk ke dalam terminal	Tidak berfungsinya fungsi terminal sebagai simpul transportasi
Belum terpenuhinya standart pelayanan penyelenggaraan Terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	2	BPSPP Wilayah V - Seksi Angkutan	Belum optimalnya rehabilitasi fasilitas utama dan pendukung	Rendahnya kepuasan masyarakat akibat masih adanya Terminal Tipe B yang kondisinya kurang baik
Berkurangnya minat masyarakat menggunakan transportasi umum di terminal	1	BPSPP Wilayah VI	1. Penumpang masih memilih angkutan yang bisa menjemput dan mengantarkan sampai lokasi tujuan atau tetap memilih menggunakan kendaraan pribadi 2. Lokasi terminal tidak strategis sehingga bus tidak masuk ke dalam terminal	Tidak berfungsinya fungsi terminal sebagai simpul transportasi
Belum terpenuhinya Fasilitas Utama dan Pendukung terminal tipe B sesuai ketentuan perundang-undangan	4	BPSPP Wilayah VI	Belum optimalnya rehabilitasi Fasilitas Utama dan Pendukung terminal	Rendahnya kepuasan masyarakat akibat masih adanya terminal tipe B yang kondisinya kurang baik

Terdapat titik lokasi yang potensial jumlah penumpangnya namun belum ada Tempat Pemberhentian Bus (TPB)	6	Balai Transportasi Jawa Tengah	Masih terdapat resistensi angkutan eksisting yang melayani rute tersebut terhadap lokasi-lokasi yang mempunyai potensi penumpang	Penumpang trans Jateng pada lokasi tersebut harus berjalan kaki atau diantar untuk menuju halte terdekat karena Trans Jateng menaikan/menurunkan penumpang pada Tempat Pemberhentian Bus (TPB)
Spesifikasi teknis yang sesuai DED tidak sesuai kondisi lapangan akibat penolakan	6	Balai Transportasi Jawa Tengah- Seksi Sarana Prasarana	Terjadi penolakan dari masyarakat karena merasa terganggu adanya Tempat Pemberhentian Bus (TPB)	Terjadi perbedaan dalam DED dengan kondisi di lapangan
Adanya rute yang terlayani dibawah kondisi ideal nilai load factor penumpangnya	12	Balai Transportasi Jawa Tengah-Seksi Operasional	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap rute baru, lokasi halte atau TPB yang kurang ideal, atau rute yang dilalui memang bukan wilayah yang padat atau ramai dengan penumpang	Layanan menjadi kurang efektif dan bermanfaat karena jumlah penumpang yang sedikit
Menurunnya tingkat Keamanan dan keselamatan transportasi laut dan ASDP	9	Bidang Pelayaran	Transportasi laut dan ASDP tidak memenuhi kelaiklautan kapal	Jaminan keamanan dan keselamatan transportasi laut dan ASDP tidak terpenuhi
Trayek penyeberangan ASDP belum semuanya ditetapkan	1	Bidang Pelayaran-Lalu Lintas ASDP	Terdapat persyaratan penerbitan ijin trayek yang belum terpenuhi	Tidak adanya penyeberangan yang dapat melayani masyarakat
Penyelenggaraan ASDP tidak dapat berjalan maksimal	1	Bidang Pelayaran-Lalu Lintas ASDP	Kondisi sarana dan prasarana di Dermaga ASDP belum memenuhi SPM	Sarana dan prasarana penyeberangan tidak mendukung keamanan dan kenyamanan pengguna penyeberangan

Terkendalanya legalitas perizinan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	9	Bidang Pelayaran-Angkutan Laut	Kurangnya pemahaman dan sosialisasi kepada pelaku usaha yang akan melakukan perizinan berusaha	Terhambatnya para pelaku usaha dalam melakukan perizinan usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas
Kegiatan usaha yang dijalankan pelaku usaha tidak sesuai dengan perizinan berusahnya	10	Bidang Pelayaran-Angkutan Laut	Sertifikat standar dengan tingkat risiko menengah rendah perizinannya terbit tanpa melalui verifikasi	Penyalahgunaan perizinan berusaha
Menurunnya tingkat kunjungan kapal akibat kinerja pelabuhan yang menurun	4	Bidang Pelayaran-Kepelabuhanan	Tidak optimalnya pemeliharaan dan pemenuhan fasilitas pelabuhan pada pelabuhan pengumpan regional	Menurunnya produktifitas pelabuhan pengumpan regional
Ruas jalan belum terpenuhi kebutuhan minimalnya	12	Bidang Lalu Lintas Jalan	jumlah pemasangan fasilitas perlengkapan jalan tidak sesuai target	tidak tercapainya target pemasangan perlengkapan jalan
Belum seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota berpartisipasi dalam penilaian lomba tertib lalu lintas (Wahana Tata Nugraha)	4	Bidang Lalu Lintas Jalan- Manajemen Lalu Lintas	Kurangnya antusiasme pemerintah Kab/Kota untuk mengikuti lomba tertib lalu lintas Wahana Tata Nugraha	Belum optimalnya sistem transportasi di kota/kabupaten terkait dengan manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan umum

Rekomendasi Forum LLAJ atas permasalahan belum mampu menjawab rencana aksi yang telah disusun	6	Bidang Lalu Lintas Jalan- Manajemen Lalu Lintas	Terdapat OPD yang belum menjalankan hasil rekomendasi Forum LLAJ	Tidak tertanganinya Daerah Rawan Kecelakaan
Terdapat Pembangun/Pengembangan pusat kegiatan belum melaksanakan kewajiban penanganan dampak lalu lintas yang tertuang dalam Persetujuan Teknis Andalalin	4	Bidang Lalu Lintas Jalan- Manajemen Lalu Lintas	Dokumen Andalalin hanya merupakan salah satu syarat izin mendirikan bangunan	Timbulnya dampak lalu lintas (kemacetan & kecelakaan) akibat pembangunan/pengembangan pusat kegiatan
Jumlah perlengkapan jalan terpasang belum dapat memenuhi prioritas lokasi yang memerlukan pemasangan perlengkapan jalan di Jalan Provinsi Jawa Tengah	12	Bidang Lalu Lintas Jalan- Rekayasa Lalu Lintas Jalan	Terdapat usulan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan provinsi yang sifatnya mendesak yang belum masuk dalam perencanaan	Dengan tidak terpenuhinya kebutuhan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan maka tingkat keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal serta peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah tidak dapat tercapai.

Meningkatnya tingkat frekuensi dan resiko di Lokasi Daerah Rawan Kecelakaan	12	BPSPP Wilayah I	Fasilitas Perlengkapan Jalan Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan belum optimal	Bertambahnya korban kecelakaan dengan tingkat Fatalitas tinggi
Surat pemberitahuan perbaikan dan pemberitahuan untuk tertib administrasi tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan	8	BPSPP Wilayah I	Perusahaan tidak memperhatikan surat pemberitahuan karena faktor ekonomi yang tidak mumpuni untuk mengganti komponen kendaraan yang sudah tidak laik	Tidak ada perbaikan dari pihak perusahaan terhadap kendaraan yang beroperasi sehingga kendaraan yang beroperasi tetap dalam kondisi kurang laik jalan dan tidak tertib administrasi
Kurang maksimalnya pengelolaan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	2	BPSPP II - Sub Bag TU	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Pengelolaan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian kurang maksimal
Jumlah kebutuhan Belanja Administrasi Umum Perangkat Daerah belum memenuhi prioritas	4	BPSPP II - Sub Bag TU	Adanya perubahan harga pada saat pelaksanaan kegiatan	Paket belanja administrasi umum yang disediakan terbatas
Meningkatnya tingkat frekuensi dan resiko di Lokasi Daerah Rawan Kecelakaan	12	BPSPP Wilayah III	Fasilitas Perlengkapan Jalan Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan belum optimal	Bertambahnya korban kecelakaan dengan tingkat Fatalitas tinggi

Jumlah pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi Daerah Rawan Kecelakaan belum dapat memenuhi prioritas lokasi yang memerlukan pemasangan perlengkapan jalan di Jalan Provinsi Jawa Tengah	12	BPSPP Wilayah III - Seksi Lalu Lintas	Keterbatasan ruang milik jalan dan faktor penunjang pada pemasangan perlengkapan jalan	Meningkatnya jumlah fatalitas kecelakaan
Meningkatnya tingkat frekuensi dan resiko di Lokasi Daerah Rawan Kecelakaan	12	BPSPP Wilayah IV	Fasilitas Perlengkapan Jalan Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan belum optimal	Bertambahnya korban kecelakaan dengan tingkat Fatalitas tinggi
Jumlah pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi Daerah Rawan Kecelakaan belum dapat memenuhi prioritas lokasi yang memerlukan pemasangan perlengkapan jalan di Jalan Provinsi Jawa Tengah	12	BPSPP Wilayah IV - Seksi Lalu Lintas	Keterbatasan ruang milik jalan dan faktor penunjang pada pemasangan perlengkapan jalan	Belum idealnya pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi DRK
Meningkatnya tingkat frekuensi dan resiko di Lokasi Daerah Rawan Kecelakaan	12	BPSPP Wilayah V	Fasilitas Perlengkapan Jalan Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan belum optimal	Bertambahnya korban kecelakaan dengan tingkat fatalitas tinggi

Jumlah pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi Daerah Rawan Kecelakaan belum dapat memenuhi prioritas lokasi yang memerlukan pemasangan perlengkapan jalan di Jalan Provinsi Jawa Tengah	12	BPSPP Wilayah V - Seksi Lalu Lintas	Keterbatasan ruang milik jalan dan faktor penunjang pada pemasangan perlengkapan jalan	Belum idealnya pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi DRK
Meningkatnya tingkat frekuensi dan resiko di Lokasi Daerah Rawan Kecelakaan	12	BPSPP Wilayah VI	Fasilitas Perlengkapan Jalan Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan belum optimal	Bertambahnya korban kecelakaan dengan tingkat Fatalitas tinggi
Jumlah pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi Daerah Rawan Kecelakaan belum dapat memenuhi prioritas lokasi yang memerlukan pemasangan perlengkapan jalan di Jalan Provinsi Jawa Tengah	12	BPSPP Wilayah VI - Seksi Lalu Lintas	Keterbatasan ruang milik jalan dan faktor penunjang pada pemasangan perlengkapan jalan	Belum idealnya pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi DRK
Banyaknya perusahaan karoseri yang belum menerapkan Standart Manajemen Keselamatan	6	Bidang Lalu Lintas Jalan	Belum terinfonya peraturan terbaru tentang Standart Manajemen Keselamatan	Peningkatan kecelakaan disebabkan karena kendaraan tidak memenuhi standart laik jalan
Terdapat Kendaraan Wajib Uji yang tidak lolos Uji Berkala	4	Bidang Lalu Lintas Jalan- Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Kendaraan tidak sesuai Spesifikasi teknis (dimensi dan kelaikan kendaraan)	terjadi kecelakaan lalu lintas akibat overdimensi dan tidak laik jalan

Terdapat Kendaraan Yang Beroperasi Dalam Kondisi Tidak Laik Jalan pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wiayah I	4	BPSPP Wilayah I	Perusahaan atau Pemilik Kendaraan Angkutan Umum Yang Beroperasi Tidak mematuhi ketentuan standar kondisi kendaraan yang laik jalan sesuai peraturan perundang - undangan	Rendahnya jumlah angkutan yang beroperasi dalam kondisi laik jalan
Jumlah pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi Daerah Rawan Kecelakaan belum dapat memenuhi prioritas lokasi yang memerlukan pemasangan perlengkapan jalan di Jalan Provinsi Jawa Tengah	12	BPSPP Wilayah I - Seksi Lalu Lintas	Keterbatasan ruang milik jalan dan faktor penunjang pada pemasangan perlengkapan jalan	Belum idealnya pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi DRK
Terdapat penyesuaian Perda Pemerintahan Kabupaten/Kota yang menyebabkan perubahan tarif pembayaran retribusi persampahan berubah	1	BPSPP II - Sub Bag TU	Pengenaan tarif retribusi pelayanan persampahan sesuai dengan Perda terkait Retribusi Persampahan pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Bila terjadi perubahan Perda terkait pelaksanaan Retribusi Persampahan yang menetapkan adanya kenaikan tarif retribusi maka perlu diupayakan adanya penyesuaian
Gedung kantor dan bangunan lainnya serta sarana dan prasarananya masih kurang terawat	6	BPSPP II - Sub Bag TU	Pada saat pelaksanaan kegiatan terjadi perubahan harga dibandingkan pada saat penyusunan anggaran	Pemeliharaan yang dilaksanakan tidak dilakukan secara menyeluruh tetapi menyesuaikan ketersediaan anggaran yang ada

Surat pemberitahuan perbaikan dan pemberitahuan untuk tertib administrasi tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan	8	BPSPP Wilayah III	Perusahaan tidak memperhatikan surat pemberitahuan karena faktor ekonomi yang tidak mumpuni untuk mengganti komponen kendaraan yang sudah tidak laik	Tidak ada perbaikan dari pihak perusahaan terhadap kendaraan yang beroperasi sehingga kendaraan yang beroperasi tetap dalam kondisi kurang laik jalan dan tidak tertib administrasi
Terdapat Kendaraan Yang Beroperasi Dalam Kondisi Tidak Laik Jalan pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III	6	BPSPP Wilayah III - Seksi Angkutan	Perusahaan atau Pemilik Kendaraan Angkutan Umum Yang Beroperasi Tidak mematuhi ketentuan standar kondisi kendaraan yang laik jalan sesuai peraturan perundang - undangan	Rendahnya jumlah angkutan yang beroperasi dalam kondisi laik jalan
Surat pemberitahuan perbaikan dan pemberitahuan untuk tertib administrasi tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan	8	BPSPP Wilayah IV	Perusahaan tidak memperhatikan surat pemberitahuan karena faktor ekonomi yang tidak mumpuni untuk mengganti komponen kendaraan yang sudah tidak laik	Tidak ada perbaikan dari pihak perusahaan terhadap kendaraan yang beroperasi sehingga kendaraan yang beroperasi tetap dalam kondisi kurang laik jalan dan tidak tertib administrasi
Terdapat Kendaraan Yang Beroperasi Dalam Kondisi Tidak Laik Jalan pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV	4	BPSPP Wilayah IV - Seksi Angkutan	Perusahaan atau Pemilik Kendaraan Angkutan Umum Yang Beroperasi Tidak mematuhi ketentuan standar kondisi kendaraan yang laik jalan sesuai peraturan perundang - undangan	Rendahnya jumlah angkutan yang beroperasi dalam kondisi laik jalan

Surat pemberitahuan perbaikan dan pemberitahuan untuk tertib administrasi tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan	8	BPSPP Wilayah V	Perusahaan tidak memperhatikan surat pemberitahuan karena faktor ekonomi yang tidak mumpuni untuk mengganti komponen kendaraan yang sudah tidak laik	Tidak ada perbaikan dari pihak perusahaan terhadap kendaraan yang beroperasi sehingga kendaraan yang beroperasi tetap dalam kondisi kurang laik jalan dan tidak tertib administrasi
Terdapat kendaraan yang beroperasi dalam kondisi tidak laik jalan pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V	4	BPSPP Wilayah V - Seksi Angkutan	Perusahaan atau pemilik kendaraan angkutan umum yang beroperasi tidak mematuhi ketentuan standar kondisi kendaraan yang laik jalan sesuai peraturan perundang - undangan	Rendahnya jumlah angkutan yang beroperasi dalam kondisi laik jalan
Surat pemberitahuan perbaikan dan pemberitahuan untuk tertib administrasi tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan	1	BPSPP Wilayah VI	Perusahaan tidak memperhatikan surat pemberitahuan karena faktor ekonomi yang tidak mumpuni untuk mengganti komponen kendaraan yang sudah tidak laik	Tidak ada perbaikan dari pihak perusahaan terhadap kendaraan yang beroperasi sehingga kendaraan yang beroperasi tetap dalam kondisi kurang laik jalan dan tidak tertib administrasi
Masih belum terpenuhi kebutuhan tingkat pelayanan umum dan keuangan	2	BPSPP III - Sub Bag TU	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Pelaksanaan layanan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan dan administrasi kepegawaian mengalami keterlambatan

Jumlah perlengkapan jalan terpasang di perlintasan sebidang KA belum dapat memenuhi prioritas lokasi yang memerlukan pemasangan perlengkapan jalan	12	Bidang Jatranska	Terdapat usulan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan provinsi yang sifatnya mendesak yang belum masuk dalam perencanaan	Dengan tidak terpenuhinya kebutuhan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan maka tingkat keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Pedoman Teknis Pengendalian Lalu Lintas pada lokasi potensi kecelakaan perlintasan sebidang tidak dapat tercapai
Kurang optimalnya keselamatan di perlintasan sebidang KA	9	Bidang Jatranska-Perkeretaapian	Alih status ruas jalan	Tidak tersedianya fasilitas keselamatan perlintasan KA
Tingkat kinerja belum dilaporkan tepat waktu	6	Dinas Perhubungan - Sekretariat	belum adanya sistem pelaporan data yang memadai	dokumen yang tersusun belum bisa dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber data
Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi tidak tepat waktu	6	Dinas Perhubungan - Sekretariat	Terdapat data dukung dan data teknis yang belum memadai	Terhambatnya proses perencanaan dan penganggaran sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan
Pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak efektif dan efisien	6	Dinas Perhubungan - Sekretariat	Dokumen dan data dukung belum tersedia	Kegiatan perkantoran tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga mengganggu pelayanan masyarakat
Administrasi keuangan tidak berjalan secara efisien	3	Dinas Perhubungan - Sekretariat	Dokumen dan data dukung yang memadai belum tersedia	Kegiatan administrasi keuangan tidak berjalan sebagaimana mestinya

Dokumen pencairan yang diajukan berpotensi tidak lengkap/tidak benar	10	Dinas Perhubungan - Sekretariat	Adanya tekanan kepentingan	Menyebabkan biasanya fungsi verifikasi
Proses klaim Asuransi sulit dilakukan	6	Dinas Perhubungan - Sekretariat	Data dukung Klaim asuransi tidak lengkap	Klaim asuransi tidak dapat dilakukan
Pelaksanaan Kegiatan tidak terjadwal	4	Dinas Perhubungan - Sekretariat	Jadwal pelaksanaan kegiatan tidak dibuat sehingga kegiatan tidak berjalan maksimal	Kegiatan tidak dilaksanakan secara maksimal
Penyediaan tidak tepat waktu	6	Dinas Perhubungan - Sekretariat	Belum dibentuk penanggung jawab kegiatan	Penyediaan terlambat
Penyediaan tidak tepat waktu	4	Dinas Perhubungan - Sekretariat	Belum dibentuk penanggung jawab kegiatan	Penyediaan terlambat
Penyediaan tidak tepat waktu	4	Dinas Perhubungan - Sekretariat	Belum dibentuk penanggung jawab kegiatan	Penyediaan terlambat
Menurunnya kinerja (kerusakan) sarana dan prasarana pemerintahan	4	Dinas Perhubungan - Sekretariat	Kurang optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan	Menurunnya kinerja aparaturnya pemerintahan
Tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah belum optimal	2	BPSPP I - Sub Bag TU	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Pelaksanaan layanan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan dan administrasi kepegawaian mengalami keterlambatan
Penyusunan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN mengalami keterlambatan	2	BPSPP I - Sub Bag TU	Kecepatan penyelesaian laporan SPJ tidak sama	Dokumen administrasi pelaksanaan keuangan perangkat daerah mengalami keterlambatan
Layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah belum optimal	2	BPSPP I - Sub Bag TU	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Pengelolaan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian kurang maksimal

Layanan administrasi umum perangkat daerah belum optimal	2	BPSPP I - Sub Bag TU	Adanya perubahan harga pada saat pelaksanaan kegiatan	Memenuhi layanan administrasi umum menggunakan skala prioritas
Penyusunan laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah belum optimal	2	BPSPP I - Sub Bag TU	Pengenaan tarif retribusi pelayanan persampahan sesuai dengan Perda terkait Retribusi Persampahan pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Bila terjadi perubahan Perda terkait pelaksanaan Retribusi Persampahan yang menetapkan adanya kenaikan tarif retribusi maka perlu diupayakan adanya penyesuaian
Gedung kantor dan bangunan lainnya serta sarana dan prasarannya masih kurang terawat.	2	BPSPP I - Sub Bag TU	Pada saat pelaksanaan kegiatan terjadi perubahan harga	Pemeliharaan yang dilaksanakan tidak dilakukan secara menyeluruh
Penyusunan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN mengalami keterlambatan	2	BPSPP III - Sub Bag TU	Pelaksanaan kegiatan berjalan tidak sesuai dengan jadwal waktu yang sudah direncanakan	Terjadi deviasi pelaksanaan kegiatan
Kurang maksimalnya pengelolaan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	4	BPSPP III - Sub Bag TU	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Terhambatnya layanan administrasi kepegawaian
Jumlah kebutuhan Belanja Administrasi Umum Perangkat Daerah belum memenuhi prioritas	2	BPSPP III - Sub Bag TU	Adanya perubahan harga pada saat pelaksanaan kegiatan	Paket belanja administrasi umum yang disediakan terbatas

Terdapat penyesuaian Perda Pemerintahan Kabupaten/Kota yang menyebabkan perubahan tarif pembayaran retribusi persampahan berubah	4	BPSPP III - Sub Bag TU	Pengenaan tarif retribusi pelayanan persampahan sesuai dengan Perda terkait Retribusi Persampahan pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Bila terjadi perubahan Perda terkait pelaksanaan Retribusi Persampahan yang menetapkan adanya kenaikan tarif retribusi maka perlu diupayakan adanya penyesuaian
Gedung kantor dan bangunan lainnya serta sarana dan prasarananya masih kurang terawat.	4	BPSPP III - Sub Bag TU	Pada saat pelaksanaan kegiatan terjadi perubahan harga dibandingkan pada saat penyusunan anggaran.	Menurunnya kinerja aparatatur pemerintahan
Kurangnya minat masyarakat menggunakan transportasi umum di terminal	6	BPSPP Wilayah II	1. Kondisi fasilitas Terminal kurang memadai 2. Tidak ada daya tarik menuju terminal selain untuk mendapatkan Angkutan Umum 3. rendahnya kunjungan bus masuk terminal	Tidak berfungsinya fungsi terminal sebagai simpul transportasi dan ruang ekonomi
Meningkatnya tingkat frekuensi dan resiko di Lokasi Daerah Rawan Kecelakaan	12	BPSPP Wilayah II	Perlengkapan Jalan yang dipasang tidak sesuai dengan rekomendasi	Bertambahnya korban kecelakaan dengan tingkat Fatalitas tinggi
Surat pemberitahuan perbaikan dan pemberitahuan untuk tertib administrasi tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan	6	BPSPP Wilayah II	1. Tidak adanya pengawasan dan penindakan di Jalan 2. rendahnya kemampuan pengusaha untuk pemeliharaan armada	meningkatnya jumlah kecelakaan Angkutan Penumpang Umum akibat tidak laik jalan
Menurunnya kepuasan masyarakat terhadap Sarana Prasarana di Terminal	1	BPSPP Wilayah II - Seksi Angkutan	Belum optimalnya rehabilitasi Fasilitas Utama dan Pendukung terminal	berhentinya layanan Terminal akibat kerusakan fasilitas Terminal

Terdapat Kendaraan Yang Beroperasi Dalam Kondisi Tidak Laik Jalan pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wiayah II	1	BPSPP Wilayah II - Seksi Angkutan	Perusahaan atau Pemilik Kendaraan Angkutan Umum Yang Beroperasi Tidak mematuhi ketentuan standar kondisi kendaraan yang laik jalan sesuai peraturan perundang - undangan	Menurunnya Jumlah Angkutan Umum yang berijin
Kondisi lokasi DRK tidak dapat direhabilitasi	12	BPSPP Wilayah II - Seksi Lalu Lintas	Keterbatasan ruang milik jalan dan faktor penunjang pada pemasangan perlengkapan jalan	Meningkatnya frekuensi resiko kecelakaan di lokasi tersebut
Terdapat Kendaraan Yang Beroperasi Dalam Kondisi Tidak Laik Jalan pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wiayah VI	1	BPSPP Wilayah VI - Seksi Angkutan	Perusahaan atau Pemilik Kendaraan Angkutan Umum Yang Beroperasi Tidak mematuhi ketentuan standar kondisi kendaraan yang laik jalan sesuai peraturan perundang - undangan	Rendahnya jumlah angkutan yang beroperasi dalam kondisi laik jalan
Masih belum terpenuhi kebutuhan tingkat pelayanan umum dan keuangan	2	BPSPP IV - Sub Bag TU	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas	Pelaksanaan layanan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan dan administrasi kepegawaian mengalami keterlambatan,
Penyusunan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN mengalami keterlambatan	2	BPSPP IV - Sub Bag TU	Pelaksanaan kegiatan berjalan tidak sesuai dengan jadwal waktu yang sudah direncanakan	Terjadi deviasi pelaksanaan kegiatan

Kurang maksimalnya pengelolaan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	2	BPSPP IV - Sub Bag TU	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Pengelolaan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian kurang maksimal
Jumlah kebutuhan Belanja Administrasi Umum Perangkat Daerah belum memenuhi prioritas	2	BPSPP IV - Sub Bag TU	Adanya perubahan harga pada saat pelaksanaan kegiatan	Paket belanja administrasi umum yang disediakan terbatas
Terdapat penyesuaian Perda Pemerintahan Kabupaten/Kota yang menyebabkan perubahan tarif pembayaran retribusi persampahan berubah.	2	BPSPP IV - Sub Bag TU	Pengenaan tarif retribusi pelayanan persampahan sesuai dengan Perda terkait Retribusi Persampahan pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Bila terjadi perubahan Perda terkait pelaksanaan Retribusi Persampahan yang menetapkan adanya kenaikan tarif retribusi maka perlu diupayakan adanya penyesuaian
Gedung kantor dan bangunan lainnya serta sarana dan prasarannya masih kurang terawat.	2	BPSPP IV - Sub Bag TU	Pada saat pelaksanaan kegiatan terjadi perubahan harga dibandingkan pada saat penyusunan anggaran.	Pemeliharaan yang dilaksanakan tidak dilakukan secara menyeluruh tetapi menyesuaikan ketersediaan anggaran yang ada
masih belum terpenuhinya kebutuhan tingkat pelayanan umum dan keuangan	2	BPSPP V - Sub Bag TU	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Pelaksanaan layanan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan dan administrasi kepegawaian mengalami keterlambatan
Penyusunan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN mengalami keterlambatan	2	BPSPP V - Sub Bag TU	Pelaksanaan kegiatan berjalan tidak sesuai dengan jadwal waktu yang sudah direncanakan	Terjadi deviasi pelaksanaan kegiatan

Kurang maksimalnya pengelolaan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	2	BPSPP V - Sub Bag TU	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Pengelolaan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian kurang maksimal
Jumlah kebutuhan Belanja Administrasi Umum Perangkat Daerah belum memenuhi prioritas	2	BPSPP V - Sub Bag TU	Adanya perubahan harga pada saat pelaksanaan kegiatan	aket belanja administrasi umum yang disediakan terbatas
Terdapat penyesuaian Perda Pemerintahan Kabupaten/Kota yang menyebabkan perubahan tarif pembayaran retribusi persampahan berubah	2	BPSPP V - Sub Bag TU	Pengenaan tarif retribusi pelayanan persampahan sesuai dengan Perda terkait Retribusi Persampahan pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Bila terjadi perubahan Perda terkait pelaksanaan Retribusi Persampahan yang menetapkan adanya kenaikan tarif retribusi maka perlu diupayakan adanya penyesuaian
Gedung kantor dan bangunan lainnya serta sarana dan prasarannya masih kurang terawat	2	BPSPP V - Sub Bag TU	Pada saat pelaksanaan kegiatan terjadi perubahan harga dibandingkan pada saat penyusunan anggaran	Pemeliharaan yang dilaksanakan tidak dilakukan secara menyeluruh tetapi menyesuaikan ketersediaan anggaran yang ada
Masih belum terpenuhi kebutuhan tingkat pelayanan umum dan keuangan	1	BPSPP VI - Sub Bag TU	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Pelaksanaan layanan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan dan administrasi kepegawaian mengalami keterlambatan,
Penyusunan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN mengalami keterlambatan	1	BPSPP VI - Sub Bag TU	Pelaksanaan kegiatan berjalan tidak sesuai dengan jadwal waktu yang sudah direncanakan	Terjadi deviasi pelaksanaan kegiatan

Kurang maksimalnya pengelolaan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1	BPSPP VI - Sub Bag TU	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Pengelolaan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian kurang maksimal
Jumlah kebutuhan Belanja Administrasi Umum Perangkat Daerah belum memenuhi prioritas	1	BPSPP VI - Sub Bag TU	Adanya perubahan harga pada saat pelaksanaan kegiatan	Paket belanja administrasi umum yang disediakan terbatas
Terdapat penyesuaian Perda Pemerintahan Kabupaten/Kota yang menyebabkan perubahan tarif pembayaran retribusi persampahan berubah.	1	BPSPP VI - Sub Bag TU	Pengenaan tarif retribusi pelayanan persampahan sesuai dengan Perda terkait Retribusi Persampahan pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Bila terjadi perubahan Perda terkait pelaksanaan Retribusi Persampahan yang menetapkan adanya kenaikan tarif retribusi maka perlu diupayakan adanya penyesuaian
Gedung kantor dan bangunan lainnya serta sarana dan prasarannya masih kurang terawat.	4	BPSPP VI - Sub Bag TU	Pada saat pelaksanaan kegiatan terjadi perubahan harga dibandingkan pada saat penyusunan anggaran.	Pemeliharaan yang dilaksanakan tidak dilakukan secara menyeluruh tetapi menyesuaikan ketersediaan anggaran yang ada
Menurunnya tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Balai Transportasi Jawa Tengah	4	BALAITRANS - Sub Bag TU	Belum semua komponen pendukung pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan tersedia	Pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Balai Transportasi Jawa Tengah kurang maksimal
Penyusunan dokumen administrasi keuangan tidak baik	4	BALAITRANS - Sub Bag TU	Kurangnya pegawai yang mempunyai kompetensi	Dokumen administrasi keuangan tidak disusun dengan baik dan benar
Menurunnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	4	BALAITRANS - Sub Bag TU	Kualitas layanan administrasi kepegawaian menurun karena pelaksanaan tidak sesuai SOP	Pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian tidak sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan

Menurunnya layanan administrasi umum Perangkat Daerah	4	BALAITRANS - Sub Bag TU	Belum semua kebutuhan terakomodir	Adanya kebutuhan administrasi umum yang belum dapat terpenuhi secara optimal
Kegiatan tidak dilaporkan dengan baik	4	BALAITRANS - Sub Bag TU	Identifikasi kebutuhan belum optimal	Pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana
Kegiatan tata usaha kurang berjalan dengan baik	4	BALAITRANS - Sub Bag TU	Pemeliharaan Barang milik daerah tidak terpelihara dengan baik	Kegiatan tata usaha kurang berjalan dengan baik karena fungsi barang milik daerah belum optimal

Tabel 4
Rencana Tindak Pengendalian

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Trayek Angkutan Jalan	Berkurangnya jumlah angkutan umum yang beroperasi	9	Melampaui batas usia kendaraan, perijinan di OSS belum terverifikasi, jaringan trayek tidak tersedia, dampak covid menyebabkan perusahaan belum bisa melakukan peremajaan	Pengeluaran untuk biaya transportasi masyarakat meningkat			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Trayek Angkutan Jalan	Menurunnya izin penyelenggaraan AODT yang diterbitkan	6	pendapatan pengusaha angkutan umum tidak sebanding dengan biaya operasional kendaraan	kualitas pelayanan angkutan umum menurun			
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase angkutan taksi terpenuhi□	Terdapat Angkutan Taksi (Taksi, AJDP,ASK) yang melampaui batas usia kendaraan	6	Perusahaan belum bisa melakukan peremajaan	Terdapat kendaraan Taksi (Taksi, AJDP,ASK) yang tidak perpanjangan izin			
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase angkutan barang yang berijin	Terdapat Angkutan Barang Umum yang belum berizin	6	Kurangnya sosialisasi terhadap PP 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko	Terdapat kendaraan Angkutan Barang Umum yang belum terverifikasi di OSS			
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase Angkutan Orang Dalam Trayek yang berijin	menurunnya izin penyelenggaraan AODT yang diterbitkan	6	pendapatan pengusaha angkutan umum tidak sebanding dengan biaya operasional kendaraan	kualitas pelayanan angkutan umum menurun			

Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase Trayek yang Ditetapkan Pemutakhiran Tarif	Tayek yang dilapangan tidak sesuai dengan akhir trayek (berhenti di pertengahan trayek)	2	berkurangnya jumlah penumpang dan biaya operasional tinggi jika sampai titik akhir trayek	Hasil survey tarif kurang optimal			
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase jaringan trayek pedesaan antar kabupaten kota dalam provinsi yang ditetapkan	Terdapat kawasan pedesaan antar kabupaten kota dalam provinsi belum terlayani jaringan <u>trayek pedesaan</u>	9	Belum semua jaringan trayek pedesaan tersusun perencanaannya	Masyarakat pedesaan tidak mendapatkan pelayanan transportasi			
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase Kawasan perkotaan yang memiliki rencana layanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terdapat kawasan perkotaan antar kabupaten kota dalam provinsi belum terlayani jaringan trayek perkotaan	9	Belum semua jaringan trayek perkotaan tersusun perencanaannya	Pengeluaran biaya transportasi masyarakat meningkat			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan <u>angkutan umum</u>	Menurunnya jumlah penumpang angkutan umum ada masa angkutan lebaran dan nataru	9	pengguna kendaraan pribadi lebih banyak dan terjadi kenaikan harga tiket	meningkatnya resiko terjadinya kemacetan dan terjadinya inflasi			
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani	Menurunnya jumlah penumpang angkutan umum pada masa angkutan lebaran, natal dan tahun baru (<u>nataru</u>)	9	pengguna kendaraan pribadi lebih banyak	meningkatnya resiko terjadinya kemacetan			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase kunjungan Bus pada terminal tipe B	terjadinya penyalahgunaan pemanfaatan terminal	4	Penyewa aset melakukan perubahan sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya	Mengganggu kegiatan operasional terminal			

Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Presentase Keterpenuhihan SPM Terminal Tipe B	Belum terpenuhinya standart pelayanan minimal penyelenggaraan terminal tipe B	12	Peningkatan standar pelayanan minimal dikarenakan adanya prioritas pengembangan terminal	Rendahnya kepuasan masyarakat akibat masih adanya terminal penumpang tipe B yang kondisinya belum optimal	Melakukan identifikasi, evaluasi dan peningkatan standar pelayanan minimal terminal penumpang tipe B berdasarkan prioritas	Kepala bidang jaringan transportasi dan perkeretaapian	12 bulan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	Kurangnya jumlah simpul dan jaringan yang ditingkatkan	6	Proses Penyerahan aset yang belum selesai	Masyarakat tidak mendapat layanan simpul transportasi yang memadai			
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Persentase implementasi dokumen RIJLLAJ	Kurangnya jumlah simpul dan jaringan yang ditingkatkan	6	Proses Penyerahan aset yang belum selesai	Masyarakat tidak mendapat layanan simpul transportasi yang memadai			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pengunjung terminal tipe B pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Kurangnya minat masyarakat menggunakan transportasi umum di terminal	3	1. Penumpang masih memilih angkutan yang bisa menjemput dan mengantarkan sampai lokasi tujuan atau tetap memilih menggunakan kendaraan pribadi 2. Lokasi terminal tidak strategis sehingga bus tidak masuk ke dalam terminal	Tidak berfungsinya fungsi terminal sebagai simpul transportasi	Menumbuhkan minat masyarakat menggunakan transportasi umum di terminal	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I	12 Bulan
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Presentase terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I	Belum terpenuhinya standart pelayanan penyelenggaraan terminal tipe B Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	2	Belum optimalnya rehabilitasi Fasilitas Utama dan Pendukung terminal	Rendahnya kepuasan masyarakat akibat masih adanya terminal tipe B yang kondisinya kurang baik	Mengoptimalkan Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Tipe B dengan melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan terminal	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I	12 Bulan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B)	masih belum terpenuhi kebutuhan tingkat pelayanan umum dan keuangan	2	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Pelaksanaan layanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan administrasi kepegawaian mengalami keterlambatan	Memberikan pembinaan dan pengarahan kepada staf Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah II		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Penyusunan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN mengalami keterlambatan	6	Pelaksanaan kegiatan berjalan tidak sesuai dengan jadwal waktu yang sudah direncanakan	Terjadi deviasi pelaksanaan kegiatan	Melakukan monitoring pelaksanaan setiap kegiatan supaya tidak terjadi keterlambatan		
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pengunjung terminal tipe B pada Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Kurangnya minat masyarakat menggunakan transportasi umum di terminal	3	1. Penumpang masih memilih angkutan yang bisa menjemput dan mengantarkan sampai lokasi tujuan atau tetap memilih menggunakan kendaraan pribadi 2. Lokasi terminal tidak strategis sehingga bus tidak masuk ke dalam terminal	Tidak berfungsinya fungsi terminal sebagai simpul transportasi			
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Presentase terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III	Belum terpenuhinya standart pelayanan penyelenggaraan terminal tipe B Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	9	Belum optimalnya rehabilitasi Fasilitas Utama dan Pendukung terminal	Rendahnya kepuasan masyarakat akibat masih adanya terminal tipe B yang kondisinya kurang baik			

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pengunjung terminal tipe B pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Kurangnya minat masyarakat menggunakan transportasi umum di terminal	3	1. Penumpang masih memilih angkutan yang bisa menjemput dan mengantarkan sampai lokasi tujuan atau tetap memilih menggunakan kendaraan pribadi 2. Lokasi terminal tidak strategis sehingga bus tidak masuk ke dalam terminal	Tidak berfungsinya fungsi terminal sebagai simpul transportasi			
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Presentase terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV	Belum terpenuhinya standart pelayanan penyelenggaraan terminal tipe B Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	2	Belum optimalnya rehabilitasi Fasilitas Utama dan Pendukung terminal	Rendahnya kepuasan masyarakat akibat masih adanya terminal tipe B yang kondisinya kurang baik			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pengunjung terminal tipe B pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Kurangnya minat masyarakat menggunakan transportasi umum di terminal	3	1. Penumpang masih memilih angkutan yang bisa menjemput dan mengantarkan sampai lokasi tujuan atau tetap memilih menggunakan kendaraan pribadi 2. Lokasi terminal tidak strategis sehingga bus tidak masuk ke dalam terminal	Tidak berfungsinya fungsi terminal sebagai simpul transportasi			
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Presentase terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V	Belum terpenuhinya standart pelayanan penyelenggaraan Terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	2	Belum optimalnya rehabilitasi fasilitas utama dan pendukung	Rendahnya kepuasan masyarakat akibat masih adanya Terminal Tipe B yang kondisinya kurang baik			

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pengunjung terminal tipe B pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Berkurangnya minat masyarakat menggunakan transportasi umum di terminal	1	1. Penumpang masih memilih angkutan yang bisa menjemput dan mengantarkan sampai lokasi tujuan atau tetap memilih menggunakan kendaraan pribadi 2. Lokasi terminal tidak strategis sehingga bus tidak masuk ke dalam terminal	Tidak berfungsinya fungsi terminal sebagai simpul transportasi	Merehabilitasi Fasilitas Utama dan Fasilitas Pendukung Terminal	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI	12 bulan
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Presentase terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI	Belum terpenuhinya Fasilitas Utama dan Pendukung terminal tipe B sesuai ketentuan perundang-undangan	4	Belum optimalnya rehabilitasi Fasilitas Utama dan Pendukung terminal	Rendahnya kepuasan masyarakat akibat masih adanya terminal tipe B yang kondisinya kurang baik	Merehabilitasi Fasilitas Utama dan Fasilitas Pendukung Terminal	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI	12 bulan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum (Trans Jateng)	Terdapat titik lokasi yang potensial jumlah penumpangnya namun belum ada Tempat Pemberhentian Bus (TPB)	6	Masih terdapat resistensi angkutan eksisting yang melayani rute tersebut terhadap lokasi-lokasi yang mempunyai potensi penumpang	Penumpang trans Jateng pada lokasi tersebut harus berjalan kaki atau diantar untuk menuju halte terdekat karena Trans Jateng menaikan/menurunkan penumpang pada Tempat Pemberhentian Bus (TPB)			
Penyediaan Perlengkapan Jalan di JalanProvinsi	Persentase Jumlah Tempat Perhentian Bus (TPB) Terpenuhi	Spesifikasi teknis yang sesuai DED tidak sesuai kondisi lapangan akibat penolakan	6	Terjadi penolakan dari masyarakat karena merasa terganggu adanya Tempat Pemberhentian Bus (TPB)	Terjadi perbedaan dalam DED dengan kondisi di lapangan			
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) DaerahProvinsi	Jumlah penumpang terlayani angkutan umum (Trans Jateng) di kawasan aglomerasi perkotaan	Adanya rute yang terlayani dibawah kondisi ideal nilai load factor penumpangnya	12	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap rute baru, lokasi halte atau TPB yang kurang ideal, atau rute yang dilalui memang bukan wilayah yang padat atau ramai dengan penumpang	Layanan menjadi kurang efektif dan bermanfaat karena jumlah penumpang yang sedikit	Melakukan sosialisasi langsung terhadap masyarakat terhadap rute baru, lokasi halte dan membangun TPB yang potensial banyak calon penumpang	Kepala Balai Transportasi Jawa Tengah	12 Bulan

PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP	Menurunnya tingkat Keamanan dan keselamatan transportasi laut dan ASDP	9	Transportasi laut dan ASDP tidak memenuhi kelaiklautan kapal	Jaminan keamanan dan keselamatan transportasi laut dan ASDP tidak terpenuhi			
Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Persentase dokumen terlengkapi sebagai persyaratan ijin trayek berdasarkan tingkatannya	Trayek penyeberangan ASDP belum semuanya ditetapkan	1	Terdapat persyaratan penerbitan ijin trayek yang belum terpenuhi	Tidak adanya penyeberangan yang dapat melayani masyarakat			
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelabuhan SDP terpenuhi	Penyelenggaraan ASDP tidak dapat berjalan maksimal	1	Kondisi sarana dan prasarana di Dermaga ASDP belum memenuhi SPM	Sarana dan prasarana penyeberangan tidak mendukung keamanan dan kenyamanan pengguna penyeberangan			
Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang diawasi	Terkendalanya legalitas perizinan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	9	Kurangnya pemahaman dan sosialisasi kepada pelaku usaha yang akan melakukan perizinan berusaha	Terhambatnya para pelaku usaha dalam melakukan perizinan usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas			

Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang diawasi	Kegiatan usaha yang dijalankan pelaku usaha tidak sesuai dengan perizinan berusahnya	10	Sertifikat standar dengan tingkat risiko menengah rendah perizinannya terbit tanpa melalui verifikasi	Penyalahgunaan perizinan berusaha	Melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang perizinan berusahnya terbit otomatis	Kepala Bidang Pelayaran	12 Bulan
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Berth occupancy ratio	Menurunnya tingkat kunjungan kapal akibat kinerja pelabuhan yang menurun	4	Tidak optimalnya pemeliharaan dan pemenuhan fasilitas pelabuhan pada pelabuhan pengumpan regional	Menurunnya produktifitas pelabuhan pengumpan regional	Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional di Jawa Tengah	Kepala Bidang Pelayaran	12 Bulan

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan provinsi	Ruas jalan belum terpenuhi kebutuhan minimalnya	12	jumlah pemasangan fasilitas perlengkapan jalan tidak sesuai target	tidak tercapainya target pemasangan perlengkapan jalan	1. Pada setiap pelaksanaan dan monitoring kegiatan dilakukan pengecekan data kondisi lapangan untuk kebutuhan updating data kondisi perlengkapan jalan yang di input di GIS Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Menampung, menginventarisir, memetakan, dan membuat skala prioritas pemasangan perlengkapan jalan berdasarkan surat permohonan pemasangan perlengkapan jalan yang dikirimkan oleh Kabupaten/Kota; 3. Melaksanakan survey untuk menentukan titik lokasi pemasangan perlengkapan jalan	Kepala Bidang Lalu Lintas	12 Bulan
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi penilaian pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Provinsi Jateng	Belum seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota berpartisipasi dalam penilaian lomba tertib lalu lintas (Wahana Tata Nugraha)	4	Kurangnya antusiasme pemerintah Kab/Kota untuk mengikuti lomba tertib lalu lintas Wahana Tata Nugraha	Belum optimalnya sistem transportasi di kota/kabupaten terkait dengan manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan umum	Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi dengan Dinas Perhubungan Kab/Kota terkait kesiapan mengikuti lomba tertib lalu lintas Wahana Tata Nugraha	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan	12 Bulan

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Rekomendasi hasil forum LLAJ	Rekomendasi Forum LLAJ atas permasalahan belum mampu menjawab rencana aksi yang telah disusun	6	Terdapat OPD yang belum menjalankan hasil rekomendasi Forum LLAJ	Tidak tertanganinya Daerah Rawan Kecelakaan	1. Pemuktahiran Data Daerah Rawan Kecelakaan 2. Melakukan Forum LLAJ secara Berkala 3. Melakukan Monev terhadap Daerah Rawan Kecelakaan	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan	12 Bulan
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Persentase tingkat kepatuhan pelaksanaan rekomendasi andalalin	Terdapat Pembangun/Pengembang pusat kegiatan belum melaksanakan kewajiban penanganan dampak lalu lintas yang tertuang dalam Persetujuan Teknis Andalalin	4	Dokumen Andalalin hanya merupakan salah satu syarat izin mendirikan bangunan	Timbulnya dampak lalu lintas (kemacetan & kecelakaan) akibat pembangunan/pengembangan pusat kegiatan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kewajiban penanganan dampak lalu lintas yang tertuang dalam Persetujuan Teknis Andalalin	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan	12 Bulan

Penyediaan Perlengkapan Jalan di JalanProvinsi	Persentase perlengkapan jalan terpenuhi	Jumlah perlengkapan jalan terpasang belum dapat memenuhi prioritas lokasi yang memerlukan pemasangan perlengkapan jalan di Jalan Provinsi Jawa Tengah	12	Terdapat usulan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan provinsi yang sifatnya mendesak yang belum masuk dalam perencanaan	Dengan tidak terpenuhinya kebutuhan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan maka tingkat keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal serta peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah tidak dapat tercapai.	1. Pada setiap pelaksanaan dan monitoring kegiatan dilakukan pengecekan data kondisi lapangan untuk kebutuhan updating data kondisi perlengkapan jalan yang di input di GIS Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Menampung, menginventarisir, memetakan, dan membuat skala prioritas pemasangan perlengkapan jalan berdasarkan surat permohonan pemasangan perlengkapan jalan yang dikirimkan oleh Kabupaten/Kota; 3. Melaksanakan survey untuk menentukan titik lokasi pemasangan perlengkapan jalan	Kepala Bidang Lalu Lintas	12 Bulan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Presentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Meningkatnya tingkat frekuensi dan resiko di Lokasi Daerah Rawan Kecelakaan	12	Fasilitas Perlengkapan Jalan Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan belum optimal	Bertambahnya korban kecelakaan dengan tingkat Fatalitas tinggi	Memastikan fasilitas perlengkapan jalan tetap berfungsi sebagaimana mestinya	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I	12 bulan setiap tahun

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Surat pemberitahuan perbaikan dan pemberitahuan untuk tertib administrasi tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan	8	Perusahaan tidak memperhatikan surat pemberitahuan karena faktor ekonomi yang tidak mumpuni untuk mengganti komponen kendaraan yang sudah tidak laik	Tidak ada perbaikan dari pihak perusahaan terhadap kendaraan yang beroperasi sehingga kendaraan yang beroperasi tetap dalam kondisi kurang laik jalan dan tidak tertib administrasi	Memberikan Penyuluhan dan Sosialisasi terhadap pelaku usaha bidang angkutan umum di wilayah kerja BPSPP Wilayah I	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I	12 Bulan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Kurang maksimalnya pengelolaan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	2	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Pengelolaan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian kurang maksimal	Memberikan pembinaan kepada staf Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Jumlah kebutuhan Belanja Administrasi Umum Perangkat Daerah belum memenuhi prioritas	4	Adanya perubahan harga pada saat pelaksanaan kegiatan	Paket belanja administrasi umum yang disediakan terbatas	Melakukan efiseinsi dan efektifitas penggunaannya		
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Presentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Meningkatnya tingkat frekuensi dan resiko di Lokasi Daerah Rawan Kecelakaan	12	Fasilitas Perlengkapan Jalan Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan belum optimal	Bertambahnya korban kecelakaan dengan tingkat Fatalitas tinggi	Memastikan Fasilitas Perlengkapan Jalan tetap berfungsi sebagaimana mestinya	Kepala BPSPP Wilayah III	12 Bulan setiap tahun
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi Daerah Rawan Kecelakaan belum dapat memenuhi prioritas lokasi yang memerlukan pemasangan perlengkapan jalan di Jalan Provinsi Jawa Tengah	12	Keterbatasan ruang milik jalan dan faktor penunjang pada pemasangan perlengkapan jalan	Meningkatnya jumlah fatalitas kecelakaan	Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan secara bertahap dan berdasarkan prioritas	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III	12 bulan

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Presentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Meningkatnya tingkat frekuensi dan resiko di Lokasi Daerah Rawan Kecelakaan	12	Fasilitas Perlengkapan Jalan Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan belum optimal	Bertambahnya korban kecelakaan dengan tingkat Fatalitas tinggi	Memastikan fasilitas perlengkapan jalan tetap berfungsi sebagaimana mestinya	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV	12 Bulan
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi Daerah Rawan Kecelakaan belum dapat memenuhi prioritas lokasi yang memerlukan pemasangan perlengkapan jalan di Jalan Provinsi Jawa Tengah	12	Keterbatasan ruang milik jalan dan faktor penunjang pada pemasangan perlengkapan jalan	Belum idealnya pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi DRK	Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan secara bertahap dan berdasarkan prioritas	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV	12 Bulan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Presentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Meningkatnya tingkat frekuensi dan resiko di Lokasi Daerah Rawan Kecelakaan	12	Fasilitas Perlengkapan Jalan Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan belum optimal	Bertambahnya korban kecelakaan dengan tingkat fatalitas tinggi	Memastikan fasilitas perlengkapan jalan tetap berfungsi sebagaimana mestinya	Kepala BPSPPP Wilayah V	12 bulan setiap tahun

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi Daerah Rawan Kecelakaan belum dapat memenuhi prioritas lokasi yang memerlukan pemasangan perlengkapan jalan di Jalan Provinsi Jawa Tengah	12	Keterbatasan ruang milik jalan dan faktor penunjang pada pemasangan perlengkapan jalan	Belum idealnya pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi DRK	Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan secara bertahap dan berdasarkan prioritas	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V	12 Bulan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Presentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Meningkatnya tingkat frekuensi dan resiko di Lokasi Daerah Rawan Kecelakaan	12	Fasilitas Perlengkapan Jalan Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan belum optimal	Bertambahnya korban kecelakaan dengan tingkat Fatalitas tinggi	Memastikan fasilitas perlengkapan jalan tetap berfungsi sebagaimana mestinya	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI	12 bulan
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi Daerah Rawan Kecelakaan belum dapat memenuhi prioritas lokasi yang memerlukan pemasangan perlengkapan jalan di Jalan Provinsi Jawa Tengah	12	Keterbatasan ruang milik jalan dan faktor penunjang pada pemasangan perlengkapan jalan	Belum idealnya pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi DRK	Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan secara bertahap dan berdasarkan prioritas	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI	12 Bulan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Presentase kendaraan laik jalan di Jawa Tengah	Banyaknya perusahaan karoseri yang belum menerapkan Standart Manajemen Keselamatan	6	Belum terinfonya peraturan terbaru tentang Standart Manajemen Keselamatan	Peningkatan kecelakaan disebabkan karena kendaraan tidak memenuhi standart laik jalan			
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji berkala di Jawa Tengah	Terdapat Kendaraan Wajib Uji yang tidak lolos Uji Berkala	4	Kendaraan tidak sesuai Spesifikasi teknis (dimensi dan kelaikan kendaraan)	terjadi kecelakaan lalu lintas akibat overdimensi dan tidak laik jalan			

Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Terdapat Kendaraan Yang Beroperasi Dalam Kondisi Tidak Laik Jalan pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wiayah I	4	Perusahaan atau Pemilik Kendaraan Angkutan Umum Yang Beroperasi Tidak mematuhi ketentuan standar kondisi kendaraan yang laik jalan sesuai peraturan perundang - undangan	Rendahnya jumlah angkutan yang beroperasi dalam kondisi laik jalan	Melaksanakan Rampcheck di terminal Tipe B Wilayah Kerja BPSPP Wilayah I dan melaporkan kegiatan berupa rekap kegiatan bulanan kepada Bidang Terkait	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I	12 Bulan
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi Daerah Rawan Kecelakaan belum dapat memenuhi prioritas lokasi yang memerlukan pemasangan perlengkapan jalan di Jalan Provinsi Jawa Tengah	12	Keterbatasan ruang milik jalan dan faktor penunjang pada pemasangan perlengkapan jalan	Belum idealnya pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi DRK	Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan secara bertahap dan berdasarkan prioritas	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I	12 Bulan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Terdapat penyesuaian Perda Pemerintahan Kabupaten/Kota yang menyebabkan perubahan tarif pembayaran retribusi persampahan berubah	1	Pengenaan tarif retribusi pelayanan persampahan sesuai dengan Perda terkait Retribusi Persampahan pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Bila terjadi perubahan Perda terkait pelaksanaan Retribusi Persampahan yang menetapkan adanya kenaikan tarif retribusi maka perlu diupayakan adanya penyesuaian	Melakukan Koordinasi Dengan Instansi Terkait		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Gedung kantor dan bangunan lainnya serta sarana dan prasarannya masih kurang terawat	6	Pada saat pelaksanaan kegiatan terjadi perubahan harga dibandingkan pada saat penyusunan anggaran	Pemeliharaan yang dilaksanakan tidak dilakukan secara menyeluruh tetapi menyesuaikan ketersediaan anggaran yang ada	Memaksimalkan anggaran yang ada dengan melaksanakan rehabilitasi pada titik/ lokasi dengan skala prioritas		

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Surat pemberitahuan perbaikan dan pemberitahuan untuk tertib administrasi tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan	8	Perusahaan tidak memperhatikan surat pemberitahuan karena faktor ekonomi yang tidak mumpuni untuk mengganti komponen kendaraan yang sudah tidak laik	Tidak ada perbaikan dari pihak perusahaan terhadap kendaraan yang beroperasi sehingga kendaraan yang beroperasi tetap dalam kondisi kurang laik jalan dan tidak tertib administrasi			
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Terdapat Kendaraan Yang Beroperasi Dalam Kondisi Tidak Laik Jalan pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wiayah III	6	Perusahaan atau Pemilik Kendaraan Angkutan Umum Yang Beroperasi Tidak mematuhi ketentuan standar kondisi kendaraan yang laik jalan sesuai peraturan perundang - undangan	Rendahnya jumlah angkutan yang beroperasi dalam kondisi laik jalan			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Surat pemberitahuan perbaikan dan pemberitahuan untuk tertib administrasi tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan	8	Perusahaan tidak memperhatikan surat pemberitahuan karena faktor ekonomi yang tidak mumpuni untuk mengganti komponen kendaraan yang sudah tidak laik	Tidak ada perbaikan dari pihak perusahaan terhadap kendaraan yang beroperasi sehingga kendaraan yang beroperasi tetap dalam kondisi kurang laik jalan dan tidak tertib administrasi			
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Terdapat Kendaraan Yang Beroperasi Dalam Kondisi Tidak Laik Jalan pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wiayah IV	4	Perusahaan atau Pemilik Kendaraan Angkutan Umum Yang Beroperasi Tidak mematuhi ketentuan standar kondisi kendaraan yang laik jalan sesuai peraturan perundang - undangan	Rendahnya jumlah angkutan yang beroperasi dalam kondisi laik jalan			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Surat pemberitahuan perbaikan dan pemberitahuan untuk tertib administrasi tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan	8	Perusahaan tidak memperhatikan surat pemberitahuan karena faktor ekonomi yang tidak mumpuni untuk mengganti komponen kendaraan yang sudah tidak laik	Tidak ada perbaikan dari pihak perusahaan terhadap kendaraan yang beroperasi sehingga kendaraan yang beroperasi tetap dalam kondisi kurang laik jalan dan tidak tertib administrasi			

Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Terdapat kendaraan yang beroperasi dalam kondisi tidak laik jalan pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wiayah V	4	Perusahaan atau pemilik kendaraan angkutan umum yang beroperasi tidak mematuhi ketentuan standar kondisi kendaraan yang laik jalan sesuai peraturan perundang - undangan	Rendahnya jumlah angkutan yang beroperasi dalam kondisi laik jalan			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Surat pemberitahuan perbaikan dan pemberitahuan untuk tertib administrasi tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan	1	Perusahaan tidak memperhatikan surat pemberitahuan karena faktor ekonomi yang tidak mumpuni untuk mengganti komponen kendaraan yang sudah tidak laik	Tidak ada perbaikan dari pihak perusahaan terhadap kendaraan yang beroperasi sehingga kendaraan yang beroperasi tetap dalam kondisi kurang laik jalan dan tidak tertib administrasi	Mendatangi serta melakukan pembinaan kepada perusahaan angkutan umum yang melanggar persyaratan teknis dan laik jalan	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI	12 Bulan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A)□	Masih belum terpenuhi kebutuhan tingkat pelayanan umum dan keuangan	2	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Pelaksanaan layanan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan dan administrasi kepegawaian mengalami keterlambatan			
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	Jumlah perlengkapan jalan terpasang di perlintasan sebidang KA belum dapat memenuhi prioritas lokasi yang memerlukan pemasangan perlengkapan jalan	12	Terdapat usulan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan provinsi yang sifatnya mendesak yang belum masuk dalam perencanaan	Dengan tidak terpenuhinya kebutuhan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan maka tingkat keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Pedoman Teknis Pengendalian Lalu Lintas pada lokasi potensi kecelakaan perlintasan sebidang tidak dapat tercapai	Melaksanakan survey untuk menentukan titik lokasi pemasangan perlengkapan jalan sesuai skala prioritas	Kepala Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	12 bulan setiap tahun
Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Persentase realisasi rencana induk perkeretaapian	Kurang optimalnya keselamatan di perlintasan sebidang KA	9	Alih status ruas jalan	Tidak tersedianya fasilitas keselamatan perlintasan KA			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	Tingkat kinerja belum dilaporkan tepat waktu	6	belum adanya sistem pelaporan data yang memadai	dokumen yang tersusun belum bisa dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber data			

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi tidak tepat waktu	6	Terdapat data dukung dan data teknis yang belum memadai	Terhambatnya proses perencanaan dan penganggaran sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Sekretariat) □	Pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak efektif dan efisien	6	Dokumen dan data dukung belum tersedia	Kegiatan perkantoran tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga mengganggu pelayanan masyarakat			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Administrasi keuangan tidak berjalan secara efisien	3	Dokumen dan data dukung yang memadai belum tersedia	Kegiatan administrasi keuangan tidak berjalan sebagaimana mestinya			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen pencairan yang diajukan berpotensi tidak lengkap/tidak benar	10	Adanya tekanan kepentingan	Menyebabkan biasanya fungsi verifikasi	Adanya penetapan sanksi	Subbag Keuangan	12 bulan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Proses klaim Asuransi sulit dilakukan	6	Data dukung Klaim asuransi tidak lengkap	Klaim asuransi tidak dapat dilakukan			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Pelaksanaan Kegiatan tidak terjadwal	4	Jadwal pelaksanaan kegiatan tidak dibuat sehingga kegiatan tidak berjalan maksimal	Kegiatan tidak dilaksanakan secara maksimal			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Penyediaan tidak tepat waktu	6	Belum dibentuk penanggung jawab kegiatan	Penyediaan terlambat			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Penyediaan tidak tepat waktu	4	Belum dibentuk penanggung jawab kegiatan	Penyediaan terlambat			

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Penyediaan tidak tepat waktu	4	Belum dibentuk penanggung jawab kegiatan	Penyediaan terlambat			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Menurunnya kinerja (kerusakan) sarana dan prasarana pemerintahan	4	Kurang optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan	Menurunnya kinerja aparatur pemerintahan			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) □	Tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah belum optimal	2	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Pelaksanaan layanan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan dan administrasi kepegawaian mengalami keterlambatan	Memberikan Pengarahan, Pembinaan dan Pengawasan kepada seluruh staf Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I	March 2026
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Penyusunan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN mengalami keterlambatan	2	Kecepatan penyelesaian laporan SPJ tidak sama	Dokumen administrasi pelaksanaan keuangan perangkat daerah mengalami keterlambatan	Melaksanakan Monitoring dan Mengevaluasi Penyusunan dokumen administrasi agar tidak terjadi keterlambatan	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I	June 2026
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah belum optimal	2	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Pengelolaan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian kurang maksimal	Memberikan Pembinaan kepada Staf Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah I	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I	June 2026
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Layanan administrasi umum perangkat daerah belum optimal	2	Adanya perubahan harga pada saat pelaksanaan kegiatan	Memenuhi layanan administrasi umum menggunakan skala prioritas	Melakukan Efisiensi dan Efektivitas sesuai anggaran yang tersedia	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I	June 2026

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Penyusunan laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah belum optimal	2	Pengenaan tarif retribusi pelayanan persampahan sesuai dengan Perda terkait Retribusi Persampahan pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Bila terjadi perubahan Perda terkait pelaksanaan Retribusi Persampahan yang menetapkan adanya kenaikan tarif retribusi maka perlu diupayakan adanya penyesuaian	Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Instansi Terkait	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I	March 2026
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Gedung kantor dan bangunan lainnya serta sarana dan prasarananya masih kurang terawat.	2	Pada saat pelaksanaan kegiatan terjadi perubahan harga	Pemeliharaan yang dilaksanakan tidak dilakukan secara menyeluruh	Memaksimalkan Anggaran yang ada dengan Melaksanakan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I	March 2026
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Penyusunan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN mengalami keterlambatan	2	Pelaksanaan kegiatan berjalan tidak sesuai dengan jadwal waktu yang sudah direncanakan	Terjadi deviasi pelaksanaan kegiatan			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Kurang maksimalnya pengelolaan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	4	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Terhambatnya layanan administrasi kepegawaian			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Jumlah kebutuhan Belanja Administrasi Umum Perangkat Daerah belum memenuhi prioritas	2	Adanya perubahan harga pada saat pelaksanaan kegiatan	Paket belanja administrasi umum yang disediakan terbatas			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Terdapat penyesuaian Perda Pemerintahan Kabupaten/Kota yang menyebabkan perubahan tarif pembayaran retribusi persampahan berubah	4	Pengenaan tarif retribusi pelayanan persampahan sesuai dengan Perda terkait Retribusi Persampahan pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Bila terjadi perubahan Perda terkait pelaksanaan Retribusi Persampahan yang menetapkan adanya kenaikan tarif retribusi maka perlu diupayakan adanya penyesuaian			

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Gedung kantor dan bangunan lainnya serta sarana dan prasarananya masih kurang terawat.	4	Pada saat pelaksanaan kegiatan terjadi perubahan harga dibandingkan pada saat penyusunan anggaran.	Menurunnya kinerja aparatur pemerintahan			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pengunjung terminal tipe B pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Kurangnya minat masyarakat menggunakan transportasi umum di terminal	6	1. Kondisi fasilitas Terminal kurang memadai 2. Tidak ada daya tarik menuju terminal selain untuk mendapatkan Angkutan Umum 3. rendahnya kunjungan bus masuk terminal	Tidak berfungsinya fungsi terminal sebagai simpul transportasi dan ruang ekonomi	mempertahankan fungsi fasilitas Terminal (utama dan Penunjang) untuk memberikan kenyamanan serta menyediakan ruang ekonomi bagi bagi pengunjung dan masyarakat	Kepala BPSPW Wilayah II	12 Bulan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Presentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Meningkatnya tingkat frekuensi dan resiko di Lokasi Daerah Rawan Kecelakaan	12	Perlengkapan Jalan yang dipasang tidak sesuai dengan rekomendasi	Bertambahnya korban kecelakaan dengan tingkat Fatalitas tinggi	Survey Inventarisasi kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan sesuai dengan sebab kecelakaan	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II	12 bulan setiap tahun
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Surat pemberitahuan perbaikan dan pemberitahuan untuk tertib administrasi tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan	6	1. Tidak adanya pengawasan dan penindakan di Jalan 2. rendahnya kemampuan pengusaha untuk pemeliharaan armada	meningkatnya jumlah kecelakaan Angkutan Penumpang Umum akibat tidak laik jalan	Pembinaan Kepada Perusahaan Angkutan Umum	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	12 Bulan
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Presentase terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II	Menurunnya kepuasan masyarakat terhadap Sarana Prasarana di Terminal	1	Belum optimalnya rehabilitasi Fasilitas Utama dan Pendukung terminal	berhentinya layanan Terminal akibat kerusakan fasilitas Terminal	Pemeliharaan Bangunan Gedung dan kantor Terminal Gagak Rimang	Kepala BPSPW Wilayah II	12 Bulan

Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Terdapat Kendaraan Yang Beroperasi Dalam Kondisi Tidak Laik Jalan pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wiayah II	1	Perusahaan atau Pemilik Kendaraan Angkutan Umum Yang Beroperasi Tidak mematuhi ketentuan standar kondisi kendaraan yang laik jalan sesuai peraturan perundang - undangan	Menurunnya Jumlah Angkutan Umum yang berijin	Pembinaan Kepada Perusahaan Angkutan Umum	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	12 Bulan
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Kondisi lokasi DRK tidak dapat direhabilitasi	12	Keterbatasan ruang milik jalan dan faktor penunjang pada pemasangan perlengkapan jalan	Meningkatnya frekuensi resiko kecelakaan di lokasi tersebut	Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan secara bertahap dan berdasarkan prioritas	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	12 Bulan
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Terdapat Kendaraan Yang Beroperasi Dalam Kondisi Tidak Laik Jalan pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wiayah VI	1	Perusahaan atau Pemilik Kendaraan Angkutan Umum Yang Beroperasi Tidak mematuhi ketentuan standar kondisi kendaraan yang laik jalan sesuai peraturan perundang - undangan	Rendahnya jumlah angkutan yang beroperasi dalam kondisi laik jalan	Mengirimkan Surat Pemberitahuan Hasil Rampcheck kepada Perusahaan Angkutan Umum yang Kendaraannya tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasana Perhubungan Wilayah VI	12 Bulan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A)□	Masih belum terpenuhi kebutuhan tingkat pelayanan umum dan keuangan	2	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas	Pelaksanaan layanan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan dan administrasi kepegawaian mengalami keterlambatan,			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Penyusunan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN mengalami keterlambatan	2	Pelaksanaan kegiatan berjalan tidak sesuai dengan jadwal waktu yang sudah direncanakan	Terjadi deviasi pelaksanaan kegiatan			

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Kurang maksimalnya pengelolaan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	2	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Pengelolaan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian kurang maksimal			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Jumlah kebutuhan Belanja Administrasi Umum Perangkat Daerah belum memenuhi prioritas	2	Adanya perubahan harga pada saat pelaksanaan kegiatan	Paket belanja administrasi umum yang disediakan terbatas			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Terdapat penyesuaian Perda Pemerintahan Kabupaten/Kota yang menyebabkan perubahan tarif pembayaran retribusi persampahan berubah.	2	Pengenaan tarif retribusi pelayanan persampahan sesuai dengan Perda terkait Retribusi Persampahan pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Bila terjadi perubahan Perda terkait pelaksanaan Retribusi Persampahan yang menetapkan adanya kenaikan tarif retribusi maka perlu diupayakan adanya penyesuaian			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Gedung kantor dan bangunan lainnya serta sarana dan prasarannya masih kurang terawat.	2	Pada saat pelaksanaan kegiatan terjadi perubahan harga dibandingkan pada saat penyusunan anggaran.	Pemeliharaan yang dilaksanakan tidak dilakukan secara menyeluruh tetapi menyesuaikan ketersediaan anggaran yang ada			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) □	masih belum terpenuhinya kebutuhan tingkat pelayanan umum dan keuangan	2	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Pelaksanaan layanan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan dan administrasi kepegawaian mengalami keterlambatan			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Penyusunan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN mengalami keterlambatan	2	Pelaksanaan kegiatan berjalan tidak sesuai dengan jadwal waktu yang sudah direncanakan	Terjadi deviasi pelaksanaan kegiatan			

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Kurang maksimalnya pengelolaan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	2	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Pengelolaan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian kurang maksimal			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Jumlah kebutuhan Belanja Administrasi Umum Perangkat Daerah belum memenuhi prioritas	2	Adanya perubahan harga pada saat pelaksanaan kegiatan	aket belanja administrasi umum yang disediakan terbatas			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Terdapat penyesuaian Perda Pemerintahan Kabupaten/Kota yang menyebabkan perubahan tarif pembayaran retribusi persampahan berubah	2	Pengenaan tarif retribusi pelayanan persampahan sesuai dengan Perda terkait Retribusi Persampahan pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Bila terjadi perubahan Perda terkait pelaksanaan Retribusi Persampahan yang menetapkan adanya kenaikan tarif retribusi maka perlu diupayakan adanya penyesuaian			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Gedung kantor dan bangunan lainnya serta sarana dan prasarananya masih kurang terawat	2	Pada saat pelaksanaan kegiatan terjadi perubahan harga dibandingkan pada saat penyusunan anggaran	Pemeliharaan yang dilaksanakan tidak dilakukan secara menyeluruh tetapi menyesuaikan ketersediaan anggaran yang ada			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A)□	Masih belum terpenuhi kebutuhan tingkat pelayanan umum dan keuangan	1	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Pelaksanaan layanan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan dan administrasi kepegawaian mengalami keterlambatan,	Memberikan pembinaan dan pengarahannya kepada staf Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI	12 Bulan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Penyusunan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN mengalami keterlambatan	1	Pelaksanaan kegiatan berjalan tidak sesuai dengan jadwal waktu yang sudah direncanakan	Terjadi deviasi pelaksanaan kegiatan	Melakukan monitoring pelaksanaan setiap kegiatan supaya tidak terjadi keterlambatan	Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI	12 Bulan

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Kurang maksimalnya pengelolaan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Pengelolaan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian kurang maksimal	Memberikan pembinaan kepada staf Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Kepala Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah VI	12 Bulan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Jumlah kebutuhan Belanja Administrasi Umum Perangkat Daerah belum memenuhi prioritas	1	Adanya perubahan harga pada saat pelaksanaan kegiatan	Paket belanja administrasi umum yang disediakan terbatas	Melakukan efiseinsi dan efektifitas penggunaannya	Kepala Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah VI	12 Bulan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Terdapat penyesuaian Perda Pemerintahan Kabupaten/Kota yang menyebabkan perubahan tarif pembayaran retribusi persampahan berubah.	1	Pengenaan tarif retribusi pelayanan persampahan sesuai dengan Perda terkait Retribusi Persampahan pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Bila terjadi perubahan Perda terkait pelaksanaan Retribusi Persampahan yang menetapkan adanya kenaikan tarif retribusi maka perlu diupayakan adanya penyesuaian	Melakukan Koordinasi Dengan Instansi Terkait	Kepala Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah VI	12 Bulan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Gedung kantor dan bangunan lainnya serta sarana dan prasarannya masih kurang terawat.	4	Pada saat pelaksanaan kegiatan terjadi perubahan harga dibandingkan pada saat penyusunan anggaran.	Pemeliharaan yang dilaksanakan tidak dilakukan secara menyeluruh tetapi menyesuaikan ketersediaan anggaran yang ada	Memaksimalkan anggaran yang ada dengan melaksanakan rehabilitasi pada titik/ lokasi dengan skala prioritas	Kepala Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah VI	12 Bulan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	Menurunnya tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Balai Transportasi Jawa Tengah	4	Belum semua komponen pendukung pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan tersedia	Pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Balai Transportasi Jawa Tengah kurang maksimal			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Penyusunan dokumen administrasi keuangan tidak baik	4	Kurangnya pegawai yang mempunyai kompetensi	Dokumen administrasi keuangan tidak disusun dengan baik dan benar			

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Menurunnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	4	Kualitas layanan administrasi kepegawaian menurun karena pelaksanaan tidak sesuai SOP	Pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian tidak sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Menurunnya layanan administrasi umum Perangkat Daerah	4	Belum semua kebutuhan terakomodir	Adanya kebutuhan administrasi umum yang belum dapat terpenuhi secara optimal			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Kegiatan tidak dilaporkan dengan baik	4	Identifikasi kebutuhan belum optimal	Pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Kegiatan tata usaha kurang berjalan dengan baik	4	Pemeliharaan Barang milik daerah tidak terpelihara dengan baik	Kegiatan tata usaha kurang berjalan dengan baik karena fungsi barang milik daerah belum optimal			